



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

**WALIKOTA PALOPO
TAHUN 2014**



**BAPPEDA KOTA PALOPO
2015**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Palopo Tahun Anggaran 2014 ini, dapat tersusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Palopo untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai Walikota Palopo.

Kewajiban Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota kepada DPRD, merupakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (2) bahwa "*Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir*", yang secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Petanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Laporan ini secara substansiil memuat informasi umum mengenai :

- Pertama** : data dan informasi tentang kondisi umum lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Kota Palopo selama tahun 2014,
- Kedua** : informasi mengenai kebijakan umum Pemerintah Kota Palopo tahun 2014,
- Ketiga,** : informasi mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2014,
- Keempat** : informasi mengenai penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dan tugas-tugas umum pemerintahan.

Laporan ini secara umum menggambarkan kondisi Kota Palopo sepanjang tahun 2014 yang berjalan kondusif, ini tercermin dari terpeliharanya kondisi aman dan damai di tengah masyarakat dalam keberlangsungan aktivitas keagamaan, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, yang kemudian mendasari kebijakan umum yang disepakati antara Walikota Palopo dan DPRD Kota Palopo, demikian pula dengan pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dan tugas-tugas umum pemerintahan secara umum berjalan baik sesuai mekanisme dan tahapan yang ditetapkan namun masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan sehingga diperlukan masukan dari berbagai pihak agar kedepan diharapkan dapat berjalan lebih baik.

LKPJ Walikota Palopo ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Kota Palopo dalam perumusan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan berbagai kelemahan dan kekurangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini telah bekerja sama secara sinergis, secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung setiap program pembangunan di Kota Palopo.

Khusus kepada seluruh jajaran aparat lingkup Pemerintah Kota Palopo, Kami menyampaikan rasa bangga atas seluruh upaya dan ketulusan hati yang telah bekerja tanpa mengenal lelah dalam memberikan hasil yang maksimal, sehingga meringankan langkah dan tugas kita bersama.

Demikian pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Palopo Tahun Anggaran 2014 yang disampaikan ke hadapan DPRD Kota Palopo yang terhormat. Semoga Allah Subhanahu Wataala senantiasa membuka dan memudahkan jalan menuju terwujudnya harapan bersama yakni kemajuan

daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Wassalamu Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Palopo, 10 Maret 2015

Walikota Palopo,



Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH

DAFTAR ISI

HALAMAN

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Daerah	3
1. Kondisi Geografis Daerah	3
2. Kondisi Demografi	4
3. Kondisi Ekonomi	6

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	13

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	32
B. Pengelolaan Belanja Daerah	43
C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah	50

BAB IV KEADAAN UMUM WILAYAH

A. Urusan Wajib	54
B. Urusan Pilihan	154

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima.....	174
--	-----

BAB VI PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah.....	181
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.....	183
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah	184
D. Pembinaan Batas Wilayah.....	186
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	187

BAB VII PENUTUP

Lampiran :

BAB. I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Kota Palopo dibentuk dari peningkatan status Kota Administratif Palopo Kabupaten Luwu menjadi Kota Otonom, pembentukannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam usianya yang ke-12 Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun Pertama penyelenggaraan Pemerintahan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018 yang menjabarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih masa bakti 2013-2018 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2013.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014 maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 71 ayat (2), bahwa ***"Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir"***; yang secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Palopo Tahun Anggaran 2014 yang didasarkan pada ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo.
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2012-2032.
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2013-2018.
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun anggaran 2014.
20. Peraturan Walikota Palopo Nomor 38 tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun anggaran 2014.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kedudukan geografis Kota Palopo berada pada posisi strategis sebagai titik simpul jalur transportasi darat dan laut poros trans Sulawesi. Pada posisi ini Kota Palopo menjadi salah jalur distribusi barang jalur darat dari Makassar dan Pare-Pare menuju Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, sedangkan pada jalur

transportasi laut Kota Palopo sudah menjadi salah satu pelabuhan laut menuju kota-kota di wilayah Sulawesi dan luar Sulawesi Selatan.

Kedudukan geografis Kota Palopo sebagai wilayah yang berada di pesisir Teluk Bone dimana sebagian besar kebutuhan air bersih didukung dengan keberadaan hutan yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Luwu dan Toraja Utara. Kondisi alam pada wilayah hulu khususnya perbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Toraja Utara sangat berpengaruh pada kondisi di Kota Palopo. Kondisi cuaca dengan hujan lebat yang terjadi sekitar bulan Juni sampai Desember membuat jumlah wilayah rentan terhadap banjir dan tanah longsor.

Secara administratif luas wilayah Kota Palopo kurang lebih 247,52 Km² (data BPS Kota Palopo) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Toraja Utara

Dari aspek topografinya, wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-100 m sebesar 63%, selebihnya merupakan daerah pegunungan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan tingkat kemiringan tanah

- diatas 40⁰ : 9,28%
- 15- 20⁰ : 1,81%
- 2 - 15⁰ : 33,71%
- 0 - 2⁰ : 30.26%

b. Berdasarkan ketinggian

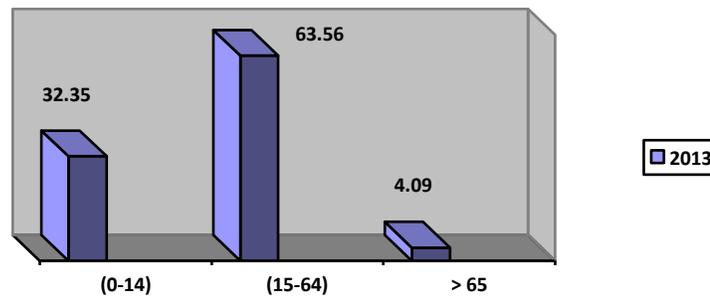
- 0 – 500 m : 58,00 %
- 501-1000 m : 24,00 %
- Di atas 1000 m : 14,00 %

Gambaran umum wilayah pesisir dan laut menunjukkan Kota Palopo merupakan salah satu kota dengan potensi pesisir dan pantai yang cukup besar, panjang garis pantai Kota Palopo kurang lebih 24 km, terbentang dari Kecamatan Wara Selatan sampai Kecamatan Telluwanua sepanjang Teluk Bone, memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar yang dapat menjadi sektor unggulan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat pada umumnya.

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data BPS, penduduk Kota Palopo Tahun 2013 sejumlah 160.819, secara rinci menurut jenis kelamin masing-masing 78,509 jiwa laki-laki dan 82.310 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 95,38%. Pertumbuhan penduduk mencapai 2,88 persen pertahun, misalnya dari 105.703 jiwa pada Tahun 2012 menjadi 160.819 jiwa pada tahun 2013. Jumlah rata – rata anggota dalam satu rumah tangga pada keadaan akhir tahun 2013 tercatat sebesar 4,59 atau dengan kata lain setiap rumah tangga di Kota Palopo beranggotakan 4 - 5 orang.

Jika dicermati dari aspek kelompok usia, struktur penduduk Kota Palopo didominasi oleh kelompok usia produktif, dari 160.819 jiwa penduduk sekitar 32,35 persen berada pada usia muda (0-14 tahun) dan 4,09 persen pada kelompok usia tua (65 tahun keatas), selebihnya 63.56 persen yang berada pada kelompok usia produktif (15 – 64 tahun). Ini berarti Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) Kota Palopo Tahun 2013 sebesar 51,33 persen. Artinya, penduduk Kota Palopo yang berusia produktif (usia 15 – 64 tahun) menanggung beban bagi penduduk yang belum dan atau tidak produktif sekitar 51-52 orang dari jumlah penduduk secara total. sebagaimana dapat dilihat pada grafik jumlah Penduduk berikut ini :



Sumber : Data BPS Kota Palopo 2014

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang paling penting dalam pembangunan ekonomi, karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Masalah kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional maupun regional mendapat perhatian banyak orang. Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Penduduk tersebut terdiri dari angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh keuntungan paling sedikit satu jam berturut – turut selama seminggu.

Berdasarkan data BPS (Palopo dalam Angka 2014) jumlah pencari kerja sampai dengan tahun 2013 tercatat sebanyak 6.848 orang yang terdiri dari 2.767 laki – laki dan 2.081 perempuan, pencari kerja yang telah ditempatkan dirinci menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan dari 178 orang pencari kerja yang berhasil ditempatkan sekitar 1,69% berpendidikan S1 keatas, 0,59% berpendidikan Sarjana Muda/D3, 33,71% berpendidikan SLTA Kejuruan dan D1/D2 64,04% berpendidikan SLTA Umum.

3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya

a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan Kota Palopo dapat dilihat dari kontribusi sektor atau lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB dan pertumbuhannya.

Hingga tahun 2013, sektor Pertanian masih menjadi penopang perekonomian Kota Palopo, namun seiring perkembangan sektor lain, peranan sektor ini menurun. Jika pada tahun 2011, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 18,03 persen terhadap PDRB Kota Palopo, pada tahun 2012 menjadi sebesar 17,12 persen hingga sebesar 15,86 persen pada tahun 2013.

Berdasarkan kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB, struktur perekonomian Kota Palopo ditopang oleh empat sektor terbesar yakni sektor Perdagangan, Hotel & Restoran 23,64 %, Jasa-Jasa 19,42 %, Petanian 15,86 % dan Keuangan, Persewaan 15,70%, Perkembangan presentase kontribusi sektor-sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha tahun 2010 – 2013

NO	LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	21,96	18,03	17,12	15,86
2	Pertambangan & Penggalian	0,15	0,14	0,14	0,11
3	Industri Pengolahan	3,80	3,65	3,45	3,40
4	Listrik dan Air Bersih	1,65	1,71	1,73	1,80
5	Bangunan	11,29	12,11	11,01	10,74
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,11	21,42	22,85	23,64
7	Angkutan dan Komunikasi	8,99	9,21	9,13	9,33
8	Keuangan , Persewaan	13,12	14,16	14,94	15,70
9	Jasa – Jasa	18,92	19,58	19,64	19,42
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data BPS Kota Palopo Tahun 2014

Gambaran perkembangan struktur ekonomi Kota Palopo ini tidak jauh berbeda dengan struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2013, sektor-sektor tersier merupakan sektor penopang perekonomian Sulawesi Selatan dengan menyumbang sebesar 51,17 persen terhadap total PDRB. Kemudian disusul oleh sektor primer dan sekunder secara berurutan sebesar 29,89 persen dan 18,95 persen. Sektor pertanian masih merupakan sektor penyumbang terbesar (23,90 persen) terhadap PDRB Provinsi

Sulawesi Selatan. Hal tersebut sejalan dengan predikat Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra pertanian di Indonesia Timur.

Pertumbuhan riil beberapa sektor sejalan dengan kontribusi pada PDRB yang juga berpengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo antara lain sektor Listrik/gas dan Air, sektor Perdagangan, dan sektor Bank Lembaga Keuangan. Secara rinci pertumbuhan masing - masing sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Pertumbuhan Riil Per Sektor Kota Palopo Tahun 2010 - 2013

NO	LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013
1.	Pertanian	-4,63	-8,37	5,60	3,04
2.	Pertambangan/Penggalian	-5,12	4,21	4,90	-10,57
3.	Industri Pengolahan	4,47	5,88	5,76	6,03
4.	Listrik, Gas, Air Bersih	13,91	17,04	7,11	11,55
5.	Bangunan	9,89	17,11	-1,69	6,62
6.	Perdagangan, Restoran, Hotel	18,54	16,01	14,04	13,35
7.	Angkutan & Komunikasi	9,99	14,36	11,19	9,42
8.	Bank & Lembaga Keuangan	14,97	15,85	16,40	16,14
9.	Jasa – Jasa	5,86	7,78	3,84	4,16
	PDRB	7,29	8,16	8,68	8,99

Sumber : Data BPS Kota Palopo Tahun 2014

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo mencapai 8,99%, pertumbuhan ini dipicu oleh kinerja positif semua sektor, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang berkontraksi (tumbuh negatif) sebesar 10,57%. Kinerja terbaik terjadi pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang tumbuh hingga 16,14% selain sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif, sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan terendah sebesar 3,04%.

Tiga sektor yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi Palopo yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor angkutan dan komunikasi. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 3,28% terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mempunyai pertumbuhan tinggi memberikan

kontribusi sebesar 2,46% sedang sektor angkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 1,01%.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tahun 2013 sebesar 8,99% mengalami percepatan pertumbuhan dibanding dengan tahun 2012 sebesar 8,68%, pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut dari sektor keuangan dan sektor perdagangan yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo 2010-2013

No	Tahun	PDRB (milyar)	Pertumbuhan
1	2010	925,08	7,29
2	2011	1.000,56	8,16
3	2012	1.087,42	8,68
4	2013	1.185,21	8,99
Rata – rata			8,28

Sumber : Data BPS Kota Palopo 2014

Pertumbuhan ekonomi kota palopo kurun waktu 3 tahun terakhir bergerak di atas angka 8 persen. Jika pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo mencapai 7,29 persen, dan tahun 2011 menguat sekitar 8,16 persen hingga tahun 2012 yakni sebesar 8,68 persen. Hingga Tahun 2013 masih menguat di 0,31 poin menjadi 8,99 persen.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini melampaui target yang menjadi salah satu sasaran strategik dalam pembangunan bidang ekonomi di daerah pada RPJMD Tahun 2008-2013 yaitu upaya untuk mempertahankan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 8 %. Sementara jika dilihat pada nilai PDRB Atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp.3.081.642,00 (juta rupiah) atau meningkat sekitar 444,10 (juta rupiah) dari keadaan tahun sebelumnya 2012 yakni sebesar 2.637.545,42 (juta rupiah) nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan meningkat hampir 7 kali lipat dibanding keadaan pada tahun

2000, hal ini terlihat dari indeks perkembangan yang mencapai 688,75 persen pada tahun 2013 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Perbandingan PDRB harga berlaku dan konstan Kota Palopo
Tahun 2010 – 2013

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rp)	Atas Dasar Harga Konstan (juta Rp)
2010	1.946.847,34	925.082,15
2011	2.284.801,89	1.000.569,31
2012	2.637.545,42	1.087.419,80
2013	3.081.642,00	1.185.210,25

Sumber : Data BPS Kota Palopo 2014

C. Inflasi

Laju Inflasi Kota Palopo (inflasi umum) dari tahun 2011 hingga tahun 2013 tercatat sebesar 5,25 dimana nilai inflasi tertinggi pada bulan Juli 2013 sebesar 2,98 sementara pada periode yang sama inflasi di beberapa Kota di Sulawesi Selatan cukup merata kecuali Kota Pare-pare 3,04 sedangkan inflasi Nasional tercatat sebesar 3,71 dan inflasi Sulawesi Selatan sebesar 3,81. Perkembangan inflasi Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Inflasi Umum Kota Palopo Tahun 2011 – 2013

Tahun	Inflasi	Inflasi Tertinggi	
		Bulan	Nilai Inflasi
2011	3,35	Agustus	0,90
2012	4,42	Agustus	1,14
2013	5,25	Juli	2,98

Sumber data : BPS Kota Palopo 2014

d. Sosial Masyarakat

Gambaran kondisi sosial masyarakat dapat dicermati antara lain dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka kemiskinan. IPM

merupakan indikator pokok dalam melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. IPM Kota Palopo menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7

Perkembangan IPM Kota Palopo 2011 - 2013

No	Tahun	IPM	IPM SUL-SEL
1.	2011	76,85	72,77
2.	2012	77,28	73,29
3.	2013	77,70	

Sumber : Data BPS Kota Palopo Tahun 2014

Perkembangan IPM tersebut berkaitan erat dengan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Merujuk pada data tahun 2011 hingga 2013 perkembangan IPM Kota Palopo melaju lebih cepat jika dibandingkan dengan rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan. IPM Kota Palopo bahkan berada pada peringkat ke tiga setelah Kota Makassar dan Pare - Pare di Sulawesi Selatan.

Perkembangan ini ditunjang oleh kebijakan sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Semakin terbukanya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan khususnya setelah dilaksanakannya program pendidikan gratis Propinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Kabupaten/ Kota, telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap peningkatan akses pelayanan pendidikan di tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Palopo mengalami peningkatan, dari tahun 2011 sebesar 10,04 tahun, tahun 2012 telah mencapai 10,16 tahun, dan tahun 2013 telah mencapai 10,19. Angka ini menandakan bahwa pada umumnya penduduk Kota Palopo telah bersekolah di atas rata-rata 10 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan minimal di

tingkat Sekolah Menengah Pertama, ini juga berarti bahwa Kota Palopo dapat dinilai telah menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Propinsi yang pada tahun 2012 baru mencapai angka 7,10 tahun.

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah seiring sejalan peningkatan pada Angka Melek Huruf, yakni kemampuan membaca dan menulis untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas. Jika pada tahun 2011 angka melek huruf di Kota Palopo mencapai 97,34 dan pada tahun 2013 telah mencapai angka 97,45 %, ini berarti bahwa sisa 2 % lebih dari penduduk Kota Palopo yang berusia 15 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis huruf latin, jika dibandingkan dengan angka melek huruf Sul-Sel yang pada tahun 2012 baru mencapai 87,02%.

Perkembangan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kota Palopo tahun 2011 – 2013 dapat dicermati dari pergeseran angka garis kemiskinan dan persentase jumlah penduduk miskin Kota Palopo. Kondisinya belum mengalami perubahan yang cukup berarti, jika mencermati keadaan angka kemiskinan antara tahun 2011 dan 2013 terlihat bahwa angka kemiskinan menunjukkan perubahan yang relatif baik karena menurun sekitar 0,65% yaitu dari angka 10,22% pada tahun 2011 menurun menjadi 9,57% tahun 2013 meskipun sedikit fluktuatif ditahun 2012. Hal ini menunjukkan secara umum adanya kinerja yang baik dari sinergi kebijakan dan berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan.

Tabel 8

Persentase Kemiskinan Kota Palopo 2011 - 2013

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2011	149.419	15.300	10,22
2012	152.703	14.800	9,46
2013	160.819	15.500	9,57

Sumber : BPS Kota Palopo 2014

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi

Visi merupakan gagasan tentang keinginan masyarakat, ide-ide dasar, dan tujuan yang ingin dicapai. Visi memberikan petunjuk mengenai arah organisasi, agar konsisten dan dapat eksis, visi mengandung langkah antisipatif, inovatif serta produktif dalam memanfaatkan semua potensi untuk mencapai cita-cita. Visi tidak lain adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh pemerintah.

Sebagai suatu gagasan, Visi mempunyai makna dan pengertian yang luas, karena memuat ide mendasar dan nilai-nilai yang mengakomodir aspirasi dan ekspresi masyarakat sejalan dengan Visi pembangunan Kota Palopo yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018 yakni "***Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga dan Agroindustri yang Berwawasan Agama, Budaya dan Lingkungan yang Terkemuka di Indonesia***". Visi ini mengandung makna:

Terwujudnya Palopo, adalah pernyataan semangat, yakni semangat mewujudkan gagasan untuk mengantarkan Kota Palopo pada kondisi yang lebih baik, semangat untuk mengangkat harkat dan martabat daerah agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional pada semua aspek, sehingga dapat disejajarkan dengan daerah-daerah yang terkemuka di Indonesia.

Kota Palopo sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga dan Agroindustri yang Berwawasan Agama, Budaya dan Lingkungan, adalah pernyataan penggambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun perencanaan 2018, pokok-pokok gambaran tersebut dideskripsikan sebagai berikut :

Kota Pendidikan, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada tahun 2018, dimana penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah, berlangsung sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi salah satu tujuan pendidikan bagi masyarakat di wilayah regional Sulawesi

Kota Jasa, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada tahun 2018, dimana penyelenggaraan pelayanan public berlangsung sesuai dengan Standard, Norma, dan Prosedur (SNP), dan pelayanan pada sektor swasta memenuhi standar mutu pelayanan, sehingga memperkuat citra Kota Palopo sebagai Kota Jasa..

Kota Niaga, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada tahun 2018, dimana Kota Palopo menjadi sentra distribusi barang dan logistic untuk wilayah regional Sulawesi, dan aktifitas perniagaan berlangsung nyaman dan aman karena didukung oleh infrastruktur perniagaan yang tertata dan memenuhi standar.

Kota Agroindustri, gambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun 2018, dimana sektor industri khususnya yang berbasis rumah tangga tumbuh dan berkembang menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat, di sisi lain produk-produk industri pangan berbahan lokal menjadi salah satu produk unggulan daerah, memiliki *brand* kuat, sehingga menjadi *icon* Kota Palopo.

Berwawasan Agama, gambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun 2018, dimana kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama berlangsung dalam toleransi yang harmonis, terciptanya kesadaran masyarakat dalam

bertoleransi *intra* dan *inter* umat beragama menjadi salah satu barometer toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia.

Berwawasan Budaya, Gambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun 2018, dimana berlangsungnya interaksi dalam berbagai aspek dalam masyarakat yang beragam budaya berlangsung dalam *interrelasi* yang harmonis, berkembangnya keadaan *interrelasi* yang harmonis menjadi salah satu barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Berwawasan Lingkungan, gambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun 2018, dimana aktifitas masyarakat pada semua aspek dilaksanakan dengan kesadaran untuk menjaga dan memelihara keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga kesadaran tersebut dapat mendorong terpenuhinya kriteria ketersediaan lingkungan hidup Kota Palopo.

Terkemuka di Indonesia, merupakan pernyataan komparasi terhadap keadaan yang dicapai dengan capaian daerah-daerah lainnya, terkemuka di Indonesia adalah komparasi Kota Palopo yang mensejajarkannya dengan Kota yang telah maju dan berkembang dari aspek penyelenggaraan pendidikan, mutu pelayanan public, sentra distribusi barang dan logistic regional, industry rumah tangga. Sedangkan dari aspek berwawasan dimaknai sebagai komparasi Kota Palopo sebagai salah satu barometer di Indonesia dalam hal kerukunan umat beragama, interrelasi keragaman budaya, dan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

Untuk merealisasikan visi tersebut maka dirumuskan misi sebagai pernyataan tindakan strategis dan sekaligus menjadi rumusan agenda pembangunan yang akan dijabarkan melalui kebijakan umum anggaran, sebagai pola dasar pembangunan lima tahun ke depan, adapun rumusan misi sebagai berikut :

(1) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum.

Untuk memperkuat citra Kota sebagai Kota Jasa, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada tata pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas sistem perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang : terbuka, transparan, akuntabel, partisipatif, berkeadilan yang dibingkai oleh regulasi, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur.

(2) Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat di berbagai sektor.

Salah satu ciri Kota Jasa adalah berkembang dan berkualitaskannya pelayanan publik yang melibatkan berpartisifasi masyarakat dalam menjaga kualitas layanan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan, melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan perbaikan pelayanan umum.

(3) Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia khususnya sandang, pangan bagi masyarakat Kota Palopo.

Pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan dan sandang, dilakukan melalui pengembangan agroindustri berbasis rumah tangga. Upaya-upaya untuk pengembangan agroindustri berbasis rumah tangga antara lain mencakup Penyediaan kebutuhan pangan, Pengembangan Tanaman Pangan; Hortikultura; Peternakan; Perkebunan; Perikanan; Kelautan dan pengembangan industri rumah tangga.

(4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.

Pendidikan adalah investasi yang menjadi salah satu kunci pokok dalam pembangunan manusia. Upaya untuk mewujudkan Palopo sebagai

Kota Pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya-upaya ini mencakup optimalisasi penyelenggaraan PAUD, memelihara akses pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, mendukung dan akselerasi pengembangan pendidikan tinggi.

(5) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu upaya penting yang dilakukan untuk mewujudkan Palopo sebagai Kota Jasa adalah mengembangkan pelayanan publik dalam bidang kesehatan, upaya-upaya yang dilakukan mencakup peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan

(6) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara efisien dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya di bidang perkoperasian/syariah, industri rumah Tangga, UMKM, Lembaga Keuangan dan Jasa, serta mengembangkan pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dilakukan untuk mendukung Kota Palopo menjadi Kota Niaga, upaya-upaya ini mencakup penguatan simpul kelembagaan koperasi, industri rumah tangga, UMKM, lembaga keuangan dan jasa yang bermuara pada distribusi barang dan logistik; memperkuat daya tarik destinasi wisata; dan mendorong interrelasi keragaman budaya.

(7) Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan.

Salah satu ciri kota jasa adalah berlangsungnya pelayanan yang mudah dan efektif yang dapat mendorong kondusifnya iklim berinvestasi. Dalam rangka menjamin berkembangnya iklim investasi yang kondusif,

maka upaya-upaya yang dilakukan mencakup: Penguatan kualitas pelayanan untuk mendorong (kemudahan) investasi dan terciptanya lapangan kerja baru dan Peningkatan kompetensi tenaga kerja

(8) Penataan kota yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan Palopo sebagai Kota berwawasan lingkungan melalui penataan kota yang berwawasan lingkungan, maka dilakukan upaya-upaya : Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang ; Pengembangan ruang terbuka hijau ; penguatan fungsi kawasan ; Penanggulangan bencana

(9) Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan ketertiban dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Untuk mewujudkan Kota Palopo sebagai salah satu barometer nasional dalam kehidupan beragama, maka upaya yang dilakukan adalah mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, upaya-upaya ini mencakup Penguatan kesadaran berbangsa; toleransi (kerukunan) beragama; menjaga ketertiban dan keamanan serta harmonisasi sosial.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan

mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Dalam kaitan ini, perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni :

- (1) Perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan.

Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yakni:

- (1) Perspektif masyarakat/layanan.
- (2) Perspektif proses internal.
- (3) Perspektif kelembagaan
- (4) Perspektif keuangan.

2. Arah Kebijakan.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu.

Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka

mencapai sasaran tahapan lima tahunan. Dengan prioritas tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan, dalam pelaksanaan pembangunan penentuan arah kebijakan yang akan dituangkan dalam laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota/Wakil Walikota Tahun Anggaran 2014 adalah arah kebijakan Pembangunan tahun 2014 Kota Palopo.

Arah Pembangunan Pemerintah Kota Palopo di tahun 2014, sebagai tahun Pertama dari pelaksanaan RPJMD 2013-2018 yang ditetapkan sebagai tahun peletakan dasar-dasar kebijakan untuk mendukung pencapaian target-target strategis. Selain itu dalam tahun 2014 dilakukan penguatan kebijakan untuk melanjutkan agenda kebijakan-kebijakan strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2013. Arah kebijakan pembangunan tersebut mencakup upaya-upaya yang dilakukan pada Visi, misi. Kebijakan pembangunan pada tahun 2014 yang diarahkan kepada pencapaian Misi sebagai berikut:

- Misi I : Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum mencakup:
1. Penataan organisasi dan sistem pelayanannya;
 2. Penataan Sumber Daya manusia
 3. Penataan peran dan fungsi lembaga perencanaan daerah
 4. Penataan sistem pengelolaan keuangan dan pengawasan daerah.
- Misi II : Mendorong Pemberdayaan Masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat mencakup:
1. Optimalisasi Peran serta Masyarakat dan lembaga terhadap pelayanan.
 2. Optimalisasi peran serta masyarakat dan lembaga swadaya

masyarakat dalam pembangunan

3. Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelolaan perijinan dan pelayanan umum
4. Dukungan terhadap pemberlakuan standar pelayanan (SOP,SPM, SPP) pada semua SKPD.

Misi III : Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia khususnya pangan bagi masyarakat Kota Palopo mencakup:

1. Penguatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana produksi
2. Peningkatan sinergitas dalam pengelolaan dan distribusi ketersediaan pangan.

Misi IV : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui jalur pendidikan formal dan non formal mencakup :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana PAUD
2. Peningkatan efektifitas dukungan pembiayaan layanan pendidikan
3. Penataan pendidik dan tenaga kependidikan
4. Pengembangan Kerjasama dalam mendidik pemuda pelaut.
5. Mendorong penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Misi V : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan melalui:

1. Pelibatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kesehatan
2. Penyediaan sarana prasaranan dukungan sistim pelayanan kesehatan masyarakat.

Misi VI : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara efisien dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya bidang perkoprasian/syariah industri rumah tangga,UMKM, lembaga keuangan dan jasa, serta

mengembangkan pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur yang memadai mencakup :

1. Penguatan kelembagaan perkoprasian
2. Penguatan kerjasama distribusi barang dan logistik
3. Sinergitas wawasan budaya niaga dalam masyarakat

Misi VII Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong terciptanya tenaga pekerjaan mencakup:

1. Pemberian kemudahan dalam berinvestasi
2. Penyiapan dasar-dasar program dalam rangka peningkatan lembaga latihan kerja.

Misi VIII Penataan Kota yang berwawasan lingkungan mencakup:

1. Upaya penegangan regulasi RTRW
2. Sinergitas program pembangunan kawasan Salemo dan kawasan industri peternakan
3. Sinergitas peningkatan kelestarian kawasan lingkungan dan budidaya.

Misi IX Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan ketertiba dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis mencakup:

1. Penguatan nilai Pancasila dalam masyarakat
2. Penguatan nilai-nilai bertoleransi
3. Pencegahan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mempunyai peranan penting dan strategis dalam menentukan kapasitas keuangan daerah, baik dalam membiayai belanja daerah, mengendalikan defisit anggaran maupun dalam memelihara dan memantapkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan. Sejalan dengan perkembangan kegiatan perekonomian daerah serta berbagai langkah kebijakan dan administrasi di bidang pendapatan daerah yang telah dilakukan, maka pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun jika dilihat dari struktur pendapatan daerah, terlihat masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah, terutama penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Penyesuaian.

Peningkatan terhadap struktur pendapatan daerah didukung oleh meningkatnya peranan beberapa faktor yang menjadi variabel penyusun dalam menentukan besaran alokasi dana perimbangan seperti jumlah penduduk, jumlah pegawai, pertumbuhan ekonomi dan pembentukan PDRB. Pada sisi lain kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara kumulatif masih sangat terbatas, dengan rata-rata baru sekitar 7 persen setiap tahunnya.

Peningkatan penerimaan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikasi penting dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Berkaitan dengan itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Kota Palopo telah melakukan langkah-langkah pembaharuan kebijakan serta penyempurnaan sistem dan

administrasi pajak dan retribusi daerah. Langkah-langkah penyempurnaan dan evaluasi atas kebijakan daerah, administrasi pajak dan retribusi daerah yang dimaksudkan agar pelaksanaan sistem penerimaan pendapatan asli daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Langkah-langkah pembaharuan kebijakan penerimaan PAD tersebut dilaksanakan antara lain melalui pembentukan dan/atau penyesuaian regulasi sesuai dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan retribusi daerah.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sesuai dengan aspek legalitas dan karakteristik daerah, maka hal utama yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat pengelola pendapatan daerah, peningkatan intensitas perimbangan keuangan antara Pusat dengan Daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah/negara. Terkait dengan hal tersebut telah ditempuh berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- 2) Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat terpenuhi pendapatan daerah, minimal untuk mencapai target yang ditetapkan dan tepat waktu.

- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dalam tahun anggaran berkenaan, dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
- 4) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum, dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah yang ditujukan kepada :
 - a) Peningkatan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta usaha-usaha lainnya yang berpotensi untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - b) Pemanfaatan PAD secara proporsional pada program-program strategis yang dapat meningkatkan penerimaan PAD
 - c) Peningkatan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

Selanjutnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana, guna peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan aspek kepentingan umum, tetap

menjadi landasan utama dalam merealisasikan target pendapatan. Hal ini dilakukan melalui beberapa program, yakni :

- 1) Program Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 2) Program peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah Kota Palopo dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, antar SKPD Pemerintah Kota Palopo, dan dengan pihak ketiga dibidang pendapatan;
- 3) Program peningkatan sumber daya manusia aparatur pengelola pendapatan;
- 4) Program peningkatan sarana dan prasarana;
- 5) Program peningkatan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Palopo dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak;
- 6) Program penegakan peraturan daerah di bidang pendapatan (Law Enforcement).

Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong pendapatan daerah sesuai dengan jenis penerimaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menempuh pendekatan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dapat direalisasi penerimaannya secara rasional dan terukur dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan pendapatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

b. Penerimaan Dana Perimbangan.

Pendapatan dari Dana Perimbangan sangat terkait dengan pelaksanaan desentralisasi kewenangan dan fiskal yang diserahkan kepada daerah, Komponen Dana Perimbangan bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerimaan Dana Perimbangan yang dicapai atas dasar formulasi bagi hasil yang telah ditetapkan dengan kemampuan optimal pemungutan yang dilakukan di daerah serta intensitas koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada dasarnya dalam struktur APBD adalah merupakan jenis penerimaan yang bersumber dari Pendapatan lainnya.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Sesuai pokok-pokok kebijakan di bidang pendapatan, maka target dan realisasi Pendapatan Daerah yang dapat dicapai dalam Tahun Anggaran 2014 nampak dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palopo
Tahun Anggaran 2014

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
PENDAPATAN	695.773.648.848,00	704.269.186.349,57	101,22
PENDAPATAN ASLI DAERAH	77.426.359.235,00	81.660.348.888,53	105,47
Pendapatan Pajak Daerah	15.848.678.000,00	16.570.116.325,00	104,55
Hasil Retribusi Daerah	6.561.759.000,00	6.289.042.222,62	95,84
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.748.560.170,00	2.753.845.224,00	100,19
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.267.362.065,00	56.047.345.116,91	107,23
DANA PERIMBANGAN	501.549.833.653,00	503.736.332.803,00	100,44
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.826.403.653,00	18.012.902.803,00	113,82
Dana Alokasi Umum	449.242.430.000,00	449.242.430.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	36.481.000.000,00	36.481.000.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	116.797.455.960,00	118.872.504.658,04	101,78
Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.666.448.000,00	30.722.408.291,14	103,56
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	72.797.661.000,00	72.797.661.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.333.346.960,00	10.333.346.960,00	110,71

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Unaudited Dinas PPKAD Kota Palopo T.A.2014

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palopo Tahun 2014 seperti terlihat pada Tabel 3 di atas sebesar Rp.704.269.186.349,57 atau 101,22% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp .695.773.648.848,00, realisasi ini tidak termasuk realisasi yang bersumber dari perhitungan pihak ketiga.

a. Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi yang dapat dicapai selama Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.81.660.348.888,53 atau 105,47 % dari yang ditargetkan Rp.77.426.359.235,00. Realisasi ini terdiri dari :

- 1) Realisasi pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp.16.570.116.325,00 atau 104,55 %. Secara keseluruhan capaian yang didapat pada tahun 2014 melebihi dari target yang telah ditetapkan.
- 2) Realisasi pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah, sebesar Rp.6.289.042.222,62 atau 95,84 %. Realisasi retribusi yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan diakibatkan oleh adanya beberapa sumber penerimaan yang mengalami kendala dalam pelaksanaan pemungutannya.
- 3) Realisasi pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, mencapai Rp. 2.753.845.224,00 atau 100,19 %. Pencapaian ini melebihi terget yang telah ditentukan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah, terealisasi sebesar Rp 56.047.345.116,91 atau sebesar 107,23% dari target sebesar Rp 52.267.362.065,00. Hal ini disebabkan karena :
 - Pendapatan dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, Kelebihan realisasi Jasa Giro pemegang kas, Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan, pengembalian tuntutan ganti kerugian daerah dan penerimaan pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan dari pihak ketiga.

b. Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.503.736.332.803,00 atau 100,44 % dari target sebesar Rp.501.549.833.653,00. Realisasi ini bersumber dari:

- 1) Realisasi penerimaan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak mencapai Rp.18.012.902.803,00 atau terealisasi 113,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 15.826.403.653,00.
- 2) Realisasi penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp.449.242.430.000,00 atau terealisasi 100% dari target yang ditetapkan.
- 3) Realisasi penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp.39.243.130.000,00 atau terealisasi 100,00% dari target yang ditetapkan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp.118.872.504.658,04 atau 101,78% dari target sebesar Rp.116.797.455.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan yang bersumber dari dan Hibah Pemerintah sebesar Rp.5.000.000.000,00 atau terealisasi 100,00% dari target yang ditetapkan yang diperuntukkan bagi pembangunan prasarana air minum perkotaan melalui penyertaan modal Pemerintah Kota Palopo kepada PDAM.
- 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terealisasi sebesar Rp.30.722.408.291,14 atau 103,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.29.666.448.000,00
- 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terealisasi Rp.72.797.661.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan.
- 4) Realisasi penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi mencapai Rp.9.383.346.960,00 atau 111,93% dari target Rp.8.383.346.960,00
- 5) Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Kabupaten mencapai Rp.950.000.000,00 atau 100% dari target yang telah ditetapkan.

Secara terperinci, pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2014 di gambarkan dalam Tabel 4.berikut ini :

Tabel 4
Rincian Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palopo
Tahun Anggaran 2014

U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
PENDAPATAN	695.773.648.848,00	704.269.186.349,57	101,22
PENDAPATAN ASLI DAERAH	77.426.359.235,00	81.660.348.888,53	105,49
Pendapatan Pajak Daerah	15.848.678.000,00	16.570.116.325,00	104,55
Pajak Hotel	253.700.000,00	311.678.742,00	122,85
Pajak Restoran	2.000.000.000,00	2.480.067.662,00	124,00
Pajak Hiburan	250.000.000,00	334.491.700,00	133,80
Pajak Reklame	340.000.000,00	520.592.879,00	153,12
Pajak Penerangan Jalan	7.290.868.000,00	7.592.430.278,00	104,14
Pajak Parkir	285.000.000,00	313.398.150,00	109,96
Pajak Air Bawah Tanah	0,00	4.937.415,00	100,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	709.840.000,00	357.707.791,00	50,39
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.200.000.000,00	3.005.159.489,00	93,91
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.519.270.000,00	1.649.652.219,00	108,58
Hasil Retribusi Daerah	6.561.759.000,00	6.289.042.222,62	95,84
Retribusi Jasa Umum	3.623.799.000,00	3.444.033.500,00	95,04
Retribusi Jasa Usaha	1.076.360.000,00	1.197.987.420,00	111,30
Retribusi Perizinan Tertentu	1.861.600.000,00	1.647.021.302,62	88,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.748.560.170,00	2.753.845.224,00	100,19
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah	2.748.560.170,00	2.753.845.224,00	100,19
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.267.362.065,00	56.047.345.116,91	107,27
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	12.500.000,00	183.219.500,00	1.465,76
Penerimaan Jasa Giro	1.100.000.000,00	1.857.865.771,00	168,90
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	332.846.901,00	427.860.837,36	128,55
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	104.150.286,00	120.835.522,55	116,02
Pendapatan Dari Pengembalian	454.242.878,00	833.080.640,00	187,55
Pendapatan BLUD	46.432.000.000,00	48.706.743.846,00	104,90
Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional	3.831.622.000,00	3.917.739.000,00	102,25
DANA PERIMBANGAN	501.549.833.653,00	503.736.332.803,00	100,44
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.826.403.653,00	18.012.902.803,00	113,82
Bagi Hasil Pajak	11.460.660.302,00	14.607.988.576,00	127,46
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.365.743.351,00	3.404.914.227,00	77,99
Dana Alokasi Umum	449.242.430.000,00	449.242.430.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	36.481.000.000,00	36.481.000.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	116.797.455.960,00	118.872.504.658,04	101,78
Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.666.448.000,00	30.722.408.291,14	103,56
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	29.666.448.000,00	30.722.408.291,14	103,56
Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Provinsi	0,00	19.088.406,90	100,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	72.797.661.000,00	72.797.661.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.333.346.960,00	10.333.346.960,00	110,71

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Unauditted Dinas PPKAD Kota Palopo T.A.2014

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah sangat memberikan warna yang berbeda pada pengelolaan keuangan daerah, seperti penggantian ketentuan dasar yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni UU No. 34 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian dan/atau perubahan kembali terhadap kebijakan dan regulasi penunjang yang digunakan untuk melakukan pungutan sebagai pendapatan daerah karena terdapat beberapa kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan pendapatan daerah Kota Palopo T.A.2014.

Komposisi pengelolaan dan klasifikasi realisasi pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2014 dimana masih terdapat beberapa jenis Objek Pendapatan Daerah yang masih perlu dikelola secara intensif pada tahun-tahun yang akan datang, hal ini menandakan bahwa masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, kendala lainnya yaitu Produktivitas pemanfaatan asset / kekayaan daerah sebagai obyek Retribusi masih relatif rendah serta penyaluran realisasi penerimaan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat belum dilaksanakan tepat waktu.

b. Solusi

Sebagai solusi atas masalah tersebut di atas, kiranya yang perlu dilakukan antara lain :

- 1) Melakukan Inventarisasi dan Pendataan ulang tentang jenis dan objek Pendapatan Daerah sesuai Kewenangan Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 baik dalam bentuk urusan wajib, urusan pilihan, tugas pembantuan dan tugas Umum Pemerintahan.
- 2) Melakukan penyesuaian aturan, baik aturan dasar, aturan teknis maupun kebijakan umum yang mengatur pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai urusan-urusan yang dilimpahkan dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Palopo.
- 3) Untuk menunjang intensifikasi pengelolaan PAD segera dilakukan pemetaan, uji petik, dan pemutakhiran data potensi pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyesuaian dengan kondisi saat ini.
- 4) Mengoptimalkan beberapa jenis dan objek PAD melalui perbaikan administrasi, sistem dan prosedur pemungutan, penertiban aparat pengelola, pengendalian secara langsung serta peningkatan kualitas dan kemampuan aparat pengelola khusus pada DPPKAD Kota Palopo dan Unit Kerja terkait .
- 5) Satuan Kerja Perangkat daerah yang menjadi Koordinator dan Leading Sektor dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Palopo agar segera mengambil prakarsa, dan pro aktif dalam penanganan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Palopo, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada pelaporan / pertanggungjawaban dan pengawasannya.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Untuk itu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya mengisyaratkan susunan struktur belanja daerah dalam APBD Tahun

2014 dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka secara teknis struktur belanja daerah APBD Tahun 2014 dikelompokkan dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, hibah, Belanja Bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sementara pada Kelompok Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Selain itu, APBD sebagai instrumen kebijakan pemerintah daerah yang memiliki fungsi alokasi diharapkan dapat mendukung peningkatan dana investasi/belanja modal pada Tahun 2014, sehingga pengalokasian anggaran belanja dalam pelaksanaannya diarahkan untuk mendukung kegiatan operasional dan kegiatan yang diperlukan dalam menggerakkan roda pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi perekonomian daerah sehingga arah dan hasil pembangunan yang telah dicapai dalam mewujudkan Visi Kota Palopo secara bertahap dapat dilaksanakan dengan mengacu dan berpedoman pada distribusi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara optimal.

Upaya penghematan melalui penyediaan anggaran berdasarkan kebutuhan riil dan rasional selalu menjadi hal yang diprioritaskan, Meskipun terdapat peningkatan alokasi anggaran terhadap beberapa unit kerja namun tetap dilakukan secara terbatas dan selektif. Hal ini merupakan salah satu upaya optimal pemerintah dalam mengambil langkah antisipatif terhadap kebutuhan akan pelayanan publik yang

semakin hari semakin meningkat serta untuk menghasilkan program dan kegiatan sejalan dengan program dan kegiatan lima tahunan pemerintah Kota Palopo.

Sebagai tindak lanjut atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pengelompokan Belanja Daerah dibagi ke dalam bagian belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta bagian belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Target dan Ralisasi Belanja

Secara terperinci keadaan Target dan Realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5.
Daftar Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Palopo
Tahun Anggaran 2014

U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
BELANJA	694.859.878.696,00	648.463.765.621,49	93,32
BELANJA TIDAK LANGSUNG	370.056.344.151,00	359.429.802.077,49	97,13
Belanja Pegawai	355.277.148.350,00	346.068.475.052,00	97,41
Belanja Bunga	7.524.000.000,00	7.521.308.867,49	99,96
Belanja Hibah	5.151.786.000,00	4.844.630.000,00	94,04
Belanja Bantuan Sosial	950.000.000,00	448.675.000,00	47,23
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	653.409.801,00	546.713.158,00	83,67
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA LANGSUNG	324.803.534.545,00	289.033.963.544,00	88,99
Belanja Pegawai	54.247.304.724,00	49.006.529.545,00	90,34
Belanja Barang dan Jasa	165.024.445.653,00	143.604.264.679,00	87,02
Belanja Modal	105.531.784.168,00	96.423.169.320,00	91,37

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Unauditted Dinas PPKAD Kota Palopo T.A.2014

Menyangkut pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 ini, susunan belanja daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian realisasi sebagai berikut :

a. **Belanja Tidak Langsung** yang direncanakan sebesar Rp.370.056.344.151,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.359.429.802.077,49 atau 97,13 % dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **Belanja Pegawai** yang direncanakan sebesar Rp.355.277.148.350,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 346.068.475.052,00 atau 97,41%.
- 2) **Belanja Bunga** yang direncanakan sebesar Rp.7. 524.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.7.521.308.867,49 atau 99,96%, realisasi ini untuk pembayaran bunga pinjaman pemerintah Kota Palopo pada Bank Dunia melalui penerusan pinjaman SLA nomor 1215 tanggal 17 April tahun 2008.
- 3) **Belanja Hibah** yang direncanakan sebesar Rp.5.151.786.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.4.844.630.000,00 atau 94,04%. Capaian realisasi ini digunakan untuk pelaksanaan hibah kepada beberapa kegiatan organisasi kemasyarakatan, dalam rangka penunjang pelaksanaan pembangunan.
- 4) **Belanja Bantuan Sosial** yang direncanakan sebesar Rp.950.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.448.675.000,00 atau 47,23%. Capaian realisasi ini digunakan untuk pelaksanaan pendampingan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui PNPM mandiri dan bantuan sosial lainnya.
- 5) **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik** yang direncanakan sebesar Rp.653.409.801,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.546.713.158,00 atau 83,67%
- 6) **Belanja Tidak Terduga** yang direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 tidak direalisasikan karena tidak adanya kegiatan yang dapat dibiayai melalui belanja tak terduga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp.324.803.534.545,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.289.033.963.544,00 atau 88,99% dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **Belanja Pegawai** yang direncanakan sebesar Rp.54.247.304.724,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.49.006.529.545,00 atau 90,34%
- 2) **Belanja Barang dan Jasa** yang direncanakan sebesar Rp.165.024.445.653,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.143.604.264.679,00 atau 87,02%
- 3) **Belanja Modal** yang direncanakan sebesar Rp.105.531.784.168,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.96.423.169.320,00 atau 91,37%

Gambaran pengelolaan Belanja Daerah Kota Palopo menurut target dan realisasi berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola APBD T.A. 2014 seperti nampak pada Tabel 6.

Tabel 6
Target dan Realisasi Belanja SKPD Kota Palopo 2014

NO	SKPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI BELANJA			
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	%
1	DINAS PENDIDIKAN	235.985.155.510,00	190.573.430.886,00	28.338.237.906,00	218.911.668.792,00	92,77
2	DINAS KESEHATAN	43.871.747.450,00	24.557.878.777,00	17.460.544.565,00	42.018.423.342,00	95,78
3	BP. RSUD	79.202.602.160,00	20.943.360.910,00	49.614.664.979,00	75.696.104.584,00	89,09
4	DINAS PEKERAJAAN UMUM	29.946.588.240,00	2.138.112.821,00	25.263.153.184,00	27.401.266.005,00	91,50
5	KANTOR PEMADAM KEBAKARAN	4.035.533.600,00	1.167.041.555,00	2.702.067.605,00	3.869.109.160,00	95,88
6	DINAS TATA RUANG	16.435.275.940,00	2.674.259.158,00	10.863.964.317,00	13.538.223.475,00	82,37
7	BAPPEDA	7.214.748.300,00	2.691.771.681,00	4.146.412.465,00	6.838.184.146,00	94,78
8	DINAS PERHUBUNGAN	7.468.703.500,00	3.789.150.028,00	3.176.156.407,00	6.965.306.435,00	93,26
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	4.435.994.090,00	1.525.995.131,00	2.772.527.217,00	4.298.522.348,00	96,90
10	DINAS KEBERSIHAN	12.982.687.900,00	3.160.178.372,00	9.061.024.676,00	12.221.203.048,00	94,13
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	4.338.654.500,00	1.978.993.170,00	1.975.942.470,00	3.954.935.640,00	91,16
12	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA	5.433.131.800,00	2.631.796.748,00	2.782.715.744,00	5.414.512.492,00	99,66
13	DINAS KOPERASI	11.958.994.800,00	3.713.770.557,00	7.871.397.095,00	11.585.167.652,00	96,87
14	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH	2.672.287.055,00	1.346.221.199,00	1.279.879.318,00	2.626.100.517,00	98,27
15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.603.498.000,00	1.898.630.375,00	3.622.267.681,00	5.520.898.056,00	98,53
16	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.191.636.000,00	2.283.427.746,00	2.706.962.707,00	4.990.390.453,00	96,12
17	BADAN KESATUAN BANGSA	3.070.129.500,00	1.570.987.576,00	1.406.302.564,00	2.977.290.140,00	96,98
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.340.642.750,00	1.636.282.680,00	1.666.300.941,00	3.302.583.621,00	98,86
19	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	4.217.444.450,00	3.565.066.548,00	-	3.565.066.548,00	84,53
20	KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH	515.017.000,00	457.185.923,00	-	457.185.923,00	88,77
21	SEKRETARIAT DAERAH	50.489.196.950,00	9.165.647.400,00	37.171.527.422,00	46.337.174.822,00	91,78
22	SEKRETARIAT DPRD	12.871.757.700,00	2.151.588.769,00	10.179.894.501,00	12.331.483.270,00	95,80
23	INSPEKTORAT	5.696.035.700,00	3.231.951.396,00	2.283.918.709,00	5.515.870.105,00	96,84
24	DPPKAD	39.649.704.701,00	20.366.507.600,49	16.860.118.195,00	37.226.625.795,49	93,89
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.266.481.700,00	2.433.486.726,00	3.561.532.785,00	5.995.019.511,00	95,67
26	KANTOR PELAYANAN TERPADU	2.083.608.300,00	921.317.645,00	1.104.302.790,00	2.025.620.435,00	97,22
27	KECAMATAN WARU	3.569.627.300,00	2.765.768.100,00	809.201.688,00	3.574.969.788,00	100,15
28	KECAMATAN WARU UTARA	3.724.162.400,00	2.919.179.563,00	758.317.522,00	3.677.497.085,00	98,75
29	KECAMATAN WARU SELATAN	2.812.705.200,00	2.197.165.281,00	553.613.715,00	2.750.778.996,00	97,80
30	KECAMATAN TELLUWANUA	4.500.617.500,00	3.652.035.333,00	827.736.446,00	4.479.771.779,00	99,54
31	KECAMATAN WARU BARAT	3.119.551.200,00	2.408.416.792,00	658.160.000,00	3.066.576.792,00	98,30
32	KECAMATAN WARU TIMUR	4.280.814.100,00	3.341.565.075,00	902.426.978,00	4.243.992.053,00	99,14
33	KECAMATAN MUNGLAJANG	2.635.152.200,00	2.058.714.399,00	546.580.581,00	2.605.294.980,00	98,87
34	KECAMATAN BARA	3.697.993.600,00	2.900.232.306,00	696.996.124,00	3.597.228.430,00	97,28
35	KECAMATAN SENDANA	2.765.042.200,00	2.187.131.841,00	548.886.856,00	2.736.018.697,00	98,95
36	BADAN KETAHANAN PANGAN	8.060.050.400,00	6.702.106.519,00	1.353.627.589,00	8.055.734.108,00	99,95
37	BADAN PEMPERDAYAAN DAN KB	7.201.558.560,00	3.201.797.686,00	3.312.401.456,00	6.514.199.142,00	90,46
38	KANTOR PERPUSTAKAAN	1.729.039.000,00	852.781.327,00	837.424.437,00	1.690.205.764,00	97,75
39	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	17.399.358.260,00	3.102.047.051,00	13.906.093.569,00	17.008.140.620,00	97,75
40	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	4.122.210.000,00	2.280.803.181,00	1.895.342.085,00	4.176.145.266,00	101,31
41	DINAS PERTAMBANGAN	4.971.350.000,00	2.211.954.920,00	2.759.107.979,00	4.971.062.899,00	99,99
42	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3.701.387.900,00	1.587.132.164,00	2.042.448.553,00	3.629.580.717,00	98,06
43	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.592.001.280,00	2.486.929.162,00	8.753.691.723,00	11.240.620.885,00	96,97
	TOTAL	694.859.878.696,00	359.429.802.077,49	289.033.963.544,00	648.463.765.621,49	93,32

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Unaudited Dinas PPKAD Kota Palopo T.A.2014

Tabel 6. menunjukkan bahwa sesuai dengan kewenangan otonomi daerah Jumlah Unit Kerja (SKPD) yang mengelola Belanja Daerah Kota Palopo T.A. 2014 terdapat 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan realisasi Rp.648.463.765.621,49 atau 93,32% dari target Rp.694.859.878.696,00. Tingkat realisasi belanja setiap SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tingkat realisasi antara 85 – 100% sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) unit kerja dari 43 (Empat Puluh Tiga) unit kerja sebagaimana diuraikan di atas.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tingkat realisasi dibawah 85% yakni : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Tata Ruang, yang disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan penyerapan anggarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, permasalahan yang dihadapi secara umum meliputi :

- a) Kemampuan daya serap dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan tertentu relatif mengalami keterlambatan.
- b) Kemampuan Aparatur dalam mengabsorpsi dan mengadopsi berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang baru yang mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relatif terbatas.

b. Solusi

Dari identifikasi permasalahan yang timbul, maka alternatif solusi terhadap kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan SDM yang handal sebagai Tenaga Pengelola Keuangan Daerah Kota Palopo, utamanya Tenaga Teknis dan Operasional Pengelola melalui Diklat dan Pendidikan Teknis Keuangan lainnya.
- 2) Segera melakukan perubahan dan peninjauan terhadap dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen-dokumen perangkat aturan sebagai acuan kebijakan digunakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo.
- 3) Memperbaiki dan menyempurnakan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Arah Perubahan Undang –

Undang Paket Keuangan Negara serta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 4) Memantapkan Koordinasi, kerjasama dan pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari Penyusunan Naskah APBD, Pembahasan APBD, Penetapan APBD serta Penatausahaan APBD antar Unit Kerja Pengelola APBD dengan Tim Penyusun APBD serta Tim Anggaran Pemerintah Kota Palopo dengan Tim Anggaran DPRD Kota Palopo.
- 5) Tetap mempedomani Strategi Pembangunan Kota Palopo dan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Dalam Penatausahaan Keuangan Daerah agar kiranya dilakukan dengan tetap mempedomani sistem dan prosedur serta jadwal Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai jadwal Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai amanah PP No. 58 Tahun 2005, Permendari No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya (Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri nomor 21 Tahun 2011).

B. Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

1. Kebijakan Umum Pembiayaan daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutupi defisit anggaran dengan menggunakan asumsi awal Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2013. Disisi pengeluaran pembiayaan, kewajiban pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan penyertaan Modal Pemerintah Pada PDAM Kota Palopo dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan serta pembayaran utang jangka pendek Pemerintah Kota Palopo

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Khusus untuk penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi, serta Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. Sementara itu, pada sisi Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo, serta Pembayaran Hutang Belanja.

Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit APBD, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan dan strategi pembiayaan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kebijakan Umum Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2014 mencakup SILPA tahun anggaran sebelumnya. dan Penerimaan piutang daerah untuk tahun 2013.

b. Kebijakan Umum Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2014, secara kumulatif direncanakan untuk menambah nilai saham Pemerintah Kota Palopo pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan PDAM Kota Palopo. Untuk Tahun 2014 difokuskan pada penambahan Modal pemerintah daerah.

Sesuai dengan perubahan format dan struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu tidak lagi dianggap sebagai Pendapatan Daerah tetapi tetap dapat dimanfaatkan dalam tahun berikutnya sebagai salah satu sumber pembiayaan. Bagian Pembiayaan pada Tahun 2014 disusun terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah diharapkan pada Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya serta Penerimaan Piutang Daerah.

Tahun Anggaran 2014, jumlah surplus diharapkan menutupi kekurangan sumber pembiayaan netto sebagai hasil perhitungan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebagai dampak dari kebijakan penambahan modal pada beberapa Perusahaan daerah dan pembayaran pokok utang jangka pendek lainnya, Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Tahun 2014

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.592.387.947,00	10.799.534.811,27	93,16%
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10.998.289.543,00	10.734.534.811,27	97,60%
3 . 1 . 6	Penerimaan Piutang Daerah	594.098.404,00	65.000.000,00	10,94%
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12.506.158.099,00	11.912.059.693,86	95,25%
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.094.098.404,00	7.500.000.000,00	92,66%
3 . 2 . 5	Pembayaran Hutang Belanja	4.412.059.695,00	4.412.059.693,86	100,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	(913.770.152,00)	(1.112.524.882,59)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	54.692.895.845,49	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Unauditted Dinas PPKAD Kota Palopo tahun 2014.

Pada sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada Tahun 2014 dialokasikan Pembayaran Utang jangka pendek, Penyertaan modal pemerintah daerah yang direncanakan untuk menambah sejumlah modal pada Bank Sul-Sel sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dan PDAM Kota Palopo sebesar Rp.5.000.000.000,00 serta pembayaran pokok utang jangka pendek sebesar Rp.4.412.059.695,00 sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 12.506.158.099,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.912.059.693,86 atau 95,25%. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan hanya terealisasi sebesar Rp. 10.799.534.811,27, yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2013 sebesar Rp.10.734.534.811,27 dan penerimaan piutang daerah dari dana bergulir sebesar Rp.65.000.000,00 sehingga pembiayaan netto pada tahun 2014 defisit sebesar Rp 1.112.524.882,59 yang akan diutupi dari surplus APBD. Sedangkan

untuk sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun 2014 diperkirakan surplus sebesar Rp. 54.692.895.845,49.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2014 terdiri atas Urusan wajib dan Urusan Pilihan, urusan wajib sebanyak 25 jenis urusan dan urusan pilihan sebanyak 8 jenis urusan. Dalam penyelenggaraannya secara langsung dilaksanakan oleh 31 Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, 9 Kecamatan.

Dalam rangka penyusunan LKPJ Walikota Palopo berdasarkan Lampiran III Format Penyusunan LKPJ dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, gambaran tentang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2014 pada masing-masing Kelompok Urusan, Jenis Urusan, Program dan Kegiatan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakannya dapat digambarkan sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Wajib Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Kantor Perpustakaan/Kersipan Kota Palopo.

1.1. Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palopo dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini.
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan Gedung Sekolah.
 - b. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa.
 - c. Pelatihan penyusunan kurikulum.
 - d. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa.
 - e. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar.
 - f. Pelaksanaan Pendidikan Gratis.
- 3) Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan Gedung Sekolah.
 - b. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan kelengkapannya.

- c. Pengadaan meubilier sekolah.
 - d. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
 - e. Penyebarluasan dan sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah.
 - f. Pelaksanaan pendidikan gratis.
 - g. Pelaksanaan ujian Akhir sekolah.
- 4) Program pendidikan Non Formal, dengan kegiatan :
- a. Pemberdayaan Tenaga Pendidik non-formal.
 - b. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan non formal.
 - c. Pembinaan Pendidikan Kursus dan kelembagaan.
 - d. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan.
 - e. Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal.
- 5) Program peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan :
- a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik.
 - b. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi.
 - c. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Pendidik.
 - d. Pengembangan system perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan kegiatan :
- a. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan.
 - b. Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan.
 - c. Pembinaan Dewan Pendidikan.
 - d. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan.
 - e. Penyelenggaraan pelatihan seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan.
 - f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dak Bidang Pendidikan,

dengan kegiatan :

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana SD.
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana SMP.
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100,000,000- realisasi keuangan Rp.100,000,000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengembangan pendidikan anak usia dini.
- b. Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini, dengan jumlah anggaran Rp.19,919,000.- realisasi keuangan Rp.17,235,900.- (86.53%), realisasi fisik (87.00%), sasaran kegiatan adalah operasional pada sekolah dalam pengelolaan pendidikan anak usia 4-6 tahun di taman kanak-kanak.

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, terdiri atas 6 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Pembangunan Gedung Sekolah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.345.169.900,- realisasi keuangan Rp.1.327.349.100,- (98,68%), realisasi fisik (99.00%), sasaran kegiatan adalah pembangunan prasarana sekolah dalam menampung peserta didik usia 7-15 tahun.
- b. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 145.000.000,- realisasi keuangan Rp.97.990.000,- (67,58%), realisasi fisik (68%), sasaran kegiatan adalah pengadaan buku pada sekolah demi kelancaran proses belajar mengajar.
- c. Pelatihan penyusunan kurikulum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 148.915.000,- realisasi keuangan Rp. 114.725.000,- (77,04%), realisasi fisik (78%), sasaran kegiatan adalah pelatihan penyusunan kurikulum dalam peningkatan kompetensi pendidikan dalam penyusunan kurikulum.
- d. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 247.835.150,- realisasi keuangan Rp.191.269.650,- (77,18%), realisasi fisik (77%), sasaran kegiatan adalah siswa SD dalam mengikuti olimpiade MIPA, lomba Olahraga dan siswa teladan tingkat provinsi.

- e. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 54.500.000,- realisasi keuangan Rp. 42.373.500,- (77,75%), realisasi fisik (78%), sasaran kegiatan adalah sekolah dasar yang terakreditasi.
 - f. Pelaksanaan Pendidikan gratis dengan jumlah anggaran sebesar Rp.320.905.500,- realisasi keuangan Rp. 149.828.000,- (46,69%), realisasi fisik (47%), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan pendidikan gratis tingkat pendidikan dasar 9 tahun.
- 3) Program Pendidikan Menengah, terdiri atas 7 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pembangunan Gedung Sekolah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.043.500.000,- realisasi keuangan Rp.949.628.800,- (91,00%), realisasi fisik (91%), sasaran kegiatan adalah Pembangunan prasarana gedung sekolah untuk menampung peserta didik usia 16-18 tahun.
 - b. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan kelengkapannya, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.26.000.000,- realisasi keuangan Rp.26.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan kelengkapannya demi peningkatan pengelolaan mutu di sekolah pendidikan menengah.
 - c. Pengadaan meubilier sekolah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi keuangan Rp.24.836.000,- (99,34%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengadaan meubilier sekolah.
 - d. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dengan jumlah

anggaran sebesar Rp.3.000.000,- realisasi keuangan Rp.3.000.000,- realisasi fisik (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu (miskin).

- e. Penyebarluasan dan sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi keuangan Rp. 27.132.700,- (90,44%), realisasi fisik (91%), sasaran kegiatan adalah penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah.
 - f. Pelaksanaan pendidikan gratis, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.99.265.000,- realisasi keuangan Rp.82.500.000,- (83,11%) realisasi fisik (84%), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan pendidikan gratis, terbayarnya pelaksanaan pendidikan gratis tingkat sekolah menengah.
 - g. Pelaksanaan ujian Akhir sekolah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.29.570.000,- realisasi keuangan Rp.28.970.000,- (97,97%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan ujian akhir tahun pada semua jenjang pendidikan menengah.
- 4) Program pendidikan Non Formal, terdiri atas 5 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pemberdayaan Tenaga Pendidik non-formal, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.22.838.000,- realisasi keuangan Rp.22.695.500,- (99,38%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah jambore demi peningkatan kompetensi tenaga pendidik non formal.
 - b. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan non formal, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.124.500.000,- realisasi keuangan Rp.106.718.485,- (85,72%), realisasi fisik (86%), sasaran kegiatan adalah operasional sanggar kegiatan belajar (SKB) dalam peningkatan layanan PKBM terhadap masyarakat yang tidak tertampung di pendidikan non formal.

- c. Pembinaan Pendidikan Kursus dan kelembagaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.26.675.000,- realisasi keuangan Rp.26.675.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pembinaan kelembagaan pendidikan non formal untuk mendidik lembaga PNF.
 - d. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.59.225.000,- realisasi keuangan Rp.58.866.000,- (99,39%), realisasi fisik (99%), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan pemberantasan buta huruf demi untuk perkembangan kemampuan baca tulis masyarakat usia dewasa.
 - e. Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.31.182.500,- realisasi keuangan Rp.31.182.500,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah melaksanakan kelompok belajar usaha, tersedianya data dan informasi pendidikan non formal.
- 5) Program peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.74.233.100,- realisasi keuangan Rp.70.277.800,- (94,67%), realisasi fisik (95%), sasaran kegiatan adalah sertifikasi pendidik dan penyusunan PAK dalam peningkatan kompetensi pedagogik sosial dan kepribadian guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
 - b. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.203.720.000,- realisasi keuangan Rp.93.445.000,- (45,87%), realisasi fisik (46%), sasaran kegiatan adalah dipergunakan untuk pelatihan bagi pendidik dalam memenuhi standar kompetensi.
 - c. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Pendidik, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.96.810.000,- realisasi keuangan Rp.80.288.900,- (82,93%) ,

realisasi fisik (83%), sasaran kegiatan adalah peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik untuk perkembangan mutu kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

- d. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.17.400.000,- realisasi keuangan Rp.17.375.000,- (99.86%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik dalam perkembangan sistem perencanaan dan pengendalian program pendidikan dan tenaga kependidikan.
- 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri atas 6 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.115.360.000,- realisasi keuangan Rp.114.400.000,- (99,17%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan PSB, LKS SMK, FLS2N SMP/SMA, siswa kreatif, O2SN SMP, SMA, OSN SMP/SMA dalam pencapaian evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan.
 - b. Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.399.100.000,- realisasi keuangan Rp.1.350.344.800,- (96,52%), realisasi fisik (100%), dipergunakan untuk pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan serta terpenuhinya kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan.
 - c. Pembinaan Dewan Pendidikan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.61.600.000,- realisasi keuangan Rp.57.087.000,- (92,67%), realisasi fisik (93%), sasaran kegiatan adalah pembentukan pengurus dewan pendidikan dalam meningkatkan pengawasan dewan pendidikan terhadap pembangunan pendidikan di Kota

Palopo.

- d. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 60.860.000,- realisasi keuangan Rp.47.482.286,- (78,02%), realisasi fisik (79%), sasaran kegiatan adalah penyediaan sistem dan informasi manajemen pendidikan untuk kualitas penerapan sistem dan informasi manajemen.
 - e. Penyelenggaraan pelatihan seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 36.850.000,- realisasi keuangan Rp. 16.705.500,- (45,33%), realisasi fisik (45%), sasaran kegiatan adalah penyelenggaraan pelatihan seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan serta tersedianya bahan seminar dan karya ilmiah tentang berbagai isu pendidikan.
 - f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.291.057.000,- realisasi keuangan Rp.268.522.100,- (92,26%), realisasi fisik (92%), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan monitoring pengawas dan penilik serta meningkatnya pengawasan internal dinas pendidikan.
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dak Bidang Pendidikan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana SD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.142.048.200,- realisasi keuangan Rp.3.287.795.950,- (79,38%), realisasi fisik (80%), sasaran kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasarana SD.
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana SMP, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.113.557.800,- realisasi keuangan Rp.2.611.989.285,- (83,89%), realisasi fisik (84%), sasaran kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasarana SMP.
 - c. Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.372.043.240,- realisasi keuangan Rp.1.802.383.880,-

(75,98%), realisasi fisik (76 %), sasaran kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasarana SMA.

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana SMK, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.946.857.400,- realisasi keuangan Rp.1.834.169.350,- (62,24%), realisasi fisik (63%), sasaran kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasarana SMK.

8. Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pendidikan gratis, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.17.680.699.900,- realisasi keuangan Rp.11.591.753.604,- (65,56%), realisasi fisik (66%), sasaran kegiatan adalah penyelenggaraan pendidikan gratis tingkat SD, SMP, SMA dan SMK.

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Pelaksanaan pendidikan gratis Kota Palopo Tahun 2014 dengan jumlah anggaran Rp.17.680.699.900,- dengan realisasi keuangan Rp.11.591.753.604,- (66%), hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain :
 - a. Adanya perubahan mekanisme penyaluran dana gratis yang pada tahun 2013 menggunakan mekanisme TU, dimana dana pendidikan gratis disalurkan ke sekolah per triwulan, sedangkan pada tahun 2014 menggunakan mekanisme GU, dimana mekanisme ini merupakan hal yang baru bagi sekolah sehingga memerlukan waktu dan proses bagi sekolah untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan mekanisme pencairan dana tersebut.
 - b. Adanya perubahan peraturan gubernur Sulawesi Selatan tentang pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis, dimana pada proses perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pendidikan gratis pada awalnya mengacu pada peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 yang disosialisasikan pada tanggal 24 Juni 2014. Salah satu perubahan mendasar dalam peraturan tersebut adalah pada peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012,

pembayaran insentif jam mengajar bagi guru dibayar sesuai dengan jumlah keseluruhan jam mengajarnya, sedangkan dalam peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014, insentif jam mengajar bagi guru dibayar sesuai kelebihan jam mengajar, sehingga dana yang dialokasikan untuk membayar insentif jam mengajar bagi guru tidak dapat terealisasi seluruhnya.

- 2) Program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan kegiatan Pelaksanaan pendidikan gratis, dengan jumlah anggaran Rp.320.905.500,- realisasi keuangan Rp. 149.828.000 (47%), realisasi fisik (47%), dipergunakan untuk sekolah terbanyaknya pelaksanaan pendidikan gratis tingkat pendidikan dasar 9 tahun, Kendala yang dihadapi adalah terjadinya beberapa kali pergantian pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pengelolah kegiatan tersebut dikarenakan pergeseran jabatan sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

1.2. Kantor Perpustakaan Daerah

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Daerah Kota Palopo, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.
- 2) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, dengan kegiatan :
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah.
- 3) Program peningkatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan, dengan kegiatan :
 - a. Sosialisasi/penyusunan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 232.191.500,- realisasi keuangan Rp. 231.951.500,- (99.90%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah terciptanya minat baca masyarakat.
- 2) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 9.926.000,- realisasi keuangan Rp. 9.926.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah.
- 3) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi , terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/ swasta dengan jumlah anggaran Rp. 18.675.000,- realisasi keuangan Rp. 18.675.000,- (100%), realisasi fisik (100%), melalui terlaksananya penyediaan sarana informasi arsip.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan, yang melaksanakan Dinas Kesehatan dan Badan Rumah Sakit Umum Daerah.

2.1. Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan kegiatan :
 - b. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
 - c. Peningkatan Pemerataan obat dan Perbekalan Kesehatan.
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :
 - a. Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan.
 - b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat.
 - c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana.
 - d. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan.
 - e. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan.
 - f. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan.

- 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
 - b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
 - b. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat.
 - c. Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan.
 - d. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan.
- 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi.
 - b. Pemberian tambahan makanan dan vitamin.
 - c. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan kegiatan :
 - a. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat.
- 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan kegiatan :
 - a. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk.
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
 - c. Peningkatan Imunisasi.
 - d. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah.
- 8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan.
 - b. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan.
 - c. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan.
 - d. Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan.
- 9) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dengan kegiatan:
 - a. Pembangunan Puskesmas.

- b. Pembangunan Puskesmas Pembantu.
 - c. Pembangunan Posyandu.
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas.
- 10) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, dengan kegiatan:
- a. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat.
 - b. Pelayanan Kesehatan Gratis.
- 11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, dengan kegiatan:
- a. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita.
- 12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dengan kegiatan
- a. Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 13) Program Peningkatan Kesehatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan kegiatan :
- a. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang, dengan kegiatan:
- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Farmasi

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.181.550.000,- realisasi keuangan Rp. 181.550.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pendistribusian obat-obatan.
 - b. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.600.000,- realisasi keuangan

Rp.18.600.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pendistribusian obat-obatan dan perbekalan kesehatan disarana pelayanan kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri atas 6 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.213.259.228,- realisasi keuangan Rp.3.985.981.100,- (94,61%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.72.620.000,- realisasi keuangan Rp.72.620.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah biaya mengikuti pertemuan untuk pengetahuan dalam pengolahan data SP2TP puskesmas.
- c. Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.880.000,- realisasi keuangan Rp. 0,- (0%), realisasi fisik (0%).
- d. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.20.020.000,- realisasi keuangan Rp.20.020.000 (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penanggulangan masalah kesehatan.
- e. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.112.040.000,- realisasi keuangan Rp.1.090.718.821,- (51,64%), realisasi fisik (52%), sasaran kegiatan adalah biaya operasional dan pemeliharaan bagi peningkatan kinerja puskesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
- f. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.235.000.000,- realisasi keuangan Rp.233.488.800,-

(99,36%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pertemuan konsil dan satgas kota sehat dalam rangka persiapan penilaian kota sehat.

- 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp.28.627.500,- realisasi keuangan Rp.28.078.750,- (98,08%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.165.000,- realisasi keuangan Rp.5.370.000,- (87,10%), realisasi fisik (87%), sasaran kegiatan adalah melakukan pemantauan atau pengawasan obat dan makanan.
- 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.66.250.000,- realisasi keuangan Rp.66.255.000,- (99,96%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyediaan media sarana dan promosi kesehatan kepada masyarakat tentang kesehatan.
 - b. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.296.600.000,- realisasi Rp.296.600.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyuluhan kader dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran hidup sehat masyarakat serta memberikan motivasi dan pembinaan kesehatan di institusi pendidikan.
 - c. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan, dengan jumlah anggaran Rp.17.260.000,- realisasi keuangan Rp.14.830.000,-

(85,92%), realisasi fisik (86%), sasaran kegiatan adalah peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dalam meningkatnya keterampilan kader lansia.

- d. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan, dengan jumlah anggaran Rp.16.940.000,- realisasi keuangan Rp.16.940.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah Pembayaran tenaga penyuluh.
- 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.300.000,- realisasi keuangan Rp.3.300.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyediaan peta informasi terkait masyarakat kurang gizi secara dini.
 - b. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.38.010.000,- realisasi keuangan Rp.37.992.231,- (99,95%), realisasi (100%), sasaran kegiatan adalah penyediaan makanan tambahan dan vitamin kepada masyarakat serta terdeteksinya balita kurang gizi secara dini.
 - c. Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.125.000,- realisasi keuangan Rp.6.125.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi serta pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang keluarga sadar gizi
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.110.000,- realisasi keuangan Rp.4.110.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah melaksanakan monitoring demi untuk peningkatan cakupan dan efektifitas program gizi masyarakat.
- 6) Pengembangan Lingkungan Sehat, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi

sebagai berikut :

- a. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan jumlah anggaran Rp.125.474.500,- realisasi keuangan Rp.124.589.700,- (99.29%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengembangan lingkungan sehat untuk cakupan TTU dan TPM terpeliharanya higiyene sanitasi DAMIU.
- 7) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.321.460.000,- realisasi keuangan Rp.231.434.500,- (71.99%), realisasi fisik (72%), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan fogging.
 - b. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.22.435.000,- realisasi keuangan Rp.22.435.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
 - c. Peningkatan Imunisasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.31.220.000,- realisasi keuangan Rp.28.510.000,- (91,32%), realisasi fisik (92%), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan peningkatan imunisasi serta meningkatnya cakupan program imunisasi dan tercapainya cakupan kelurahan.
 - d. Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.19.850.000,- realisasi keuangan Rp.17.060.000,- (85,94%), realisasi fisik (86%), sasaran kegiatan adalah survey wabah penyakit flu burung.
- 8) Program Standarisasi pelayanan kesehatan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.43,550,000,- realisasi keuangan Rp.0,- (0%).

- b. Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan, dengan jumlah anggaran Rp.30.280.000,- realisasi keuangan Rp.30.280.000,-(100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penilaian angka kredit pegawai jabatan fungsional tentang pelayanan kesehatan.
 - c. Pembangunan dan Pemutakhiran Data dasar standar pelayanan kesehatan, dengan jumlah anggaran Rp.65.200.000,- realisasi keuangan Rp.64.700.000,- (99,23%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan dan tersedianya profil kesehatan kota palopo.
 - d. Penyusunan Standar Analisis belanja pelayanan kesehatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.13.850.000,- realisasi keuangan Rp.13.850.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyusunan RKA dan LAKIP dinas kesehatan.
- 9) Program Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pembangunan Puskesmas , dengan jumlah anggaran sebesar Rp.391.500.000,- realisasi keuangan Rp.379.928.875,- (97,04%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pembangunan puskesmas dan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan.
 - b. Pembangunan Puskesmas Pembantu, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.167.000.000,- realisasi keuangan Rp.165.151.500,- (98,89%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pembangunan puskesmas pembantu serta meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan.
 - c. Pembangunan Posyandu, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.48.600.000,- realisasi keuangan Rp.48.550.000,- (99,90%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pembangunan

posyandu dalam peningkatan mutu kualitas pelayanan kesehatan.

- d. Pengadaan sarana & prasarana puskesmas, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.153.050.000,- realisasi keuangan Rp.152.670.000,- (99,75%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengadaan alat-alat kedokteran umum, konstruksi jaringan air, telepon, listrik dan konstruksi gedung serta peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas.

10) Program Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.47.320.000,- realisasi keuangan Rp.45.280.000,- (95,69%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan cakupan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. Pelayanan Kesehatan Gratis, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.651.600.500,- realisasi keuangan Rp.4.559.161.500,- (98,01%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pelayanan kesehatan gratis serta pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.

11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.28.780.000,- realisasi keuangan Rp.28.620.000,- (99,44%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita.

12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan, dengan jumlah anggaran Rp.27.400.000,- realisasi keuangan Rp.27.400.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pendidikan

dan pelatihan perawatan kesehatan.

- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran Rp.2.940.000,- realisasi keuangan Rp.2.940.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah monitoring, evaluasi dan pelaporan, meningkatnya cakupan program pelayanan kesehatan lansia.
- 13) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu, dengan jumlah anggaran Rp.42.480.000,- realisasi keuangan Rp.29.600.000,- (69,68%), realisasi fisik (70%), sasaran kegiatan adalah penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran Rp.2.940.000,- dengan realisasi keuangan Rp.2.940.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah monitoring, evaluasi dan pelaporan, cakupan pelayanan ibu hamil.
- 14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.777.778.760,- realisasi keuangan Rp.2.747.699.370,- (98,92%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar.
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Farmasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.586.137.000,- realisasi keuangan Rp.1.582.096.430,- (99,75%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasarana pelayanan farmasi peningkatan mutu dan kualitas sarana pelayanan farmasi.

2.2. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan, dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan Rumah Sakit.
 - b. Pelayanan Kesehatan Gratis.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :
 - a. Penyedia sarana dan prasarana pelayanan rujukan.
 - b. Pelayanan BLUD RSUD.

b. Realisasi Pelaksanaan Perogram dan kegiatan

- 1) Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Rumah Sakit, dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.126.005.000,- realisasi keuangan Rp.705.339.500 (62,64), dengan realisasi fisik (63%), sasaran kegiatan adalah meningkatnya sarana tipe rumah sakit C menjadi tipe B.
 - b. Pelayanan Kesehatan Gratis, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.800.000.000,- realisasi keuangan Rp.7.732.465.209,- (87.87%), dengan realisasi fisik (88%), sasaran kegiatan adalah terlaksananya kesehatan gratis paripurna.
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp1,595,537,660,- realisasi keuangan Rp.836.789.940,- (52,45%), dengan realisasi fisik (53%), sasaran kegiatan adalah terlaksananya pelayanan rujukan Rumah sakit.

- b. Pelayanan BLUD RSUD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.46,432,000,000 ,- realisasi keuangan Rp.40.088.856.773,- (86,34%), dengan realisasi fisik (87%), sasaran kegiatan adalah meningkatnya honorarium bagi tenaga kontrak BLUD.

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana, dengan jumlah anggaran Rp. 5.880.000,- realisasi keuangan Rp.0,- (0%), dengan permasalahannya adalah karena tidak ada bencana alam pada tahun 2014.
- 2) Penyusunan standar pelayanan kesehatan terdiri dari 2 kegiatan yaitu Jasa surveilance pelaksanaan ISO gooi-2008 puskesmas wara Rp.20.000.000,- dan Pertemuan sosialisasi persiapan BLU puskesmas Rp.23.550.000,- dengan permasalahan kedua hal tersebut tidak dilaksanakan karena berdasarkan program dari kementerian kesehatan bahwa pada tahun 2016-2019 diharapkan semua puskesmas sudah terekreditasi maka untuk menghindari pemborosan anggaran, maka kegiatan pelaksanaan ISO 9001-2008 tidak dilaksanakan (status puskesmas terakreditasi lebih tinggi dibandingkan status ISO pada puskesmas) dan untuk sosialisasi BLU Puskesmas dengan diberlakukannya program JKN pada puskesmas sesuai dengan perpres 32 tahun 2014 dan permenkes 19 tahun2014 tentang pengelolaan dana JKN di puskesmas dimana di jelaskan bahwa dana kapitasi langsung masuk ke rekening FKTP (puskesmas) dan di gunakan langsung oleh puskesmas (untuk jasa pelayanan dan operasiaonal puskesmas) maka berdasarkan hal tersebut dan untuk menghindari pemborosan anggaran kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Urusan Wajib Pekerjaan Umum, diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan Jalan.
 - b. Pembangunan Jembatan.
- 2) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.
- 3) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan:
 - a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan.

- 4) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan dengan kegiatan:
 - a. Inspeksi Kondisi Jalan.
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan Gedung Workshop.
 - b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat.
 - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat.
- 6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pantai, dengan kegiatan :
 - a. Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
- 7) Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan :
 - a. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
 - b. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
- 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Irigasi

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Jalan : kegiatan pembangunan jalan, yang dilaksanakan seluruhnya berjumlah 70 paket kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.493.772.500,- realisasi keuangan Rp.7.493.772.500,- (100 %), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Pembangunan rabat beton di 47 lokasi.
 - Pengkerikilan jalan 16 lokasi.
 - Perintisan jalan 4 lokasi.
 - Pembangunan Jalan 1 lokasi.
 - Rehabilitasi jalan setapak 1 lokasi.

- Pemasangan pavinblok 1 lokasi.
 - Penimbunan badan jalan 1 lokasi.
 - pembangunan talud jalan 9 lokasi.
- b. Pembangunan Jembatan : kegiatan pembangunan jembatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.574.577.000,- realisasi keuangan Rp. 1.574.255.400,- (99,98 %), realisasi fisik (100 %), adapun kegiatan tersebut terdiri atas :
- Pembangunan jembatan 6 unit lokasi.
 - Rehabilitasi jembatan 1 unit lokasi.
 - Pembangunan plat duecker 11 unit lokasi.
 - Rehabilitasi plat duecker 1 unit lokasi.
- 2) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, terdiri atas 1 kegiatan yaitu kegiatan pembangunan Turap/Talud/ Bronjong, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.449.910.200,- realisasi keuangan Rp.3.448.254.700,- (99,95 %), realisasi fisik (100 %), adapun kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembangunan Talud 14 lokasi.
 - b. Peninggian Talud 2 lokasi.
 - c. Pengerukan dan rehabilitasi talud 4 lokasi.
 - d. Rehabilitasi tanggul 1 lokasi.
 - e. Pembangunan bronjong 10 lokasi.
- 3) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri atas 1 kegiatan yaitu rehabilitasi / pemeliharaan jalan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. 50.000.000,- (100 %), realisasi fisik (100 %), adapun kegiatan tersebut adalah Pelaksanaan pemeliharaan ringan jalan yang tersebar di Kota Palopo 1 paket.
- 4) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan terdiri atas 1 kegiatan yakni kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.25.079.000,- realisasi keuangan Rp. 25.079.000,- (100 %), realisasi fisik (100 %), adapun kegiatan tersebut adalah terlaksananya inspeksi kondisi jalan dan jembatan di Kota Palopo tahun 2014.

- 5). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, terdiri atas 3 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 336.250.000,- realisasi keuangan Rp. 336.141.580 (99,98 %), realisasi fisik (100%), adapun kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Gedung Workshop 1 unit.
 - b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat berat 1 paket.
 - c. Rehabilitasi alat berat 1 paket.
- 6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pantai, melalui kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 124.250.000,- realisasi keuangan Rp.54.217.000,- (43%), realisasi fisik (43 %), kegiatan ini terdiri atas Pembangunan jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 2 lokasi.
- 7). Program Pengendalian Banjir, terdiri atas 2 kegiatandan realisasi sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai dengan jumlah anggaran Rp. 68.250.000,- realisasi keuangan Rp.0,- (0 %), realisasi fisik (0 %).
 - b. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.831.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.829.445.000,- (99,9 %), realisasi fisik (100 %), kegiatan ini terdiri atas 13 paket yang tersebar diberbagai lokasi.
- 8). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.565.680.560,- realisasi keuangan Rp. 7.255.852.973,- (75,85 %), realisasi fisik (76%), dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Pengaspalan jalan 6 lokasi.
 - pengaspalan / lapis ulang 4 lokasi.
 - pelebaran jalan 1 lokasi.
 - pengekrikilan jalan 1 lokasi.
 - pembangunan talud jalan 1 lokasi.

- pembangunan jembatan 2 unit.
 - pembangunan plat duecker 2 lokasi.
 - pemasangan bronjong pondasi jembatan 1 lokasi.
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Irigasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.116.642.340,- realisasi keuangan Rp.2.115.068.000,- (99,93 %), realisasi fisik (100%), yang terdiri atas kegiatan Rehabilitasi Bendungan 1 lokasi, Peningkatan saluran sekunder 12 lokasi.

c. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum, dengan tingkat ralisasi keuangan sebesar 43% dan realisasi fisik 50% hal ini disebabkan oleh kendala teknis mengenai lahan dan faktor alam, selanjutnya kegiatan pemeliharaan bronjong tidak direalisasikan oleh karena telah dilaksanakan secara gotong royong oleh warga masyarakat pada lokasi tersebut.

4. Urusan Perumahan :

Klasifikasi terhadap Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah yang diidentifikasi sebagai SKPD yang menyelenggarakan Urusan Perumahan adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, Kantor Pemadam Kebakaran, dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

4.1. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pembangunan Perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitas dan stimulasi Pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama masyarakat miskin.
- 3) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong..

- b. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.
 - c. Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong-gorong.
- 4) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan :
- a. Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Pemukiman berbasis Masyarakat.
- 5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembangunan Jaringan air Bersih / air minum.
- 6) Program Peningkatan Sarana dan prasaran DAK Bidang Infrastruktur Air minum dan sanitasi, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan sarana dan Prasarana Insfrastruktur air Minum.
 - b. Penyediaan sarana dan Prasarana Insfrastruktur Sanitasi.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Pembangunan Perumahan dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Fasilitas dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 86.600.000,- realisasi keuangan Rp. 52.700.000,- (61,00%), realisasi fisik (61%), sasaran kegiatan adalah berupa fasilitasi program bedah rumah bagi keluarga berpenghasilan rendah / tidak mampu sebanyak 400 unit rumah.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 116.000.000,- realisasi keuangan Rp. 115.600.000,- (99,90 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah berupa hasil pendataan perumahan dan permukiman Kota Palopo.
- 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama masyarakat miskin, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.33.209.600,- realisasi keuangan Rp. 0,- (0 %) realisasi fisik (0 %).
- 3) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, dengan kegiatan :

- a. Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.135.012.600,- realisasi keuangan Rp.5.131.666.300,- (99,93 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah antara lain berupa :
 - Pembangunan drainase sebanyak 67 unit paket/lokasi yang tersebar di 9 Kecamatan 48 Kelurahan.
 - c. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 55.200.000,- realisasi keuangan Rp. 55.200.000,- (100 %), realisasi fisik (100%).
 - d. Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong-gorong , dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 613.007.000,- realisasi keuangan Rp.605.342.140,- (98,75 %), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan berupa pengerukan dan rehabilitasi drainase di 6 titik lokasi.
- 4) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan kegiatan :
- a. Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Pemukiman berbasis Masyarakat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.220.900.000,- realisasi keuangan Rp. 220.292.800,- (99,73%), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan antara lain berupa :
 - Kegiatan fasilitasi pendampingan atas program PNPM mandiri perkotaan.
 - Biaya konstruksi bangunan pintu gerbang 1 unit.
 - Biaya pembangunan pagar (penggantian atas pembangunan jalan).
- 5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembangunan Jaringan air Bersih / air minum, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 42.400.000,- realisasi keuangan Rp.40.000.000,- (99,9 %), realisasi fisik (100 %) dengan kegiatan berupa :
 - Pembangunan penangkap mata air dan bak penampung 1 unit.

- Perbaiki atas pipa air di Kel.Peta.
- 6) Program Peningkatan Sarana dan prasaran DAK Bidang Infrastruktur Air minum dan sanitasi dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan sarana dan Prasarana Insfrastruktur air Minum, dengan jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.206.485.280,- realisasi keuangan Rp.1.176.375.000,- (97,50 %), realisasi fisik (100 %) dengan kegiatan berupa :
 - Pembangunan jaringan air bersih di 6 lokasi / Kecamatan.
 - b. Penyediaan sarana dan Prasarana Insfrastruktur Sanitasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.986.123.160,- realisasi keuangan Rp. 985.989.131,- (99,98 %), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan berupa pembangunan MCK dan SR di 3 Lokasi / Kecamatan.

4.2. Kantor Pemadam Kebakaran

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran.
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional / Dinas.
 - d. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya kebakaran.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1). Program Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.80.690.000,- realisasi keuangan Rp.80.690.000,- (100 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah sosialisasi/demonstrasi/ penyuluhan pencegahan pemadam kebakaran di 9 Kecamatan.
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.260.470.000,- realisasi keuangan Rp.260.470.000,- (100 %), realisasi fisik (100%), dengan

kegiatan antara lain berupa pengadaan paket-paket alat untuk pemadam kebakaran.

- c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional / Dinas dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 188.655.000,- realisasi keuangan Rp.186.822.500,- (99%), realisasi fisik (100%).
- d. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya kebakaran, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.340.080.100,- realisasi keuangan Rp.1.311.182.040,- (99,90 %), realisasi fisik (100%), dengan kegiatan berupa operasionalisasi terhadap tim petugas pemadam kebakaran.

5. Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang, diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, terdiri atas program, kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana tata ruang wilayah.
 - b. Penyusunan rencana detail tata ruang Kawasan.
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 2) Program Pemanfaatan Tata Ruang dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi kebijakan, norma, standarisasi prosedur dan manual pemanfaatan ruang.
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang.
 - c. Pengendalian kebijakan perizinan pemanfaatan ruang.
- 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengawasan pemanfataan Ruang.
- 4) Program Pengembangan Wilayah strategi dan cepat Tumbuh dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Rencana Pengembangan Infrastruktur.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana tata ruang wilayah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi keuangan Rp.99.800.000,- (66,53 %), realisasi fisik (67 %), adapun kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :
 - DED Gerbang Kota Palopo 1 Paket.
 - DED Monumen Payung Luwu 1 Paket.
 - DED Pedestrian dan Trotoar 1 Paket.
 - b. Penyusunan rencana detail tata ruang Kawasan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.721.000.000,- realisasi keuangan Rp.96.500.000.000,- (13,38 %), realisasi fisik (14%), adapun kegiatan yang direncanakan antara lain berupa :
 - Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 4 Unit (RDTR PPK, Sub.PPK I, Kawasan Kebudayaan dan Rencana Aksi P2KH).
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 116.000.000,- realisasi keuangan Rp. 115.600.000,- (99,8 %), realisasi fisik (100 %).
- 2) Program Pemanfaatan Tata Ruang dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi kebijakan, norma, standarisasi prosedur dan manual pemanfaatan ruang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.41.000.000,- realisasi keuangan Rp. 24.500.000,- (59 %), realisasi fisik (59 %), adapun kegiatan yang direncanakan adalah seminar sehari tentang program salemo.
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang, dengan jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp. 65.200.000,- realisasi keuangan Rp. 65.140.000,- (99,8 %), realisasi fisik (100 %).

- c. Pengendalian kebijakan perizinan pemanfaatan ruang dengan jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp. 146.600.000,- realisasi keuangan Rp. 146.600.000,- (100 %), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan antara lain berupa asistensi RAB Gambar bangunan pemerintah dalam rangka perijinan IMB dan sosialisasi himbauan penegakan perda RTRW.
- 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.364.400.000,- realisasi keuangan Rp. 364.400.000,- (100%), realisasi fisik (100 %) berupa operasional pengawasan dan pengendalian polisi bangunan.
- 4) Program Pengembangan Wilayah strategis dan cepat Tumbuh dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Rencana Pengembangan Infrastruktur dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.514.898.000,- realisasi keuangan Rp. 530.575.000,- (21.10 %), realisasi fisik (21 %), adapun kegiatan yang direncanakan berupa:
- Penyusunan rencana induk reklamasi pantai salemo.
 - studi kelayakan (FS) reklamasi salemo.
 - Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi pantai salemo.
 - penyusunan Masterplan Kawasan strategis cepat tumbuh Salemo.

c. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan Rencana Pengembangan Infrastruktur pada unit Kerja Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.514.898.000 realisasi keuangan Rp. 530.575.000 (21.10 %), realisasi fisik (22%), secara fisik kegiatan tersebut mengalami keterlambatan, disebabkan selain karena keterlambatan proses tender, juga disebabkan oleh karena menunggu proses penyelesaian dokumen-dokumen induknya antara lain dokumen RZWP3K, adapun output kegiatan yang direncanakan adalah :

- Penyusunan rencana induk reklamasi pantai salemo.
- studi kelayakan (FS) reklamasi salemo.

- Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi pantai salemo.
- penyusunan Masterplan Kawasan strategis cepat tumbuh Salemo.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan, diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan program, kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Data / Informasi dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi.
 - b. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi.
 - d. Pengolahan data elektronik.
- 2) Program Pengembanagan data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
 - b. Penyusunan dan pengumpulan Data PDRB
- 3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan.
- 4) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
- 5) Program Perencanaan pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategi.
 - b. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

- 6) Program Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan.
 - b. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan.
 - c. Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan.
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 7) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Rancangan RKPD.
 - b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
 - c. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah.
 - d. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ).
 - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Fasilitasi Pengkajian dan Penelitian Pengembangan Daerah.
 - g. Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 9) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah.
 - b. Penyusunan perencanaan pengembangan Ekonomi Masyarakat.
 - c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
 - d. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan.
 - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 10) Program Perencanaan Sosial Dan Budaya dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan.
- b. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan.
- c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Koordinasi penyelenggaraan program pengembangan pelayanan dasar.
- f. Koordinasi penyelenggaraan program pengembangan kesejahteraan rakyat.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

- 1) Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.160.8400.000,- realisasi keuangan Rp.160.800.000,- (100%), dan realisasi fisik (100%), Kegiatan ini merupakan survei tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palopo.
 - b. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.67.200.000,- realisasi keuangan Rp.67.200.000,- (100%), dan realisasi fisik (100%). Kegiatan ini merupakan penyusunan data dan informasi berupa dokumentasi gambaran Kota Palopo dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo berupa Buku Profil Kota Palopo tahun 2014 sebanyak 45 eksemplar.
 - c. Pengolahan data elektronik, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.165.300.000,- realisasi keuangan Rp.164.850.525,- (99,73%), realisasi fisik (100%). Kegiatan ini merupakan akses media informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah Kota Palopo melalui akses internet.

- 2) Program Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.63.700.000,- realisasi keuangan Rp.63.700.000,- (100%), realisasi fisik (100%). Kegiatan ini merupakan penyusunan data statistik Kota Palopo berupa Buku Palopo Dalam Angka Tahun 2014 sebanyak 80 buku.
 - b. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.73.300.000,- realisasi keuangan Rp.68.800.000,- (93,86%), realisasi fisik (100%). Kegiatan ini merupakan penyusunan data PDRB Kota Palopo berupa Buku PDRB Kota Palopo tahun 2014 sebanyak 80 buku.
- 3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan, dengan jumlah anggaran Rp.40.500.000,- realisasi keuangan Rp.40.500.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan ini adalah kerjasama atau MOU (Memorandum Of Understanding) antara Pemkot Palopo, Toraja Utara dan Luwu dalam penanganan kawasan hutan lindung.
- 4) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.24.700.000,- realisasi Rp. 24.700.000,- (100%), realisasi fisik (100%). Kegiatan ini berupa data dan informasi perencanaan dan informasi kondisi pembangunan daerah melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).
- 5) Program Perencanaan pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.16.750.000,- realisasi keuangan Rp.16.750.000,- (100%), realisasi fisik (100%). Kegiatan ini berupa pengawasan dan pengendalian program di bidang perencanaan kawasan strategi cepat tumbuh.
 - b. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.57.750.000,- realisasi keuangan Rp.57.750.000,- (100%), dan realisasi fisik (100%), merupakan penataan, pengendalian dan pemanfaatan ruang

daerah berupa rekomendasi kesesuaian pemanfaatan fungsi ruang daerah sebanyak 12 rekomendasi.

6) Program Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi keuangan Rp.100.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%). Kegiatan ini berupa koordinasi dan fasilitasi dibidang persampahan dan sanitasi Kota Palopo dalam bentuk kegiatan dan dokumen PPSP (Program Percepatan Sanitasi Program).
- b. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 77.500.000,- realisasi keuangan Rp. 62.615.000,- (80,79%), dan realisasi fisik (100%). Sasaran kegiatan ini merupakan sinkronisasi program pusat, daerah dan swadaya masyarakat.
- c. Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.129.378.000,- realisasi keuangan Rp.125.655.000,- (97,12%), realisasi fisik (100%). Kegiatan ini dilakukan untuk perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan berupa tersedianya dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) dalam rangka program PPSP Kota Palopo.
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.32.700.000,- realisasi keuangan Rp.30.600.000,- (93,58%), realisasi fisik (100%). Kegiatan ini dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi target RTH dan SPM bidang infrastruktur serta percepatan pencapaian target.

7) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.158.150.000,- realisasi keuangan Rp.158.150.000,- (100%), realisasi fisik (100%).

8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas 7 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rancangan RKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.165.230.000,- realisasi keuangan Rp.165.190.000,- (99,98%), realisasi fisik (100%), terbitnya dokumen RKPD.
- b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.179.660.000,- realisasi keuangan Rp.179.160.000,-

(99,72%), realisasi fisik (100%), terlaksananya kegiatan musrenbang Kota Palopo.

- c. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.48.075.000,- realisasi keuangan Rp.48.075.000,- (100%), realisasi fisik (100%). Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen laporan kinerja pemerintah.
 - d. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dengan jumlah anggaran Rp.89.992.700,- realisasi keuangan Rp.89.992.700,- (100%), realisasi fisik (100%) tersusunnya laporan pertanggungjawaban Walikota Palopo.
 - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.103.100.000,- realisasi keuangan Rp.99.690.000,- (96,69%), realisasi fisik (100%). Kegiatan ini dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program/kegiatan alokasi dana APBD dan APBN yang dikelola SKPD/Unit Kerja dan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.
 - f. Fasilitas Pengkajian dan Penelitian Pengembangan Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.31.950.000,- realisasi keuangan Rp.31.950.000,- (100%), realisasi fisik (100%). Kegiatan ini merupakan penelitian mengenai analisis implementasi pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil dan menengah di Kota Palopo dalam bentuk dokumen hasil penelitian.
 - g. Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.79.600.000,- realisasi keuangan Rp.76.780.000,- (96,46%), realisasi fisik (100%). Kegiatan ini dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program/kegiatan pemanfaatan DAK, TP dan UB yang dikelola SKPD/Unit kerja.
- 9) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri atas 5 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.183.350.000,- realisasi keuangan Rp.7.650.000,- (4,17%), realisasi fisik (5%). Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah.
 - b. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.92.248.000,- realisasi keuangan Rp.90.250.505,- (97,83%), realisasi fisik (100%). Sasaran kegiatan tersebut adalah pengembangan ekonomi masyarakat, olehnya itu ditindaklanjuti melalui MoU tersebut dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok wirausaha binaan Kota Palopo, dijadikan data base sebagai bahan perencanaan kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal Kota Palopo.

- c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.45.750.000,- realisasi keuangan Rp.27.763.900,- (60,69%), realisasi fisik (61%). Sasaran kegiatan adalah pemantapan pelaksanaan kegiatan SKPD koordinasi bidang ekonomi, olehnya itu terselenggaranya rapat koordinasi tentang perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan SKPD koordinasi bidang ekonomi.
- d. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.84.412.000,- realisasi keuangan Rp.59.504.600,- (70,49%), realisasi fisik (71%). Sasaran kegiatan adalah penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan, melalui hasil berupa dokumen yang dapat dijadikan pedoman bagi SKPD dalam menangani masalah pengentasan kemiskinan di Kota Palopo.
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.43.490.000,- realisasi keuangan Rp.42.679.100,- (98,14%), realisasi fisik (100%). Sasaran kegiatan adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan 8 SKPD koordinasi bidang ekonomi, melalui hasil laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan SKPD koordinasi bidang ekonomi.

10) Program Perencanaan Sosial Dan Budaya, terdiri atas 5 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.132.000.000,- realisasi keuangan Rp.132.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%). Sasaran kegiatan ini adalah masterplan pendidikan Kota Palopo tahun 2014 – 2023, melalui hasil berupa dokumen masterplan pendidikan Kota Palopo tahun 2014 – 2023 sebanyak 20 (dua puluh) eksamplar.
- b. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan, dengan jumlah anggaran Rp.131.970.800,- realisasi keuangan Rp.70.600.000,- (53,50%), dan realisasi fisik (53,50%). Sasaran kegiatan ini adalah masterplan kesehatan Kota Palopo tahun 2014 – 2018. melalui hasil berupa dokumen masterplan kesehatan Kota Palopo tahun 2014 – 2018 sebanyak 20 (dua puluh) eksamplar.
- c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.154.800.000,- realisasi keuangan Rp.104.200.000,- (67,31%), realisasi fisik (68%). Sasaran kegiatan ini adalah rencana kerja pembangunan bidang sosial budaya, melalui hasil berupa laporan rencana kerja pembangunan bidang sosial budaya yang sinergis antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional.

- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.32.800.000,- realisasi keuangan Rp.29.350.000,- (89,48%), realisasi fisik (90%). Sasaran kegiatan ini adalah monitoring, evaluasi program/kegiatan bidang sosial budaya, melalui hasil tersedianya bahan evaluasi terhadap keberhasilan program/kegiatan SKPD koordinasi bidang sosial budaya tahun anggaran 2014.
- e. Koordinasi penyelenggaraan program pengembangan pelayanan dasar, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.35.100.000,- realisasi keuangan Rp.33.600.000,- (95,73%), realisasi fisik (100%). Sasaran kegiatan ini adalah koordinasi program Kota Sehat, melalui hasil berupa laporan rencana kerja tim pembina kota sehat dengan SKPD terkait adanya penilaian kota sehat.
- f. Koordinasi penyelenggaraan program pengembangan kesejahteraan rakyat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.56.200.000,- realisasi keuangan Rp.55.249.935,- (98,31%), realisasi fisik (100%). Sasaran kegiatan ini adalah koordinasi program MDGs, melalui hasil berupa laporan rencana kerja program MDGs dengan SKPD terkait.

c. Permasalahan Dan Solusi

- 1). Permasalahan
 - a. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah, dengan jumlah anggaran Rp.183.350.000,- tidak terealisasi, kerana tidak diterbitkan dan ditandatangani SPPBJ dan kontrak mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah tidak mencukupi 60 (enam puluh) hari kalender.
 - b. Permasalahan tentang kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.45.750.000,- realisasi keuangan Rp.27.763.900,- (60,69%), realisasi fisik (60,69%). karena anggaran perjalanan dinas luar daerah tidak terealisasi.
 - c. Permasalahan tentang koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.45.750.000,- realisasi keuangan Rp.27.763.900,- (60,69%), realisasi fisik (60,69%). Karena anggaran perjalanan dinas luar daerah tidak terealisasi.
 - d. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.84.412.000,- realisasi keuangan Rp.59.504.600,- (70,49%), realisasi fisik (70,49%). Karena anggaran perjalanan dinas luar daerah tidak terealisasi.
- 2) Solusi
 - 1. Sisa anggaran dikembalikan ke negara.
 - 2. Pelaksanaan kegiatan diusulkan kembali pada Tahun Anggaran 2015.
 - 3. Diperlukan analisis ketersediaan konsultan atau pihak ketiga yang berkompeten secara teknis dalam pelaksanaan pekerjaan agar

optimal dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerjanya.

4. Anggaran tersebut dikembalikan ke negara.
5. Anggaran tersebut dikembalikan ke negara

7. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam bentuk program, kegiatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan :
 - a. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan.
- 2) Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan dan pengembanagan jaringan komunikasi dan informasi.
- 3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Parasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan :
 - a. Rehabilitas/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan.
 - b. Pemeliharaan Traffic light.
 - c. Pemeliharaan Rambu-rambu Lalulintas.
- 4) Program Peningkatan Pelayanan angkutan dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan.
 - b. Kegiatan uji kelayakan sarana Transportasi Guna Keselamatan penumpang.
 - c. Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoprasian Angkutan Umum Dijalan Raya.
 - d. Kegiatan Pencapaian Keamanan dan Kenyamanan penumpang di Lingkungan Terminal.
 - e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan.
 - f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 5) Program Kerjasama Informasi dan Media massa dengan kegiatan :
 - a. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat.

- 6) Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan Gedung Terminal.
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi darat.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.9.700.000,- realisasi keuangan Rp. 0,- (0%), realisasi fisik (0 %), dengan kegiatan yang direncanakan adalah pelaksanaan sosialisasi kebijakakan bidang perhubungan.
- 2) Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.800.000,- realisasi keuangan Rp.4.800.000,- (100 %), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan berupa penyediaan jasa operasional tenaga perkantoran.
- 3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Parasarana dan Fasilitas LLAJ, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Rehabilitas/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.13.800.000,- realisasi keuangan Rp.11.300.000,- (82 %), realisasi fisik (82%), dengan kegiatan berupa perbaikan sarana terminal.
 - b. Pemeliharaan Traffic light, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.39.000.000,- realisasi keuangan Rp.38.918.000,- (82 %), realisasi fisik (82 %), dengan kegiatan berupa biaya operasional dan jasa pemeliharaan traficlight.
 - c. Pemeliharaan Rambu-rambu Lalulintas, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.53.900.000,- realisasi keuangan Rp 53.829.000,- (99,9

%), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan berupa pembangunan dan pemeliharaan unit zebracross.

4) Program Peningkatan Pelayanan angkutan terdiri atas 6 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a) Kegiatan Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.54.300.000,- realisasi keuangan Rp.54.150.000,- (99,7 %), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan pemeriksaan kelayakan operasi kapal G.7 sebanyak 79 kapal laut.
- b) Kegiatan uji kelayakan sarana Transportasi Guna Keselamatan penumpang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.101.200.000,- realisasi keuangan Rp. 101.200.000,- (100 %), realisasi fisik (100 %), dengan melalui kegiatan berupa pelaksanaan pemeriksaan sarana keselamatan dan kelaikan kendaraan umum dan barang.
- c) Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoprasian Angkutan Umum di jalan Raya, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 131.200.000,- realisasi keuangan Rp.116.460.000,- (99,4 %), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan berupa pelaksanaan pengendalian dan pengaturan pengguna jalan di Kota Palopo.
- d) Kegiatan Pencapaian Keamanan dan Kenyamanan penumpang di Lingkungan Terminal, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 116.715.000,- realisasi keuangan Rp. 116.022.000,- (99,40 %), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan berupa penyediaan operasional dan honorarium petugas pengelola terminal.
- e) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan, dengan jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp.64.800.000,- realisasi keuangan Rp.62.240.000,- (96 %), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan berupa penertiban dan perubahan rambu lalulintas.
- f) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.37.200.000,- realisasi keuangan Rp.37.200.000,- (100 %), realisasi fisik (100 %).

- 5) Program Kerjasama Informasi dan Media massa, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a) Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.49.200.000,- realisasi keuangan Rp.48.700.000,- (99,9 %), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan berupa pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan informasi melalui mobil M-Plik di 9 Kecamatan 48 Kelurahan.
- 6) Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a) Pembangunan Gedung Terminal, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.616.025.000,- realisasi keuangan Rp.1.290.220.000,- (79,8 %), realisasi fisik (79 %), dengan kegiatan berupa :
- Pematangan lahan terminal songka 5000 m².
 - Rahabilitasi lahan parker terminal dangerakko 1.200 m².
 - Pembangunan 1 unit MCK terminal Dangerakko.
 - paket kegiatan penyusunan dokumen amdal terminal Songka tidak terealisasi.
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi darat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.493.911.000,- realisasi keuangan Rp 493.911.000,- (100 %), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan :
- Pengadaan 2 unit traficlight.
 - Pengadaan 1 unit warning light.
 - Pembangunan marka jalan sepanjang 1.500 m.
 - Pengadaan rambu/petunjuk arah jalan 33 unit.

8. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Urusan wajib Lingkungan Hidup, diselenggarakan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan,

Pertamanan dan Permakaman, terdiri atas program, kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

8.1. Badan Lingkungan Hidup Daerah

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas 7 kegiatan dan program sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.
 - b. Pemantauan Kualitas Lingkungan.
 - c. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.
 - d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
 - e. Pengkajian Dampak Lingkungan.
 - f. Koordinasi Penyusunan AMDAL.
 - g. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.
- 2) Program Perlindungan dan Kualitas dan konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA.
- 3) Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan.
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas 7 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura dengan jumlah anggaran sebesar Rp.206.975.000,- realisasi keuangan Rp. 202.649.400,-

(97,97%), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan berupa pelaksanaan koordinasi penyiapan penilaian adipura Kota Palopo tahun 2014.

- b. Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.67.400.000, realisasi keuangan Rp. 63.900.000,- (94,81 %), realisasi fisik (100 %), dengan kegiatan berupa terlaksananya pemantauan dan penyusunan laporan hasil uji laboratorium kondisi air dan tanah di Kota Palopo.
 - c. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp.79.420.000,- realisasi keuangan Rp.79.399.350,- (99,97%), realisasi fisik (100 %).
 - d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.15.400.000,- realisasi keuangan Rp.15.395.000,- (98,42 %), realisasi fisik (100 %).
 - e. Pengkajian Dampak Lingkungan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.254.350.000,- realisasi keuangan Rp. 249.795.000,- (98,21 %), realisasi fisik (100%), dengan kegiatan berupa penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Salemo.
 - f. Koordinasi Penyusunan AMDAL dengan jumlah anggaran sebesar Rp.168.700.000,- realisasi keuangan Rp.164.583.400,- (98,21 %), realisasi fisik (100%), dengan kegiatan berupa koordinasi teknis dalam rangka penyusunan dokumen AMDAL.
 - g. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dengan jumlah anggaran sebesar Rp.21.700.000,- realisasi keuangan Rp. 21.699.000,- (99,99 %), realisasi fisik (100 %), dengan terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan aturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup terhadap SKPD se Kota Palopo.
- 2) Program Perlindungan dan Kualitas dan konservasi Sumber Daya Alam, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.61.450.000,- realisasi keuangan Rp.61.049.950,- (99,35 %), realisasi fisik (100%), dengan kegiatan berupa penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Salemo.
- 3) Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut:
- a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.75.950.000,- realisasi keuangan Rp.75.878.000,- (99,90%), realisasi fisik (100%), dengan kegiatan berupa penyusunan penyusunan dokumen status lingkungan hidup Kota Palopo, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur.
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.378.000.000,- realisasi keuangan Rp.377.498.000,- (99,87 %), realisasi fisik (100%) dengan kegiatan berupa :
 - 60 unit bak sampah permanen.
 - 85 unit bak kompos.
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.783.246.240,- realisasi keuangan Rp.782.710.650,- (99,83 %), realisasi fisik (100%), dengan kegiatan berupa :
 - Pembangunan turap/talud sungai 3 lokasi.
 - Pembangunan sumur resapan 40 unit.
 - Pembangunan lubang biopori 500 lubang.

8.2. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Kebijakan Manajemen Persampahan.
 - b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan.
 - c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan.
 - d. Penyuluhan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan.
- 2) Program Pengelolaan Area Pemakaman, dengan kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.
- 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan :
 - a. Penataan RTH.
 - b. Pemeliharaan RTH.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Kebijakan Manajemen Persampahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.0,- realisasi keuangan Rp.0,- (0 %), dengan kegiatan yang direncanakan dalam kegiatan ini adalah tersusunnya 1 dokumen AMDAL untuk TPA/IPLT.
 - b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.117.020.900,- realisasi keuangan Rp.5.905.973.500,- (96,70 %), realisasi fisik (100%), dengan kegiatan berupa penyediaan biaya operasional, honorarium serta biaya asuransi bagi 290 tenaga persampahan.
 - c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.378.803.000,- realisasi keuangan Rp.336.586.500,- (88,86 %), realisasi fisik (89 %), dengan kegiatan berupa penyediaan operasional, honorarium dan biaya lainnya untuk petugas persampahan di Kelurahan 48 Kelurahan.

- d. Penyuluhan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.9.600.000,- realisasi keuangan Rp.0,- (0 %).
- 2) Program Pengelolaan Area Pemakaman, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.583.643.000,- realisasi keuangan Rp.578.612.000,- (99,14 %), realisasi fisik (100%), dengan kegiatan berupa penyediaan biaya operasional dan honorarium bagi 37 tenaga petugas pemakaman, serta pembebasan lahan pemakaman di 2 lokasi (Buntu Datu dan Salupao).
- 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan
- a. Penataan RTH, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.951.614.500,- realisasi keuangan Rp.871.786.500,- (91,61%), realisasi fisik (92%), dengan kegiatan berupa penyediaan operasional dan honorarium bagi 52 tenaga petugas pertamanan.
 - b. Pemeliharaan RTH, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.909.593.000,- realisasi keuangan Rp.870.868.250,- (95,75 %), realisasi fisik (100%), dengan kegiatan berupa penyediaan operasional, alat, dan honorarium bagi 55 orang petugas pembabat rumput.

10. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, terdiri atas program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program penataan administrasi kependudukan, dengan kegiatan :
 - a. Implementasi system administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).
 - b. Kordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.
 - c. Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan.
 - d. Pengembangan data base kependudukan.

- e. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Sosialisasi kebijakan kependudukan.
- g. Penyediaan informasi yang dapat di akses masyarakat.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

1) Program penataan administrasi kependudukan, terdiri atas 7 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan), dengan jumlah anggaran sebesar Rp.74.550.000,- realisasi keuangan Rp.74.550.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan ini adalah implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 34.930.500,- realisasi keuangan Rp. 33.330.500,- (95,42%), realisasi fisik (96%), sasaran kegiatan ini adalah koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan melalui rapat koordinasi Dukcapil tingkat kota.
- c. Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.050.000,- realisasi keuangan Rp. 20.050.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan ini adalah pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan melalui buku profil perkembangan kependudukan.
- d. Pengembangan data base kependudukan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 617.800.000,- realisasi keuangan Rp. 608.580.000,- (98,51%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan ini adalah pengembangan data base kependudukan.
- e. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil, dengan jumlah anggaran Rp. 140.080.000,- realisasi keuangan Rp.139.780.000,- (99,79%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan

ini adalah peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil.

- f. Sosialisasi kebijakan kependudukan, dengan jumlah anggaran Rp. 92.080.000,- realisasi keuangan Rp. 92.080.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan ini adalah sosialisasi kebijakan kependudukan.
- g. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat, dengan jumlah anggaran Rp. 64.070.000,- realisasi anggaran Rp. 61.820.000,- (96,49%), realisasi fisik (96.49%), sasaran kegiatan ini adalah penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.

11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB Kota Palopo, terdiri atas program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan :
 - a. penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.
- 2) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan kegiatan :
 - a. pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat.
- c. penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa.
- 3) Program kesehatan reproduksi remaja, dengan kegiatan :
 - a. advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi kesehatan remaja (KRR).
 - b. memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat .
 - c. program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan.
 - d. fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan.
- 4) Program penguatan kelembagaan pengurusan utama gender dan anak, dengan kegiatan :

- a. fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2).
 - b. pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
 - c. perumusan kebijakan peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak.
- 5) Program pelayanan kontrasepsi, dengan kegiatan :
- a. pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.
 - b. pengadaan alat kontrasepsi.
- 6) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dengan kegiatan :
- a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 7) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan kegiatan :
- a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa.
 - b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.
- 8) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, dengan kegiatan :
- a. Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.
 - b. Kordinasi pengelolaan program melalui rakerda.
 - c. Pengelolaan data informasi program KB.
 - d. Pembinaan institusi masyarakat (PPKBD dan sub PPKBD).
- 9) Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan kegiatan :
- a. Pelatihan aparatur desa dalam bidang pembangunan kawasan desa.
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 10) Program peningkatan peran serta kesetaraan jender dalam pembangunan, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan.

- b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender.
 - c. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
- 11) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan kegiatan :
- a. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender.
- 12) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling, dengan kegiatan :
- a. Pembinaan kelompok PIK dan KRR.
- 13) Program peningkatan sarana dan prasarana DAK bidang keluarga berencana, dengan kegiatan :
- a. Penyediaan kelompok PIK dan KRR.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan :

- 1) Program keluarga berencana, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 59.140.000,- realisasi keuangan Rp. 59.140.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan ini adalah penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.
- 2) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.675.000,- realisasi keuangan Rp. 8.675.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan ini adalah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.
 - b. Penyelenggaraan disemilasi informal bagi masyarakat desa, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 62.600.000,- realisasi keuangan Rp. 62.133.500,- (99.25%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan ini

adalah penyelenggaraan disemilasi informal bagi masyarakat desa.

- c. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.652.600.00,- realisasi keuangan Rp.0,- (0%), realisasi fisik (0%).
- 3) Program kesehatan reproduksi remaja, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR), dengan jumlah anggaran sebesar Rp.19.048.100,- realisasi keuangan Rp.19.048.100,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan ini adalah advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR).
 - b. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat, dengan jumlah anggaran Rp.9.300.000 (100%),- realisasi keuangan Rp. 9.300.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan ini adalah memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat.
 - c. Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat dan pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.40.000.000,- realisasi keuangan Rp. 40.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan ini adalah program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat dan pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan.
 - d. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan, dengan jumlah anggaran Rp. 8.000.000,- realisasi keuangan Rp. 8.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan ini adalah fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan.
- 4) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2), dengan jumlah anggaran Rp. 81.400.000,- realisasi keuangan Rp.11.300.000,- (13,88%), realisasi fisik (14%),

sasaran kegiatan adalah fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2).

- b. Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2), dengan jumlah anggaran Rp. 81.400.000,- realisasi keuangan Rp. 77.700.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2).
 - c. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak, dengan jumlah anggaran Rp. 36.225.000,- realisasi keuangan Rp. 36.225.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
 - d. Perumusan kebijakan peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 105.000.000,- realisasi keuangan Rp. 21.550.000,- (20,52%), realisasi fisik (21%), sasaran kegiatan adalah fasilitas Perumusan kebijakan peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak.
- 5) Program pelayanan pemasangan kontrasepsi, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dengan jumlah anggaran Rp. 104.130.000,- realisasi keuangan Rp. 104.130.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.
 - b. Pengadaan alat kontrasepsi, dengan jumlah anggaran Rp.32.440.000,- realisasi keuangan Rp. 32.440.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengadaan alat kontrasepsi.
- 6) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan , terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan jumlah anggaran

Rp.13.325.000,- realisasi keuangan Rp. 13.275.000,- (99,62%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah monitoring dan evaluasi pelaporan.

- 7) Program peningkatan partisipasi m dalam membangun desa ,terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, dengan jumlah anggaran Rp. 98.000.000,- realisasi keuangan Rp. 93.650.000,- (95.56%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa.
 - b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa, dengan jumlah anggaran Rp. 45.008.500,- realisasi keuangan Rp. 45.008.500,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.
- 8) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB, dengan jumlah anggaran Rp. 119.200.000,- realisasi keuangan Rp. 119.200.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.
 - b. Koordinasi pengelolaan program melalui rakerda, dengan jumlah anggaran Rp. 19.030.000,- realisasi keuangan Rp. 19.030.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah koordinasi pengelolaan program melalui rakerda.
 - c. Pengelolaan data informasi program KB, dengan jumlah anggaran Rp.109.324.000,- realisasi keuangan Rp.109.324.000,-(100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengelolaan data informasi program KB.
 - d. Pembinaan institusi masyarakat (PPKBD dan sub PPKBD), dengan jumlah anggaran Rp.10.300.000,- realisasi keuangan Rp. 10.300.000,- (100%), realiosasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pembinaan

institusi masyarakat (PPKBD dan sub PPKBD).

- 9) Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan kegiatan :
 - a. Pelatihan aparatur desa dalam bidang pembangunan kawasan desa, dengan jumlah anggaran Rp.82.510.000,- realisasi keuangan Rp.0,- (0%), realisasi fisik (0%).
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan jumlah anggaran Rp.11.270.000,- realisasi keuangan Rp.3.900.000,- (34,61%), realisasi fisik (35%).

- 10) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut ;
 - a. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan, dengan jumlah anggaran Rp.150.000.000,- realisasi keuangan Rp.145.345.700,- (96.90%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah kegiatan pembinaan organisasi perempuan.
 - b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender, dengan jumlah anggaran Rp. 36.000.000,- realisasi keuangan Rp.34.000.000,- (94.44%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.
 - c. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera, dengan jumlah anggaran Rp.77.000.000,- realisasi keuangan Rp. 76.900.000,- (99.87%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.

- 11) Program penguatan kelembagaan pengurusutamaan gender dan anak, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut ;
 - a. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender, dengan jumlah anggaran Rp.400.000.000,- realisasi keuangan Rp.390.173.400,-

(97,54%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemberdayaan lembaga yang berbasis.

12) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut ;

- a. Pembinaan kelompok PIK & KRR, dengan jumlah anggaran Rp.11.316.000,- realisasi keuangan Rp.11.316.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pembinaan kelompok PIK & KRR (100%).

13) Program peningkatan sarana dan prasarana DAK Bidang keluarga berencana, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana , dengan jumlah anggaran Rp. 876.526.760,- realisasi keuangan Rp. 854.782.000,- (97.52%), realisasi fisik (98%), sasaran kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana.

13. Urusan Wajib Sosial

Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo, terdiri atas program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin.
 - b. Pengembangan rumah tak layak huni.
 - c. Pemberdayaan fakir miskin dan optimalisasikan pemulung.
- 2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - a. Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia.
 - b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.

- c. Pembinaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam nasional.
 - d. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS.
- 3) Program pembinaan anak terlantar, dengan kegiatan :
- a. Pembinaan anak terlantar/bantuan sarana pendukung anak terlantar dalam panti.
- 4) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dengan kegiatan :
- a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dana usaha.
 - b. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
 - c. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat .
 - d. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin, dengan jumlah anggaran Rp. 6.160.000,- realisasi keuangan Rp. 6.160.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin.
 - b. Pengembangan rumah tak layak huni, dengan jumlah anggaran Rp.118.390.675,- realisasi keuangan Rp. 118.390.675,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengembangan rumah tak layak huni.
 - c. Pemberdayaan fakir miskin dan optimalisasi pemulung, dengan jumlah anggaran Rp. 210.500.000,- realisasi keuangan Rp.210.500.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemberdayaan fakir miskin dan optimalisasi pemulung.
- 2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, terdiri atas 4

kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia, dengan jumlah anggaran Rp.70.750.000,- realisasi keuangan Rp. 70.600.000,- (99,79%), realisasi fisik (99,79%), sasaran kegiatan adalah pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia.
 - b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, dengan jumlah anggaran Rp.193.215.000,- realisasi keuangan Rp. 191.388.200,- (99,05%), realisasi fisik (99,05%), sasaran kegiatan adalah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
 - c. Pembinaan/pemeliharaan taman makan pahlawan dan makam nasional, dengan jumlah anggaran Rp. 459.130.000,- realisasi keuangan Rp. 459.130.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pembinaan/pemeliharaan taman makan pahlawan dan makam nasional.
 - d. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS dengan jumlah anggaran Rp.75.100.000,- realisasi keuangan Rp. 75.100.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemutakhiran data PMKS dan PSKS.
- 4) Program pembinaan anak terlantar, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pembinaan anak terlantar /bantuan sarana pendukung anak terlantar dalam panti, dengan jumlah anggaran Rp. 13.978.000,- realisasi keuangan Rp. 13.978.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pembinaan anak terlantar /bantuan sarana pendukung anak terlantar dalam panti.
- 5) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, terdiri atas 4

kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dana usaha, dengan jumlah anggaran Rp. 28.430.000,- realisasi keuangan Rp. 28.430.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan peran aktif masyarakat dan dana usaha .
- b. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan social masyarakat, dengan jumlah anggaran Rp. 253. 262.000,- realisasi keuangan Rp. 253.262.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan social masyarakat .
- c. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat, dengan jumlah anggaran Rp.48.988.000,- realisasi keuangan Rp. 48.988.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
- d. Pengembangan model kelembangan perlindungan sosial, dengan jumlah anggaran Rp. 37.833.000,- realisasi keuangan Rp.37.833.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengembangan model kelembangan perlindungan sosial (100%).

14. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Wajib Tenaga Kerja, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo, terdiri atas program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
- 2) Program peningkatan kesempatan kerja, dengan kegiatan :
 - a. Monitoring dan evaluasi, pelaporan.
- 3) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan,

dengan kegiatan :

- a. Fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- b. Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- c. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Monitoring dan evaluasi, pelaporan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, dengan jumlah anggaran Rp. 292.602.000,- realisasi keuangan Rp.292.602.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
- 2) Program peningkatan kesempatan kerja, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Monitoring dan evaluasi, pelaporan, dengan jumlah anggaran Rp.11.850.000,- realisasi keuangan Rp.11.850.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah monitoring dan evaluasi pelaporan.
- 3) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan jumlah anggaran Rp. 22.985.000,- realisasi keuangan Rp.22.985.000,- (100%), sasaran kegiatan adalah fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - b. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan , dengan jumlah anggaran Rp.23.300.000,- realisasi keuangan Rp. 23.300.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah fasilitasi penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

- c. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, dengan jumlah anggaran Rp.31.400.000,- realisasi keuangan Rp.31.400.000,-(100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Monitoring dan evaluasi, pelaporan, dengan jumlah anggaran Rp.15.100.000,- realisasi keuangan Rp. 15.100.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah monitoring dan evaluasi, pelaporan.

15. Urusan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan Pangan, dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri atas program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan :
 - a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis.
 - b. Peningkatan kemampuan lembaga petani.
 - c. Penyusunan Kebijakan Kebutuhan Kelompok Tani.
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) dengan kegiatan :
 - a. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan.
 - b. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan.
 - c. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah.
 - d. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.
 - e. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat.
 - f. Pengembangan desa mandiri pangan.
 - g. Pengembangan lumbung pangan desa.
 - h. Peningkatan mutu dan keamanan pangan.
 - i. Penyuluhan sumber pangan alternatif.
 - j. Penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan pangan.
- 3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan :
 - a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.
- 4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan :

- a. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
- 5) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan.
 - b. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan.
 - c. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Petani dan pelaku Agribisnis, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.32.050.000,- realisasi keuangan Rp. 32.050.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan bidang agribisnis, olehnya itu telah dilakukan pelatihan agribisnis kepada 30 orang petani dan pelaku agribisnis lainnya sebanyak 2 kali pelatihan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bidang agribisnis dengan daya serap.
 - b. Peningkatan kemampuan lembaga petani, dengan jumlah anggaran Rp.62.767.500,- realisasi keuangan Rp.46.180.000,- (73,57%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, olehnya itu telah dilakukan pelatihan manajemen kelompok kepada 25 pengurus kelompok sebanyak 9 kali pelatihan melalui daya serap peserta terhadap materi.
 - c. Penyusunan Kebijakan Kebutuhan Kelompok Tani, dengan jumlah anggaran Rp.34.485.000,- realisasi keuangan Rp. 34.485.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan kemampuan kelompok tani untuk menyusun rencana kebutuhan kelompoknya, olehnya telah dilaksanakan pembinaan/bimbingan kepada 480 kelompok tani/nelayan dalam rangka menyusun rencana depenitif kebutuhan kelompok melalui seluruh kelompok tani/nelayan telah memiliki rencana depenitif kebutuhan kelompok (RDKK).
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), terdiri atas 10 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, dengan jumlah anggaran Rp.8.355.000,- realisasi keuangan Rp. 8.355.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah untuk mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi dan gizi mereka, olehnya itu telah dilaksanakan 12 kali pendataan untuk bahan analisis pola konsumsi masyarakat dan pencapaian pola pangan harapan yang telah ditargetkan sebelumnya melalui skor pola pangan harapan kota palopo 2014 , hal ini

menunjukkan mutu pangan penduduk kota Palopo semakin beragam dengan komposisi dan mutu gizi yang semakin baik.

- b. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan, dengan jumlah anggaran Rp.8.069.000,- realisasi keuangan Rp. 8.069.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah untuk mengetahui ketersediaan pangan daerah dalam jangka waktu tertentu, olehnya itu telah dilaksanakan pengambilan data sebanyak 12 kali untuk bahan analisis kebutuhan dan ketersediaan pangan Kota Palopo melalui adanya Neraca Bahan Makanan (NBM) sebagai hasil analisis yang dipedomani dalam rangka mengevaluasi kebutuhan dan ketersediaan pangan dan Kota Palopo.
- c. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah, dengan jumlah anggaran Rp.18.885.000,- realisasi keuangan Rp. 18.885.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah menstabilkan harga komoditi pangan, olehnya itu telah dilaksanakan pemantauan dan pencatatan harga komoditi pangan di pasaran sebanyak 12 kali dalam setahun, melalui data informasi harga komoditi pangan Kota Palopo sebanyak 12 buku.
- d. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, dengan jumlah anggaran Rp.24.155.000,- realisasi keuangan Rp. 24.155.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah optimalisasi lahan pekarangan dalam rangkat memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, olehnya itu telah dilaksanakan pemberdayaan kepada 9 kelompok wanita tani pada 9 Kelurahan dalam rangka pemanfaatan pekarangan secara intensif, melalui 9 kelompok wanita tani binaan tersebut telah memanfaatkan lahan pekarangan secara intensif untuk kebutuhan pangan keluarga.
- e. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat, dengan jumlah anggaran Rp.14.472.000,- realisasi keuangan Rp. 14.472.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat, olehnya itu telah dilaksanakan pendataan sebanyak 4 kali untuk bahan analisis kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat, melalui data informasi tentang situasi pangan dan gizi masyarakat Kota Palopo sebanyak 12 buku.
- f. Pengembangan desa mandiri pangan, dengan jumlah anggaran Rp.13.595.000,- realisasi keuangan Rp. 13.595.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah memberdayakan masyarakat miskin di Kelurahan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat, olehnya itu telah dilaksanakan pembinaan kepada 2 kelompok afinitas di 2 Kelurahan yaitu kelurahan Kelurahan Latuppa dan Kelurahan Sendana, melalui peningkatan kemampuan kelompok afinitas tersebut menciptakan ketahanan pangan secara mandiri.

- g. Pengembangan lumbung pangan desa, dengan jumlah anggaran Rp.6.530.000,- realisasi keuangan Rp. 6.530.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah menyediakan stok pangan yang cukup dalam satu kelurahan, olehnya itu telah dilaksanakan pembinaan kepada 1 (satu) kelompok pengelola lumbung pangan pada Kelurahan Sumarambu, dengan berfungsinya lumbung pangan kelurahan untuk menjaga ketersediaan pangan dalam jangka waktu tertentu.
 - h. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, dengan jumlah anggaran Rp.22.500.000,- realisasi keuangan Rp.22.500.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan, olehnya itu telah dilaksanakan sosialisasi tentang mutu dan keamanan pangan kepada 20 orang petani dan masyarakat umum lainnya sebanyak 3 kali, melalui penggunaan pupuk dan pestisida kimia oleh petani mulai menurun dan beralih kepenggunaan pupuk dan pestisida organik, sementara untuk produk olahan seperti penggunaan borax, formalin, zat pewarna dan bahan pemanis yang tidak direkomendir telah mulai dihindari oleh masyarakat.
 - i. Penyuluhan sumber pangan alternatif, dengan jumlah anggaran Rp.38.265.000,- realisasi keuangan Rp.38.265.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengembangan potensi menu pangan lokal, olehnya itu telah dilaksanakan lomba cipta menu tingkat kelurahan, kecamatan dan kota sebanyak 1 kali, dengan berkembangnya menu pangan lokal yang dijadikan sebagai pangan alternatif dan usaha kuliner.
 - j. Penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan pangan, dengan jumlah anggaran Rp.26.110.000,- realisasi keuangan Rp.26.110.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah untuk mengevaluasi program ketahanan pangan yang tahun berjalan serta menyusun rencana kebijakan ketahanan pangan tahun berikutnya, olehnya itu telah dilaksanakan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah (DKP) sebanyak 1 kali, melalui rumusan kebijakan ketahanan pangan daerah Kota Palopo tahun 2015.
- 3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah, dengan jumlah anggaran Rp.75.000.000,- realisasi keuangan Rp.75.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah promosi potensi dan hasil/produk daerah, peningkatan wawasan petugas dan KTNA dalam rangka membangun investasi dan kemitraan usaha, olehnya itu telah diikutsertakan 20 orang yang terdiri dari petugas dan KTNA sebagai peserta pada acara Pekan Nasional (PENAS) KTNA XIV di Kabupaten Malang Jawa Timur, melalui

potensi dan produksi Kota Palopo baik produksi segar maupun olahan telah mulai dikenal oleh masyarakat diluar Kota Palopo.

- 4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, dengan jumlah anggaran Rp.33.840.000,- realisasi keuangan Rp.33.540.000,- (99,11%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengembangan potensi wilayah dengan komoditas varietas baru, olehnya itu telah dilaksanakan 1 (satu) demplot pengujian varietas bawang merah Bima dan Palu dalam rangka uji adaptasi varietas, dengan varietas bawang merah Bima dan Palu dapat tumbuh dan berproduksi baik di wilayah Kota Palopo.
- 5) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, dengan jumlah anggaran Rp.35.085.000,- realisasi keuangan Rp.33.285.000,- (94,87%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan kemampuan SDM penyuluh, olehnya itu telah dilaksanakan pembinaan/pelatihan penyuluh sebanyak 79 orang pada 9 Balai Penyuluhan Kecamatan pada setiap bulan, melalui lahirnya penyuluh-penyuluh berprestasi baik tingkat Provinsi maupun Nasional.
 - b. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, dengan jumlah anggaran Rp.204.000.000,- realisasi keuangan Rp.199.200.000,- (97,65%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah meningkatkan motivasi dan kinerja penyuluh, olehnya itu telah disediakan dana operasional kepada 79 orang penyuluh untuk mendukung peningkatan kinerja mereka, melalui kegiatan penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan semakin meningkat.
 - c. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan jumlah anggaran Rp.27.072.000,- realisasi keuangan Rp.25.272.000,- (93,35%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah menjadikan kegiatan penyuluhan lebih terarah/terkendali sehingga lebih efisien dan efektif, olehnya itu telah dilaksanakan penyusunan programa penyuluhan untuk 48 Kelurahan, melalui adanya dokumen programa yang menjadi acuan pelaksanaan penyuluhan pada 48 Kelurahan.
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran Rp.2.000.000,- realisasi keuangan Rp.1.950.000,- (97,50%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan, olehnya itu telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan pada 48 Kelurahan, melalui adanya laporan penyuluhan dan kinerja penyuluh.

c. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

Peningkatan kemampuan lembaga petani, dengan jumlah anggaran Rp.62.767.500,- realisasi keuangan Rp.46.180.000,- (73,57%), dan realisasi fisik 100%. Anggaran tidak terealisasi 100% karena sampai bulan Desember 2014, hasil penilaian Kelas Kelompok belum selesai dilakukan sehingga penyerahan bantuan buku administrasi tidak dapat dilaksanakan.

Solusi : Anggaran pengadaan buku administrasi dikembalikan ke negara.

16. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperindag Kota Palopo, terdiri atas program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan kegiatan

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.
- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, meliputi kegiatan :
 - a. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - b. Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi.
 - c. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD.
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga.
 - b. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah.
- 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, meliputi kegiatan:
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi.
 - b. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah, dengan jumlah anggaran Rp.45.000.000,- realisasi keuangan Rp.45.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyusunan data base Koperasi UMKM, olehnya itu telah tersedia data base Koperasi UMKM dalam bentuk 1 (satu) buku laporan, dengan dimanfaatkannya data base tersebut untuk bahan perencanaan, koordinasi dan untuk kepentingan lainnya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan jumlah anggaran Rp.293.385.000,- realisasi keuangan Rp.293.385.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana kemitraan usaha bagi KUMKM, olehnya itu telah diadakan 100 unit sarana dan prasarana pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), dengan difungsikannya PLUT sebagai layanan KUMKM secara optimal.
 - b. Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi, dengan jumlah anggaran Rp.88.080.000,- realisasi keuangan Rp.88.079.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah promosi hasil produksi KUMKM, olehnya itu telah diikuti 2 ajang pameran/promosi produk KUMKM yaitu di Makassar dan Jakarta, dengan menyebarnya informasi komoditi KUMKM diluar wilayah Kota Palopo.
 - c. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD, dengan jumlah anggaran Rp.23.180.000,- realisasi keuangan Rp.23.180.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan koperasi, olehnya itu telah dilaksanakan pelatihan manajemen Koperasi/KUD sebanyak 30 orang pengurus Koperasi/KUD, dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan manajerial 30 orang pengelola/pengurus Koperasi/KUD.
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga, dengan jumlah anggaran Rp.104.525.000,- realisasi keuangan Rp.104.525.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan kerjasama antar lembaga dalam pembinaan koperasi, olehnya itu telah dilakukan pembinaan bersama antara pemerintah Kota Palopo dengan BUKOPIN kepada 273 koperasi, melalui adanya sinergitas antar lembaga (Pemerintah kota Palopo bersama BUKOPIN) dalam pembinaan koperasi.
 - b. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah, dengan jumlah anggaran Rp. 222.950.000,- realisasi keuangan Rp.222.950.000,- (100%), realisasi fisik 100%, sasaran kegiatan adalah pembangunan sarana promosi hasil industri binaan, olehnya itu telah dibangun 1 unit galeri coklat di KIPA, dengan dimanfaatkannya galeri tersebut sebagai tempat promosi hasil coklat olahan oleh industri binaan.
- 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi, dengan jumlah anggaran Rp.40.500.000,- realisasi

- keuangan Rp.40.292.000,- (99,49%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan koordinasi antara daerah, olehnya itu telah mengikuti rapat koordinasi regional maupun nasional tentang kebijakan dan program pembangunan koperasi, dengan meningkatnya koordinasi pusat daerah maupun antar daerah.
- b. Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi, dengan jumlah anggaran Rp.27.435.000,- realisasi keuangan Rp.27.435.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah evaluasi/penilaian koperasi, olehnya itu telah dilakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian peringkat kepada 274 koperasi, dengan terdapat 198 kopersi yang masih aktif dan 76 koperasi yang sudah tidak aktif.

16. Urusan Wajib Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Kota Palopo dan Kantor Pelayanan Terpadu.

16.1. Urusan Wajib Badan Penanaman Modal Daerah

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Antara Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA.
 - b. Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.
 - c. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - d. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi.
 - e. Penyelenggaraan Pameran Investasi.
 - f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 2). Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi dengan kegiatan :
 - a.** Kajian kebijakan penanaman modal.
 - b.** Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha Tertentu Dalam Rangka Penanaman Modal.
- 3). Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Sosialisasi Kebijakan Investasi Daerah.

b Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan :

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, terdiri atas 6

kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Koordinasi Antara Lembaga Dalam Pegendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA, dengan jumlah anggaran Rp.10.600.000,- realisasi keuangan Rp.10.600.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyelesaian permasalahan penanaman modal, olehnya itu telah dilakukan fasilitasi dalam rangka penyelesaian 4 masalah penanaman modal di kota Palopo, dengan tuntasnya permasalahan tersebut di atas sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Kota Palopo.
- b. Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha, dengan jumlah anggaran Rp.169.738.300,- realisasi keuangan Rp.169.094.000,- (99,62%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan temu wirausaha, olehnya itu telah dilakukan 1 kali pertemuan antar para pelaku usaha sebanyak 800 orang dalam rangka memajukan dunia usaha di Kota Palopo, melalui dunia usaha/investasi telah mulai tumbuh dan berkembang di Kota Palopo.
- c. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan jumlah anggaran Rp.13.700.000,- realisasi keuangan Rp.13.700.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam bidang penanaman modal, olehnya itu telah dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal selama 4 triwulan, dengan adanya laporan pelaksanaan kegiatan selama 4 triwulan.
- d. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi, dengan jumlah anggaran Rp.52.085.501,- realisasi keuangan Rp.52.085.501,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan

adalah peningkatan kemampuan SDM dan kinerja aparatur, olehnya itu telah diutus 7 orang staf lingkup Badan Penanaman Modal untuk mengikuti diklat selama 5 (lima) hari di BPKM Indonesia Jakarta dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Cimahi dan Ciamis, melalui pelayanan perizinan investasi lebih meningkat kualitas dan kuantitasnya.

- e. Penyelenggaraan Pameran Investasi, dengan jumlah anggaran Rp.175.440.000,- realisasi keuangan Rp.175.302.900,- (99,92%), realisasi fisik (100%), sasaran dari kegiatan tersebut adalah promosi investasi, olehnya itu telah dilakukan pameran sebanyak 4 kali dalam rangka promosi potensi wilayah dan peluang investasi di Kota Palopo, melalui beberapa investor berdatangan ke Kota Palopo dan diantara mereka telah ada yang melakukan MOU dengan Pemerintah Kota Palopo.
 - f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran Rp.76.400.000,- realisasi keuangan Rp.76.400.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan tersebut adalah pemantauan terhadap penerbitan izin prinsip, olehnya itu telah dilakukan monitoring kegiatan sebanyak 120 kali untuk memantau proses penerbitan izin prinsip investasi, melalui proses penerbitan izin prinsip investasi telah berjalan sesuai ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Kajian Kebijakan Penanaman Modal, dengan jumlah anggaran Rp.34.700.000,- realisasi keuangan Rp.34.650.000,- (99,86%), realisasi fisik (100%), sasaran dari kegiatan ini adalah melakukan kajian terhadap kebijakan penanaman modal, olehnya itu telah dilaksanakan kajian terkait kebijakan penanaman modal di Kota Palopo, dengan lahirnya satu naskah akademik tentang hasil kajian

kebijakan penanaman modal yang berfungsi sebagai salah satu bahan rujukan untuk merencanakan kebijakan lebih lanjut.

- b. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha Tertentu Dalam Rangka Penanaman Modal, dengan jumlah anggaran Rp.124.340.000,- realisasi keuangan Rp.124.340.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pelayanan izin usaha tertentu, olehnya itu telah dilaksanakan pelayanan perizinan terhadap semua jenis usaha yang dipersyaratkan mempunyai izin, melalui realisasi penerbitan izin usaha mencapai 107 izin (89,17 %) dari target yaitu 120 izin. Meskipun pada tahun 2014 ini pernebitan izin tidak mencapai target tetapi realisasi tahun 2014 lebih tinggi dari pada realisasi tahun sebelumnya.

- 3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kebijakan investasi daerah, dengan jumlah anggaran Rp.25.500.000,- realisasi keuangan Rp.21.000.000,- (82,35%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyamaan persepsi/pemahaman terhadap kebijakan investasi daerah, olehnya itu telah dilakukan sosialisasi kebijakan investasi daerah sebanyak 1 kali kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang, dengan sebagai besar dari peserta telah memahami kebijakan investasi daerah Kota Palopo dengan baik.

16.2. Urusan Wajib Kantor Pelayanan Terpadu

a. Program dan kegiatan

- 1) Program Pengembangan Pelayanan Perizinan, dengan kegiatan :
 - a. Sosialisasi Kebijakan Perizinan
 - b. Fasilitasi Kemudahan Pelayanan Perizinan
 - c. Fasilitasi Permasalahan Proses Perizinan
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - e. Fasilitasi Kemudahan Non Perizinan

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan :

- 1) Program Pengembangan Pelayanan Perizinan, terdiri atas 5 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Kebijakan Perizinan, dengan jumlah anggaran

Rp.33.750.000,- realisasi keuangan Rp.33.750.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan perizinan Kota Palopo, olehnya itu telah dilaksanakan 5 (lima) kali sosialisasi tentang kebijakan perizinan Kota Palopo, dengan sebagian besar pelaku usaha telah memahami kebijakan perizinan Kota Palopo sehingga permohonan izin usaha dari masyarakat semakin meningkat.

- b. Fasilitasi Kemudahan Pelayanan Perizinan, dengan jumlah anggaran Rp.280.715.000,- realisasi keuangan Rp.276.234.550,- (98,40%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah kelancaran/kemudahan dalam pengurusan perizinan, olehnya itu telah dilaksanakan fasilitasi (berupakunjungan/pengecekan/penyederhanaan proses) untuk kemudahan pengurusan izin usaha selama 12 bulan, melalui permohonan izin usaha dari masyarakat semakin meningkat setiap tahun.
- c. Fasilitasi Permasalahan Proses Perizinan, dengan jumlah anggaran Rp.47.835.000,- realisasi keuangan Rp.45.061.900,- (94,20%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyelesaian permasalahan dalam proses perizinan, olehnya itu telah dilaksanakan fasilitasi (berupa kunjungan/pengecekan/penyederhanaan proses) untuk penyelesaian permasalahan perizinan selama 12 (bulan), dengan diselesaikannya seluruh permasalahan perizinan yang selama ini menjadi hambatan dalam pencapaian target penerbitan izin usaha.
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran Rp.102.900.000,- realisasi keuangan Rp.102.474.250,- (99,59%) dan realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, olehnya itu telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan selama 12 bulan, melalui laporan

data informasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 2014.

- e. Fasilitasi Kemudahan Non Perizinan, dengan jumlah anggaran Rp.33.550.000,- realisasi keuangan Rp.33.472.400,- (99,77%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah kelancaran/kemudahan dalam pengurusan non perizinan, olehnya itu telah dilaksanakan fasilitasi untuk kemudahan pengurusan non perizinan selama 12 bulan berupa tanda daftar gudang dan perusahaan, melalui permohonan untuk legalitas non perizinan seperti TDP,TDG semakin meningkat.

17. Urusan Wajib Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, terdiri atas program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1). Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan :
 - a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.
- 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
- 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah, dengan jumlah anggaran Rp.191.293.200,- realisasi keuangan Rp.191.293.200,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pelestarian dan aktualisasi nilai budaya, olehnya itu telah dilakukan karnaval budaya 1 kali, pemilihan anak dara – kallolo 1 kali dan maccera tasi 1 kali sebagai upaya pelestarian dan aktualisasi nilai budaya Kota Palopo.
- 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah, dengan jumlah anggaran Rp.25.000.000,- realisasi keuangan Rp.24.620.000,- (98,48%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan

adalah pengelolaan kekayaan budaya, olehnya itu telah disusun Ranperda pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

- 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, dengan jumlah anggaran Rp.261.750.000,- realisasi keuangan Rp.259.257.900,- (99,05%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengelolaan keragaman budaya, olehnya itu telah dilaksanakan lomba nyanyi solo tingkat SD 1 kali dan tingkat SKPD 1 kali, perlombaan gita bahana 1 kali, kema seni (lomba tari) 1 kali.
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, dengan jumlah anggaran Rp.140.000.000,- realisasi keuangan Rp.139.940.200,- (99,96%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah keikutsertaan dalam even festival budaya nusantara, olehnya itu telah ikut serta dalam Festival Keraton Nusantara (FKN) sebanyak 1 kali dengan 28 orang peserta yang dilaksanakan di Kesultanan Bima NTB.

18. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo, terdiri atas program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, dengan kegiatan :
 - a. Pendataan potensi kepemudaan.
 - b. Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Kepemudaan.
- 2) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan Orgnisasi Kepemudaan
 - b. Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan
 - c. Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organusasi Pemuda
 - d. Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda
 - e. Pembinaan Pemuda Pelapor Keamanan Lingkungan
 - f. Pameran Prestasi Karya Pemuda
 - g. Peningkatan Peran serta Organisasi Kepemudaan.
- 3) Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, dengan Kegiatan :

- a. Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda.
- 4) Program Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, dengan Kegiatan:
 - a. Pemberian Penyuluh tentang bahaya narkoba bagi pemuda.
- 5) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
 - b. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah.
 - c. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi
 - d. Penyelenggaraan kompetensi olahraga.
 - e. Pengembangan olahraga rekreasi
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan :

- 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, yang terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pendataan Potensi Kepemudaan. dengan jumlah anggaran Rp.27.320.000,- realisasi keuangan Rp.27.320.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah tersusunnya profil pemuda dan olahraga.
 - b. Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Kepemudaan, dengan jumlah anggaran Rp.65.700.000,- realisasi keuangan Rp.65.648.200,- (99,92%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Kepemudaan.
- 2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, yang terdiri atas 7 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pembinaan organisasi kepemudaan, dengan jumlah anggaran Rp.310.000.000,- realisasi keuangan Rp.309.883.400,- (99,96%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah terbinanya pemuda dalam diklat paskibraka.
 - b. Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan, dengan jumlah anggaran Rp 51.676.000,- realisasi keuangan Rp.51.676.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah bakti sosial

kepemudaan.

- c. Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda, dengan jumlah anggaran Rp.22.100.000,- realisasi keuangan Rp.22.100.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda.
 - d. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda, dengan jumlah anggaran Rp.29.135.000,- realisasi keuangan Rp.29.135.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah lomba.
 - e. Pembinaan pemuda pelapor keamanan lingkungan. dengan jumlah anggaran Rp.29.350.000,- realisasi keuangan Rp.29.350.000,- (100%), realisasi fisik(100%), sasaran kegiatan adalah pemuda pelopor keamanan lingkungan.
 - f. Pameran prestasi karya pemuda, dengan jumlah anggaran Rp.113.000.000,- realisasi keuangan Rp.113.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pameran.
 - g. Peningkatan Peran Serta Organisasi Kepemudaan, dengan jumlah anggaran Rp.142.000.000,- realisasi keuangan Rp.142.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peran serta organisasi kepemudaan.
- 3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda , yang terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut:
- a. Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda, dengan jumlah anggaran Rp.405.000.000,- realisasi keuangan Rp.404.920.600,- (99,98%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan keterampilan pemuda.
- 4) Program Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pemberian penyuluh tentang bahaya narkoba bagi pemuda, dengan jumlah anggaran Rp.46.450.000,- realisasi keuangan

Rp.46.450.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyuluhan bagi pemuda tentang bahaya narkoba.

5) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, terdiri atas 5 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga, dengan jumlah anggaran Rp.58.240.000,- realisasi keuangan Rp.58.240.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga.
 - b. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah, dengan jumlah anggaran Rp.696.000.000,- realisasi keuangan Rp.695.966.400,- (99,98%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan juara liga pendidikan indonesia.
 - c. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi, dengan jumlah anggaran Rp.137.360.000,- realisasi keuangan Rp.131.430.000,- (95,68%), realisasi fisik (96%), sasaran kegiatan adalah peningkatan Kesegaran jasmani dan rekreasi bagi para pemuda.
 - d. Penyelenggaraan kompetensi olahraga, dengan jumlah anggaran Rp.235.300.000,- realisasi keuangan Rp.234.872.100,- (99,92%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah juara POPDA.
 - e. Pengembangan Olahraga rekreasi, dengan jumlah anggaran Rp.35.800.000,- realisasi keuangan Rp 35.800.000,-(100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengembangan olahraga rekreasi bagi pemuda.
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, yang terdiri atas kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, dengan jumlah anggaran Rp.610.370.000,- realisasi keuangan Rp.610.123.600,- (99,99%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah biaya pembangunan sarana dan prasarana.

19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri meliputi Dinas Kesbang Linmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

19.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan kegiatan :
 - a. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
 - b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

- 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (KOMINDA).
- 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
 - b. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat.
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :
 - a. Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan kerjasama dengan forum kewaspadaan dini masyarakat.
 - b. Tim terpadu penanganan gangguan keamanan.
- 6) Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :
 - a. Penyuluhan kepada masyarakat.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Evaluasi dan penelitian bantuan keuangan partai politik peserta pemilu.
 - d. Posko pengendalian dan monitoring/evaluasi stabilitas polkam pemilu legislatif.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan jumlah anggaran Rp.170.700.000,- realisasi keuangan Rp.170.699.900,- (100%), dan realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pelatihan dasar kelinmasan, dan pelatihan dasar kelinmasan sebanyak 2 angkatan.
 - b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dengan jumlah anggaran Rp.302.100.000,- realisasi keuangan Rp.302.100.000,- (100%), dan realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah sinkronisasi tugas dalam rangka stabilitas multi sektor, dan sinkronisasi tugas dalam rangka stabilitas multi sektor dengan pimpinan daerah selama 12 bulan.
- 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (KOMINDA), dengan jumlah anggaran Rp.39.800.000,- realisasi keuangan Rp.23.742.900,- (59,66%), dan realisasi fisik (60%), sasaran kegiatan adalah kantrantibmas dan

- pengecahan tindak kejahatan, dan peningkatan kantrantibmas dan pengecahan tindak kejahatan selama 4 triwulan di 9 kecamatan.
- 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan toleransi dan kerukukan dalam kehidupan beragama, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.41.800.000,- realisasi keuangan Rp.41.200.000,- (98,56%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pertemuan pengurus FKUB, dan pertemuan pengurus FKUB selama 4 triwulan di 9 kecamatan.
 - b. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.42.200.000,- realisasi keuangan Rp.25.938.395,- (61,47%), realisasi fisik (62%), sasaran kegiatan adalah pertemuan pengurus FPK, dan pertemuan pengurus FPK selama 4 triwulan di 9 kecamatan.
 - 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.19.200.000,- realisasi keuangan Rp.19.199.900,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemahaman 4 pilar kebangsaan, dan pemahaman 4 pilar kebangsaan sebanyak 50 orang.
 - 5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kerjasama dengan forum kewaspadaan dini masyarakat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.43.350.000,- realisasi keuangan Rp.43.350.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah kewaspadaan dalam masyarakat, dan kewaspadaan dalam masyarakat selama 4 triwulan.
 - b. Tim terpadu penanganan gangguan keamanan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.59.000.000,- realisasi keuangan Rp.57.348.800,- (97,20%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah situasi yang kondusif, dan situasi yang kondusif selama 4 triwulan.
 - 6) Program Pendidikan Politik Masyarakat, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyuluhan kepada masyarakat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi keuangan Rp.20.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah bimtek penelitian bantuan keuangan kepada parpol, dan bimtek penelitian bantuan keuangan kepada parpol sebanyak 60 orang.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.43.550.000,- realisasi keuangan Rp.43.550.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah informasi dan data, serta tersedianya inventarisasi dan verifikasi ormas.

- c. Evaluasi dan penelitian bantuan keuangan partai politik peserta pemilu, dengan jumlah anggaran Rp.20.400.000,- realisasi keuangan Rp.20.399.950,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah bantuan keuangan kepada parpol, dan bantuan keuangan kepada parpol selama 12 bulan.
- d. Posko pengendalian dan monitoring/evaluasi stabilitas polkam pemilu legislatif, DPD dan pilpres, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.43.900.000,- realisasi keuangan Rp.43.899.900,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah stabilitas polkam, dan stabilitas polkam selama 5 bulan di 48 kelurahan.

19.2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - a. Pengamanan / Penjagaan Aset Pemerintah.
 - b. Penindakan dan penyidikan Penyelenggaraan Perda.
- 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
 - b. Pengendalian Kantrantibmas dan Tindak Kriminal.
 - c. Pengamanan, Pengawasan dan Patroli Wilayah.
 - d. Penyusunan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pengamanan / Penjagaan Aset Pemerintah, dengan jumlah anggaran Rp.560.600.000,- realisasi keuangan Rp.560.600.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah terjaganya aset-aset pemerintah Kota Palopo.
 - b. Penindakan dan penyidikan Penyelenggaraan Perda, dengan jumlah anggaran Rp.49.275.000,- realisasi keuangan Rp.6.000.000,- (12,18%), dan realisasi fisik (13%), sasaran kegiatan adalah terlaksananya penindakan dan penyidikan pelanggaran Perda.
- 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, dengan jumlah anggaran Rp.10.000.000,- realisasi keuangan Rp.2.000.000,- (20,00%), realisasi fisik (20%).
 - b. Pengendalian Kantrantibmas dan Tindak Kriminal, dengan jumlah anggaran Rp.859.700.000,- realisasi keuangan Rp.842.195.000,- (97,96%), realisasi fisik (100%).

- c. Pengamanan, Pengawasan dan Patroli Wilayah, dengan jumlah anggaran Rp.659.800.000,- realisasi keuangan Rp.610.700.000,- (92,56%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah honor tim pelaksana, tim lapangan/sekretariat, BBM, jasa pelayanan lainnya.
- d. Penyusunan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban, dengan jumlah anggaran Rp.98.634.000,- realisasi keuangan Rp.93.694.000,- (94,99%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah tim penyusun draft ranperda dan naskah akademik dengan tersedianya penegakan Perda.

19.3. Penanggulangan Bencana

a. Program dan Kegiatan :

- 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Pencegahan Dini Bencana Alam.
 - b. Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam.
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan bencana Alam.
 - e. Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam.
 - f. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana.
 - g. Rehabilitasi dan Konstruksi Kawasan Bencana.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Pencegahan Dini Bencana Alam dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 77.360.000,- realisasi keuangan Rp.77.356.000,- (99,99 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah berupa pembangunan 1 unit pos titik pantau kejadian bencana alam.
 - b. Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 38.350.000,- realisasi keuangan Rp. 38.350.000,- (100 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah berupa sosialisasi penanggulangan bencana alam.

- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 36.060.000,- realisasi keuangan Rp.36.039.000,- (100 %), realisasi fisik (100%).
- d. Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan bencana Alam dengan jumlah anggaran sebesar Rp.422.540.000,- realisasi keuangan Rp. 421.460.000,- (99,70 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah berupa operasionalisasi tim reaksi cepat penanggulangan bencana daerah.
- e. Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 96.575.000,- realisasi keuangan Rp. 96.355.000,- (99,77 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah terlaksananya pelatihan tim reaksi cepat penanggulangan bencana dan pelatihan DALA yang diikuti oleh seluruh SKPD se Kota Palopo.
- f. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 39.500.000,- realisasi keuangan Rp.39.396.000,- (99,90%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah berupa terpeliharanya unit-unit kendaraan operasional penanggulangan bencana.
- g. Rehabilitasi dan Konstruksi Kawasan Bencana, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 53.405.000,- realisasi keuangan Rp.53.404.920,- (80 %), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyaluran bantuan bahan rumah untuk korban kejadian bencana.

20. Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dilaksanakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dengan satuan kerja perangkat daerah, Sekertariat daerah, Sekertariat Dewan, Dinas P2KAD, Inspektorat Daerah dan Kecamatan.

20.1. Sekretariat Daerah

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan

kegiatan :

- a. Sosialisasi pembinaan lingkungan sosial dan perlindungan konsumen.
- 2) Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan kegiatan :
 - a. Dialog dan audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.
 - b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non dapertemen/luar negeri.
 - c. Rapat koordinasi Unsur MUSPIDA.
 - d. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah.
 - e. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
- 3) Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang komunikasi dan informasi, dengan kegiatan :
 - a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.
- 4) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media, dengan kegiatan :
 - a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
 - b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - c. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.
 - d. Workshop Penyebarluasan Informasi Kerjasama Mass Media.
- 5) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, dengan kegiatan :
 - a. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya.
 - b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
 - c. Penanganan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) pemerintah daerah.
- 6) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
 - b. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.
- 7) Program Penataan peraturan perundang – undangan, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang – undangan.
 - b. Legalisasi rancangan peraturan perundang – undangan.
 - c. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang – undangan.
 - d. Publikasi peraturan perundang – undangan.
 - e. Kajian peraturan perundang – undangan daerah terhadap peraturan perundang – undangan yang baru.
 - f. Penataan kelembagaan.
 - g. Penyusunan tupoksi serta uraian tugas.
 - h. Sosialisasi tata naskah dinas.
 - i. Pengelolaan administrasi kepegawaian.

- 8) Program Penataan daerah otonomi baru, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi.
- 9) Program Perencanaan pengadaan barang dan jasa, dengan kegiatan :
 - a. Sosialisasi/ bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.
 - b. Penyelenggaraan administrasi pengadaan barang dan jasa.
 - c. Evaluasi, monitong dan pengendalian pengadaan barang dan jasa.
 - d. Peningkatan sistem informasi E-Procurement.
- 10) Program pengendalian / pengawasan dan pendataan potensi perekonomian, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan penertiban izin usaha.
 - b. Pemetaan potensi ekonomi untuk mendorong pengembangan perekonomian.
 - c. Monitoring evaluasi dan pelaporan.
 - d. Pendataan arus barang keluar daerah.
- 11) Program Peningkatan pelayanan pemerintahan, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dan kelurahan.
 - b. Sosialisasi pelaksanaan pemilu / pemilukada.
 - c. Koordinasi pelaksanaan Kantramtibmas.
 - d. Bimbingan teknis kepada Pemerintahan.
 - e. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 12) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS.
- 13) Program Peningkatan sarana dan prasarana DAK bidang pemerintahan, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi pembinaan lingkungan sosial dan perlindungan konsumen, dengan jumlah anggaran Rp.1.175.759.000,- realisasi keuangan Rp.1.175.557.100,- (99,98%), realisasi fisik (100%).
- 2) Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, terdiri atas 5 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Dialog dan audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.58.000.000,- realisasi keuangan Rp.35.182.500,- (60,66%), realisasi fisik (100%).
 - b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri, dengan jumlah anggaran

- sebesar Rp.1.233.400.000,- realisasi keuangan Rp.1.166.517.146,- (94,58%), realisasi fisik (100%).
- c. Rapat koordinasi Unsur MUSPIDA, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi keuangan Rp.0,- (0%).
 - d. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah, dengan jumlah anggaran Rp.10.000.000,- realisasi keuangan Rp.0,- (0%).
 - e. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan jumlah anggaran Rp.1.650.000.000,- realisasi keuangan Rp.1.549.901.856,- (93,93%), realisasi fisik (100%).
- 3) Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang komunikasi dan informasi, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi, dengan jumlah anggaran Rp. 58.450.000,- realisasi keuangan Rp.46.153.300,- (78,96%), realisasi fisik (100%).
- 4) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 1.003.750.000,- realisasi keuangan Rp.1.001.209.350,- (99,75%), realisasi fisik (100%).
 - b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 97.600.000,- realisasi keuangan Rp.91.848.300,- (94,11%), realisasi fisik (100%).
 - c. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, dengan jumlah anggaran Rp. 294.000.000,- realisasi keuangan Rp.294.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - d. Workshop Penyebarluasan Informasi Kerjasama Mass Media, dengan jumlah anggaran Rp. 44.060.600,- realisasi keuangan Rp.44.000.000,- (99,86%), realisasi fisik (100%).
- 5) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
- a. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya, dengan jumlah anggaran Rp.231.256.000,-realisasi keuangan Rp.153.002.000,- (66,16%), realisasi fisik (67%).
 - b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, dengan jumlah anggaran Rp.59.667.500,- realisasi keuangan Rp.53.820.000,- (90,20%), realisasi fisik (100%).
 - c. Penanganan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) pemerintah daerah, dengan jumlah anggaran Rp.215.250.000,- realisasi keuangan Rp.198.636.400,- (92,28%), realisasi fisik (100%).

- 6) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, dengan jumlah anggaran Rp.319.374.500,- realisasi keuangan Rp.317.774.400,- (99,50%), realisasi fisik (100%).
 - b. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial, dengan jumlah anggaran Rp.1.941.943.000,- realisasi keuangan Rp.1.938.509.700,- (99,82%), realisasi fisik (100%).
- 7) Program Penataan peraturan perundang – undangan, terdiri atas 9 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang – undangan, jumlah anggaran Rp.17.900.000,- realisasi keuangan Rp.11.400.000,- (63,69%), realisasi fisik (64%).
 - b. Legalisasi rancangan peraturan perundang – undangan, dengan jumlah anggaran Rp.190.700.000,- realisasi keuangan Rp.184.934.000,- (96,98%), realisasi fisik (100%).
 - c. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang – undangan, dengan jumlah anggaran Rp.112.050.000,- realisasi keuangan Rp.91.150.000,- (81,35%), realisasi fisik (100%).
 - d. Publikasi peraturan perundang – undangan, dengan jumlah anggaran Rp.76.880.000,- realisasi keuangan Rp.75.580.000,- (98,31%), realisasi fisik (100%).
 - e. Kajian peraturan perundang – undangan daerah terhadap peraturan perundang – undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang – undangan daerah, dengan jumlah anggaran Rp.18.565.000,- realisasi keuangan Rp.16.865.000,- (90,84%), realisasi fisik (100%).
 - f. Penataan kelembagaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.245.475.000,- realisasi keuangan Rp.245.455.000,- (99,99%), realisasi fisik (100%).
 - g. Penyusunan tupoksi serta uraian tugas, dengan jumlah anggaran Rp.13.200.000,- realisasi keuangan Rp.13.200.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - h. Sosialisasi tata naskah dinas, dengan jumlah anggaran Rp.20.357.000,- realisasi keuangan Rp.20.307.000,- (99,75%), realisasi fisik (100%).
 - i. Pengelolaan administrasi kepegawaian, dengan jumlah anggaran Rp.286.699.500,- realisasi keuangan Rp.284.679.000,- (99,30%), realisasi fisik (100%).
- 8) Program Penataan daerah otonomi baru, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi, dengan jumlah anggaran Rp.36.244.000,- realisasi keuangan Rp.28.744.000,- (79,31%), realisasi fisik (100%).
- 9) Program Perencanaan pengadaan barang dan jasa, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Sosialisasi/ bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah anggaran Rp.73.671.000,- realisasi keuangan Rp.73.280.000,- (99,47%), realisasi fisik (100%).
 - b. Penyelenggaraan administrasi pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah anggaran Rp.223.891.000,- realisasi keuangan Rp.222.576.000,- (99,41%), realisasi fisik (100%).
 - c. Evaluasi, monitong dan pengendalian pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah anggaran Rp.163.478.000,- realisasi keuangan Rp.162.201.000,- (99,22%), realisasi fisik (100%).
 - d. Peningkatan sistem informasi E-Procurement, dengan jumlah anggaran Rp.305.800.000,- realisasi keuangan Rp.304.842.230,- (99,69%), realisasi fisik (100%).
- 10) Program pengendalian / pengawasan dan pendataan potensi perekonomian, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan penertiban izin usaha, dengan jumlah anggaran Rp.233.961.500,- realisasi keuangan Rp.232.005.150,- (99,16%), realisasi fisik (100%).
 - b. Pemetaan potensi ekonomi untuk mendorong pengembangan perekonomian, dengan jumlah anggaran Rp.49.293.000,- realisasi keuangan Rp.47.858.000,- (97,09%), realisasi fisik (100%).
 - c. Monitoring evaluasi dan pelaporan, dengan jumlah anggaran Rp.59.080.500,- realisasi keuangan Rp.58.154.400,- (98,43%), realisasi fisik (100%).
 - d. Pendataan arus barang keluar daerah, dengan jumlah anggaran Rp.62.799.000,- realisasi keuangan Rp.61.600.500,- (98,09%), realisasi fisik (100%).
- 11) Program Peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terdiri atas 5 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan jumlah anggaran Rp.1.905.212.000,- realisasi keuangan Rp.1.838.101.000,- (96,48%), realisasi fisik (100%).
 - b. Sosialisasi pelaksanaan pemilu / pemilukada, dengan jumlah anggaran Rp.121.700.000,- realisasi keuangan Rp.121.698.500,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - c. Koordinasi pelaksanaan Kantramtibmas, Dengan jumlah anggaran Rp.62.215.500,- realisasi keuangan Rp.49.685.000,- (79,86%), realisasi fisik (100%).

- d. Bimbingan teknis kepada Pemerintahan, Kecamatan dan Kelurahan, dengan jumlah anggaran Rp.151.134.000,- realisasi keuangan Rp.0,- (0%).
 - e. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan jumlah anggaran Rp.120.697.000,- realisasi keuangan Rp.102.807.250,- (85,18%), realisasi fisik (100%).
- 12) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.62.865.500,- realisasi keuangan Rp.56.760.500,- (90,29%), realisasi fisik (100%).
- 13) Program Peningkatan sarana dan prasarana DAK bidang pemerintahan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.782.412.800,- realisasi keuangan Rp.3.546.743.779,- (74,16%), realisasi fisik (100%).

20.2. Sekretariat DPRD

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan kegiatan :
- a. Pembahasan rancangan peraturan daerah.
 - b. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat serta tokoh agama.
 - c. Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan.
 - d. Rapat-rapat paripurna.
 - e. Kegiatan Reses.
 - f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah.
 - g. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
- 2) Program Penataan Peraturan Perundang – undangan, dengan kegiatan :
- a. Legislasi rancangan peraturan perundang – undangan.
 - b. Publikasi peraturan perundang – undangan.
 - c. Kajian peraturan perundang – undangan daerah terhadap peraturan perundang – undangan yang baru.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri atas 7 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pembahasan rancangan peraturan daerah, dengan jumlah anggaran Rp.1.054.547.000,- realisasi keuangan Rp.1.037.168.166,- (98,35%), dan realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peraturan-peraturan daerah dengan tersedianya pembahasan rancangan peraturan daerah melalui terbitnya peraturan daerah.

- b. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat serta tokoh agama, dengan jumlah anggaran Rp.18.750.000,- realisasi keuangan Rp.16.250.000,- (86,67%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah persamaan persepsi antara DPRD dengan pemerintah daerah dan tokoh, dengan tersedianya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan agama, melalui penyelesaian permasalahan yang muncul.
 - c. Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan, dengan jumlah anggaran Rp.106.150.000,- realisasi keuangan Rp.99.705.000,- (93,93%), dan realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah keputusan-keputusan lembaga DPRD, dengan tersedianya rapat-rapat alat kelengkapan dewan, melalui fungsi alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tupoksinya.
 - d. Rapat-rapat paripurna, dengan jumlah anggaran Rp.172.750.000,- realisasi keuangan Rp.162.470.000,- (94,05%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah keputusan DPRD dan peraturan daerah, dengan tersedianya rapat-rapat paripurna, melalui keputusan bersama antara legislatif dan eksekutif.
 - e. Kegiatan Reses, dengan jumlah anggaran Rp.800.400.000,- realisasi keuangan Rp.796.653.750,- (99,53%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah menyerap aspirasi masyarakat, dengan tersedianya kepentingan publik, melalui Rapat - Rapat Paripurna.
 - f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, dengan jumlah anggaran Rp.19.237.500,- realisasi keuangan Rp.15.150.000,- (78,75%), dan realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah menyerap aspirasi masyarakat, dengan adanya Reses pada daerah pilihan anggota DPRD, serta terakomodirya kepentingan publik.
 - g. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.131.310.500,- realisasi keuangan Rp.3.121.808.046,- (99,70%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah keterlibatan publik dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan politik, dengan adanya kunjungan kerja DPRD di dalam daerah, serta terpantaunya wilayah pembinaan supervisi di lapangan.
- 2) Program Penataan Peraturan Perundang – undangan, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Legislasi rancangan peraturan perundang – undangan, dengan jumlah anggaran Rp.95.950.000,- realisasi keuangan Rp.93.092.250,- (97,02%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peraturan perundang-undangan, dengan tersedianya legislasi rancangan peraturan perundang-undangan, melalui rancangan peraturan perundang-undangan.

- b. Publikasi peraturan perundang – undangan, dengan jumlah anggaran Rp.55.000.000,- realisasi keuangan Rp.55.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peraturan perundang-undangan, dengan tersedianya peraturan perundang – undangan, melalui peraturan perundang - undangan untuk publik.
- c. Kajian peraturan perundang – undangan daerah terhadap peraturan perundang – undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang – undangan daerah, dengan jumlah anggaran Rp.61.100.000,- realisasi keuangan Rp.58.232.000,- (95,31%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah rancangan peraturan daerah inisiatif, dengan tersedianya kebijakan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, melalui penjelasan, keterangan atau naskah akademik rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD.

20.3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan standar satuan harga.
 - b. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
 - c. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.
 - d. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
 - e. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.
 - f. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - g. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - h. Penyusunan sistem informasi pengelola keuangan daerah.
 - i. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - j. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - k. Peningkatan manajemen asset/barang daerah.
 - l. Penyelenggaraan penyusunan laporan akuntansi.
 - m. Penyelenggaraan administrasi perbendaharaan daerah.
 - n. Penyelenggaraan pengendalian APBD.

- o. Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB.
 - p. Bimbingan teknis pengelolaan asset daerah.
 - q. Sistem informasi barang milik daerah.
 - r. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
 - s. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
 - t. Peningkatan Pelayanan Pengelolaan PBB dan BPHTB.
 - u. Penyusunan laporan asset daerah.
- 2) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan keuangan kabupaten/kota, dengan kegiatan :
- a. Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.
 - b. Pembinaan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah.
 - c. Pemberian fasilitas objek pajak daerah.
 - d. Pemberian fasilitas objek retribusi daerah.
 - e. Sosialisasi implementasi regulasi pendapatan daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, terdiri atas 21 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyusunan standar satuan harga, dengan jumlah anggaran Rp.77.080.000,- realisasi keuangan Rp.60.295.000,- (78,22%), realisasi fisik (100%).
 - b. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, dengan jumlah anggaran Rp.46.600.000,- realisasi keuangan Rp.45.495.500,- (97,63%), realisasi fisik (100%).
 - c. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD, dengan jumlah anggaran Rp.48.000.000,- realisasi keuangan Rp.42.946.500,- (89,47%), realisasi fisik (100%).
 - d. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dengan jumlah anggaran Rp.33.000.000,- realisasi keuangan Rp.31.985.500,- (96,93%), realisasi fisik (100%).
 - e. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan

APBD, dengan jumlah anggaran Rp.40.500.000,- realisasi keuangan Rp.39.709.500,- (98,05%), realisasi fisik (100%).

- f. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dengan jumlah anggaran Rp.101.200.000,- realisasi keuangan Rp.100.657.500,- (99,46%), realisasi fisik (100%).
- g. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dengan jumlah anggaran Rp.22.500.000,- realisasi keuangan Rp.22.500.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
- h. Penyusunan sistem informasi pengelola keuangan daerah, dengan jumlah anggaran Rp.179.600.000,- realisasi keuangan Rp.162.000.000,- (90,20%), realisasi fisik (100%).
- i. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, dengan jumlah anggaran Rp.46.500.000,- realisasi keuangan Rp.22.387.500,- (48,15%), realisasi fisik (49%).
- j. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, dengan jumlah anggaran Rp.92.200.000,- realisasi keuangan Rp.90.310.000,- (97,95%), realisasi fisik (100%).
- k. Peningkatan manajemen asset/barang daerah, dengan jumlah anggaran Rp.972.200.000,- realisasi keuangan Rp.726.591.740,- (74,74%), realisasi fisik (75%).
- l. Penyelenggaraan penyusunan laporan akuntansi, dengan jumlah anggaran Rp.839.500.000,- realisasi keuangan Rp.819.754.000,- (97,65%), realisasi fisik (100%).
- m. Penyelenggaraan administrasi perbendaharaan daerah, dengan jumlah anggaran Rp.912.500.000,- realisasi keuangan Rp.809.195.500,- (88,68%), realisasi fisik (100%).
- n. Penyelenggaraan pengendalian APBD, dengan jumlah anggaran

- Rp.742.400.000,- realisasi keuangan Rp.679.529.500,- (91,53%), realisasi fisik (100%).
- o. Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB, dengan jumlah anggaran Rp. 1.157.800.000,- realisasi keuangan Rp.1.147.365.000,- (99,10%), realisasi fisik (100%).
 - p. Bimbingan teknis pengelolaan asset daerah, intensifikasi pajak daerah, dengan jumlah anggaran Rp.128.000.000,- realisasi keuangan Rp.118.951.500,- (92,93%), realisasi fisik (100%).
 - q. Sistem informasi barang milik daerah, dengan jumlah anggaran Rp.250.500.000,- realisasi keuangan Rp.214.357.500,- (85,57%), realisasi fisik (100%).
 - r. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan daerah, dengan jumlah anggaran Rp.423.500.000,- realisasi keuangan Rp.371.343.350,- (87,68%), realisasi fisik (100%).
 - s. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan jumlah anggaran Rp.679.625.000,- realisasi keuangan Rp.650.145.000,- (95,66%), realisasi fisik (100%).
 - t. Peningkatan Pelayanan Pengelolaan PBB dan BPHTB, dengan jumlah anggaran Rp.597.943.000,- realisasi keuangan Rp.568.386.000,- (95,06%), realisasi fisik (100%).
 - u. Penyusunan laporan asset daerah, dengan jumlah anggaran Rp.135.800.000,- realisasi keuangan Rp.119.408.000,- (87,93%), realisasi fisik (100%).
- 2) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan keuangan kabupaten/kota, terdiri atas 5 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.385.000.000,- realisasi keuangan Rp.371.294.598,- (96,44%), realisasi fisik (100%).
 - b. Pembinaan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah,

- dengan jumlah anggaran Rp.601.860.000,- realisasi keuangan Rp.556.788.500,- (92,51%), realisasi fisik (100%).
- c. Pemberian fasilitas objek pajak daerah, dengan jumlah anggaran Rp.598.970.000,- realisasi keuangan Rp.550.361.100,- (91,88%), realisasi fisik (100%).
 - d. Pemberian fasilitas objek retribusi daerah, dengan jumlah anggaran Rp.428.874.000,- realisasi keuangan Rp.382.355.500,- (89,15%), realisasi fisik (100%).
 - e. Sosialisasi implementasi regulasi pendapatan daerah, dengan jumlah anggaran Rp.143.112.500,- realisasi keuangan Rp.57.865.000,- (40,43%), realisasi fisik (41%).

20.4. Inspektorat Daerah

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
 - b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
 - d. Inventarisasi Temuan Pengawasan.
 - e. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
 - f. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif.
 - g. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
 - h. Pemeriksaan Khusus.
- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan :
 - a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
 - b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.
- 3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan,

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdiri atas 8 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, dengan jumlah anggaran Rp.453.190.000,- realisasi keuangan Rp.449.260.000,-

(99,13%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemeriksaan kinerja/reguler dan evaluasi LAKIP terhadap SKPD yang telah ditentukan dalam PKPT Inspektorat, dengan jumlah laporan pemeriksaan kinerja/reguler SKPD dan evaluasi LAKIP, melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan laporan hasil evaluasi (LHE) sebanyak 35 LHP.

- b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan jumlah anggaran Rp.228.250.000,- realisasi keuangan Rp.228.190.000,- (99,97%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap yang dilimpahkan ke inspektorat, dengan jumlah LHP kasus, melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) kasus sebanyak 20 LHP.
- c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan jumlah anggaran Rp.37.400.000,- realisasi keuangan Rp.34.740.000,- (92,89%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan Kota Palopo, dengan jumlah laporan hasil reuiu, melalui laporan hasil reuiu (LHR) sebanyak 1 LHP.
- d. Inventarisasi Temuan Pengawasan, dengan jumlah anggaran Rp.9.500.000,- realisasi keuangan Rp.8.500.000,- (89,47%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah terinventarisasinya temuan LHP pengawasan APIP, dengan jumlah inventarisasi (rekapitulasi) temuan LHP APIP, melalui rekapitulasi temuan LHP pengawasan APIP sebanyak 2 keg.
- e. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, dengan jumlah anggaran Rp.30.600.000,- realisasi keuangan Rp.29.100.000,- (95,10%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah terpantaunya hasil temuan APIP, dengan jumlah tindak lanjut hasil temuan APIP, melalui tindak lanjut hasil temuan APIP sebanyak 2 keg.
- f. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif, dengan jumlah anggaran Rp.95.200.000,- realisasi keuangan Rp.77.200.000,- (81,09%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pembinaan pengawasan SKPD dalam tiap wilayah pengawasannya, dengan jumlah wilayah pembinaan pengawasan, melalui pembinaan pengawasan SKPD pada wilayah pengawasannya sebanyak 8 Keg.
- g. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, dengan jumlah anggaran Rp.86.050.000,- realisasi keuangan Rp.85.185.780,- (99,00%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah gelar pengawasan/evaluasi terkait temuan LHP yang telah ditindaklanjuti oleh tim tindak lanjut inspektorat, dengan tersedianya gelar pengawasan/evaluasi temuan hasil pengawasan, melalui pelaksanaan gelar pengawasan/evaluasi berkala terkait temuan LHP yang telah ditindaklanjuti.

- h. Pemeriksaan Khusus, dengan jumlah anggaran Rp.381.760.000,- realisasi keuangan Rp.379.170.000,- (99,32%), dan realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemeriksaan khusus dan pemeriksaan terpadu pada SKPD dan objek lainnya, dengan jumlah LHP, melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) terkait pemeriksaan khusus dan pemeriksaan terpadu sebanyak 52 LHP.
- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan jumlah anggaran Rp.253.890.000,- realisasi keuangan Rp.214.429.900,- (84,46%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (JFA dan JFPP), dengan jumlah JFA yang mengikuti pelatihan, melalui peningkatan profesionalisme aparatur pengawas (JFA dan JFPP) yang terlatih sebanyak 20 orang.
 - b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja, dengan jumlah anggaran Rp.75.000.000,- realisasi keuangan Rp.75.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja, dengan jumlah PNS yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan, melalui kualitas SDM dan pembentukan teknis pengawasan tenaga pemeriksa yang terlatih sebanyak 20 orang.
- 3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan jumlah anggaran Rp.7.800.000,- realisasi keuangan Rp.7.000.000,- (89,74%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah sistem dan prosedur pengawasan (Sisdur dan Kode Etik Pengawasan), dengan tersedianya pedoman kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (Sisdur dan Kode Etik Pengawasan), melalui kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (sisdur dan Kode Etik Pengawasan) inspektorat sebanyak 2 keg.

20.5. Kecamatan Kecamatan Wara

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas.
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum dan pemerintahan.
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan.

- d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas, dengan jumlah anggaran Rp.41.850.000,- realisasi keuangan Rp. 41.850.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum dan pemerintahan, dengan jumlah anggaran Rp.8.550.000,- realisasi keuangan Rp.8.550.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, dengan jumlah anggaran Rp.4.950.000,- realisasi keuangan Rp.4.950.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, dengan jumlah anggaran Rp.570.450.000,- realisasi keuangan Rp.489.853.874,- (85,87%), realisasi fisik (100%).

Kecamatan Wara Utara

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas.
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan.
 - d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas, dengan jumlah anggaran Rp.48.000.000,- realisasi keuangan Rp.48.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dengan jumlah anggaran Rp.19.200.000,- realisasi keuangan Rp.19.200.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, dengan jumlah anggaran Rp.16.300.000,- realisasi keuangan Rp.16.050.000,- (95,54%), realisasi fisik (100%).
 - d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, dengan jumlah anggaran Rp.527.300.000,- realisasi keuangan Rp.516.118.640,- (97,88%), realisasi fisik (100%).

Kecamatan Wara Selatan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas.
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan.
 - d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas, dengan jumlah anggaran Rp.27.600.000,- realisasi keuangan Rp.26.550.000,- (96,20%), realisasi fisik (100%).
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dengan jumlah anggaran Rp.8.400.000,- realisasi keuangan Rp.8.400.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, dengan jumlah anggaran Rp.8.400.000,- realisasi keuangan Rp.8.400.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, dengan jumlah anggaran Rp.347.400.000,- realisasi keuangan Rp.338.219.181,- (97,36%), realisasi fisik (100%).

Kecamatan Telluwanua

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas.
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan.
 - d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas, dengan jumlah anggaran Rp.52.200.000,- realisasi keuangan Rp.50.450.000,- (96,65%), realisasi fisik (100%).
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dengan jumlah anggaran Rp.27.000.000,- realisasi keuangan Rp.26.300.000,- (97,41%), realisasi fisik (100%).
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, dengan jumlah anggaran Rp.20.100.000,- realisasi keuangan Rp.20.100.000,- (100%), realisasi fisik (100%).

- d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, dengan jumlah anggaran Rp.587.000.000,- realisasi keuangan Rp.576.206.420,- (98,16%), realisasi fisik (100%).

Kecamatan Wara Barat

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas.
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan.
 - d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas, dengan jumlah anggaran Rp.41.400.000,- realisasi keuangan Rp.41.400.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dengan jumlah anggaran Rp.17.400.000,- realisasi keuangan Rp.17.400.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, dengan jumlah anggaran Rp.12.000.000,- realisasi keuangan Rp.12.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, dengan jumlah anggaran Rp.427.000.000,- realisasi keuangan Rp.420.407.000,- (98,46%), realisasi fisik (100%).

Kecamatan Wara Timur

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas.
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan.
 - d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1). Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas, dengan jumlah anggaran Rp.47.300.000,- realisasi keuangan Rp.47.300.000,- (100%), realisasi fisik (100%).

- b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dengan jumlah anggaran Rp.13.700.000,- realisasi keuangan Rp.13.700.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
- c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, dengan jumlah anggaran Rp.13.700.000,- realisasi keuangan Rp.13.700.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
- d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, dengan jumlah anggaran Rp.655.700.000,- realisasi keuangan Rp.636.496.402,- (97,07%), realisasi fisik (100%).

Kecamatan Mungkajang

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas.
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan.
 - d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1). Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas, dengan jumlah anggaran Rp.34.200.000,- realisasi keuangan Rp.34.200.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dengan jumlah anggaran Rp.14.400.000,- realisasi keuangan Rp.14.400.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, dengan jumlah anggaran Rp.14.400.000,- realisasi keuangan Rp.14.400.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, dengan jumlah anggaran Rp.331.800.000,- realisasi keuangan Rp.324.067.145,- (97,67%), realisasi fisik (100%).

Kecamatan Bara

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas.
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan.
 - d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1). Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas, dengan jumlah anggaran Rp.38.400.000,- realisasi keuangan Rp.37.350.000,- (97,27%), realisasi fisik (100%).
- b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dengan jumlah anggaran Rp.16.800.000,- realisasi keuangan Rp.16.800.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
- c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, dengan jumlah anggaran Rp.12.000.000,- realisasi keuangan Rp.12.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
- d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, dengan jumlah anggaran Rp.466.800.000,- realisasi keuangan Rp.464.163.350,- (99,44%), realisasi fisik (100%).

Kecamatan Sendana

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas.
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan.
 - d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1). Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi pelaksanaan kantramtibmas, dengan jumlah anggaran Rp.31.800.000,- realisasi keuangan Rp.31.800.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - b. Koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dengan jumlah anggaran Rp.12.600.000,- realisasi keuangan Rp.12.600.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, dengan jumlah anggaran Rp.12.600.000,- realisasi keuangan Rp.12.600.000,- (100%), realisasi fisik (100%).
 - d. Penyelenggaraan operasional kelembagaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, dengan jumlah anggaran Rp.335.750.000,- realisasi keuangan Rp.333.262.760,- (99,26%), realisasi fisik (100%).

21. Urusan Wajib Kepegawaian

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program pendidikan kedinasan, dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan penjenjangan struktural.
- 2) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah.

- b. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah.
- 3) Program pembinaan dan pengembangan aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Seleksi penerimaan CPNS.
 - b. Penempatan PNS.
 - c. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS.
 - d. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah.
 - e. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.
 - f. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.
 - g. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas.
 - h. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan.
 - i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - j. Seleksi ujian dinas dan penyesuaian ijasah.
 - k. Seleksi penerimaan calon mahasiswa IPDN dan STKS.
 - l. Pengambilan dan pengangkatan sumpah PNS.
 - m. Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program pendidikan kedinasan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan penjenjangan struktural, dengan jumlah anggaran Rp.438.930.000,- realisasi keuangan Rp.438.930.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah kompetensi sumber daya aparatur, dan jumlah pejabat eselon II dan III yang telah selesai mengikuti latpim sebanyak 8 orang.
- 2) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah, Jumlah anggaran Rp.350.757.600,- realisasi keuangan Rp.334.632.600,- (95,40%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah kompetensi sumber daya aparatur, melalui jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan, dengan terpenuhinya syarat pengangkatan CPNSD menjadi CPNS sebanyak 53 orang.
 - b. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah, Jumlah anggaran Rp.731.367.000,- realisasi keuangan Rp.690.456.350,- (94,41%), dan realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah kompetensi sumber daya aparatur, dan jumlah eselon IV yang telah selesai

mengikuti latpim IV sebanyak 40 orang.

- 3) Program pembinaan dan pengembangan aparatur, terdiri atas 13 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Seleksi penerimaan CPNS, dengan jumlah anggaran Rp.206.007.000,- realisasi keuangan Rp.189.383.050,- (91,93%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, dan jumlah SK penetapan NIP yang telah selesai dibuat sebanyak 53 orang.
 - b. Penempatan PNS, dengan jumlah anggaran Rp.159.667.000,- realisasi keuangan Rp.105.225.000,- (65,90%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, dan jumlah kegiatan mutasi yang telah terlaksana sebanyak 6 kegiatan.
 - c. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, dengan jumlah anggaran Rp.122.495.000,- realisasi keuangan Rp.108.946.900,- (88,94%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, dan jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit selama 2 periode (April dan Oktober) sebanyak 3300 SK.
 - d. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, dengan jumlah anggaran Rp.142.395.000,- realisasi keuangan Rp.141.028.000,- (99,04%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah sistem administrasi dan pengolahan data yang akurat, dan terpenuhinya data kepegawaian yang telah dibuat tersedia dalam dokumen sebanyak 7 dokumen.
 - e. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.19.768.000,- realisasi keuangan Rp.16.928.000,- (85,63%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, dan adanya penghargaan bagi PNS berprestasi sebanyak 100 orang.
 - f. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, dengan

jumlah anggaran Rp.50.200.000,- realisasi keuangan Rp.43.586.500,- (86,83%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan disiplin PNS, dan jumlah kasus-kasus yang telah selesai di proses sebanyak 15 orang.

- g. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dengan jumlah anggaran Rp.178.000.000,- realisasi keuangan Rp.169.000.000,- (94,94%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, dan jumlah mahasiswa yang PNS yang menerima beasiswa sebanyak 26 orang.
- h. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan, dengan jumlah anggaran Rp.16.250.000,- realisasi keuangan Rp.15.580.000,- (95,88%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, dan jumlah PNS yang lulus sertifikasi barang dan jasa sebanyak 50 orang.
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan jumlah anggaran Rp.80.208.000,- realisasi keuangan Rp.70.402.000,- (87,77%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan disiplin PNS, dan jumlah kegiatan rekap absen dan sidak jam kerja yang terlaksana sebanyak 2 kali.
- j. Seleksi ujian dinas dan penyesuaian ijasah, dengan jumlah anggaran Rp.34.900.000,- realisasi keuangan Rp.34.820.000,- (99,77%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, dan jumlah PNS yang lulus seleksi ujian dinas dan PI sebanyak 150 orang.
- k. Seleksi penerimaan calon mahasiswa IPDN dan STKS, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.350.000,- realisasi keuangan Rp.8.350.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, dan jumlah peserta yang lulus seleksi calon mahasiswa IPDN dan STKS sebanyak 50 orang.
- l. Pengambilan dan pengangkatan sumpah PNS, dengan jumlah

anggaran sebesar Rp.15.050.000,- realisasi keuangan Rp.14.735.000,- (97,91%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, dan jumlah PNS yang telah selesai mengikuti sumpah PNS sebanyak 53 orang.

- m. Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Daerah, dengan jumlah anggaran Rp.35.560.000,- realisasi keuangan Rp.28.795.000,- (80,98%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, dan jumlah PNS yang telah selesai mengikuti pelaksanaan dan pemahaman tupoksi bidang kepegawaian sebanyak 300 orang/2 keg.

B. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Pilihan Pertanian

Urusan pilihan Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo, dalam bentuk Program, kegiatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan :

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian.
 - c. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan.
- 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan :
 - a. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
 - b. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat.
- 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan.
 - b. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan.

- 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.
- 6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak.
 - b. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat.
 - c. Pengembangan Agribisnis Peternakan.
- 7) Program Peningkatan Produksi Peternakan, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna.
- 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pertanian, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan.
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan.
 - c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan :

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, dengan jumlah anggaran Rp.111.000.000,- realisasi keuangan Rp.111.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan kemampuan SDM kelompok tani, olehnya itu telah dilaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada 160 kelompok tani dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas. Hasil yang telah dicapai adalah sebagian besar kelompok tani telah menguasai teknologi peningkatan produksi dengan baik.
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan, dengan jumlah anggaran Rp.51.350.000,- realisasi keuangan Rp.45.600.000,- (88,80%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah updating data pertanian dan peternakan Kota Palopo, olehnya itu telah dilaksanakan pendataan statistik pertanian dan peternakan sebanyak 4 kali dalam setahun, dengan dimanfaatkannya data tersebut untuk

perencanaan, penelitian dan berbagai kepentingan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian, dengan jumlah anggaran Rp.109.200.000,- realisasi keuangan Rp.109.200.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengendalian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan agar lebih tepat sasaran, olehnya itu telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap optimalisasi lahan, pola SRI, perluasan areal hortikultura seluar 2000 Ha, melalui adanya laporan monitoring yang dijadikan bahan evaluasi kegiatan berjalan dan bahan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.
 - c. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan, dengan jumlah anggaran Rp.76.975.000,- realisasi keuangan Rp.75.575.000,- (98,18%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah optimalisasi pemanfaatan pekarangan, olehnya itu telah dilakukan penyediaan bibit hortikultura bibit sayuran, buah-buahan dan rempah untuk ditanam pada lahan pekarangan, serta bibit tersebut telah ditanam oleh masyarakat pada lahan pekarangan mereka dan telah dinikmati hasilnya, utamanya tanaman sayuran.
- 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah, dengan jumlah anggaran Rp.194.400.000,- realisasi keuangan Rp.194.400.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah promosi potensi dan hasil/produk daerah, peningkatan wawasan petugas dan KTNA dalam rangka membangun investasi dan kemitraan usaha, olehnya itu telah diikutsertakan 20 orang yang terdiri dari petugas dan KTNA sebagai peserta pada acara Pekan Nasional (PENAS) KTNA XIV di Kabupaten Malang Jawa Timur, melalui potensi dan produksi Kota Palopo baik produksi segar maupun olahan telah mulai dikenal oleh masyarakat diluar Kota Palopo.
 - b. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat, dengan jumlah anggaran

Rp.58.800.000,- realisasi keuangan Rp.58.800.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemantauan harga komoditi pertanian dan peternakan, olehnya itu telah dilakukan pemantauan perkembangan harga komoditi pertanian/peternakan ditingkat petani dan pasar pada setiap bulan, melalui adanya data informasi perkembangan harga komoditi setiap bulan untuk menjadi bahan pengendalian evaluasi dan pengendalian harga.

4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan jumlah anggaran Rp.5.233.842.100,- realisasi keuangan Rp.5.209.036.200,- (99,53%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian, olehnya itu telah diadakan/dibangun sarana dan prasarana berupa hand traktor 2 unit, jalan usaha tani 46 paket, dan embung 1 unit, dengan berfungsinya sarana dan prasarana tersebut untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas.
- b. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, dengan jumlah anggaran Rp.147.810.000,- realisasi keuangan Rp.147.000.000,- (99,45%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan mutu/kualitas dan kuantitas produksi, olehnya itu telah dilaksanakan pengadaan bibit unggul hortikultura yang terdiri dari 1 paket bibit durian dan manggis serta 1 paket bibit manggis dan Jahe serta 30.000 stek ubi kayu adira untuk dibagikan kepada masyarakat, serta bibit tersebut sudah ditanam telah di panen oleh masyarakat khususnya ubi kayu adira.

5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, dengan jumlah anggaran Rp.136.200.000,- realisasi keuangan Rp.133.950.000,- (98,35%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pencegahan penyakit menular pada ternak, olehnya itu telah dilaksanakan vaksinasi dan pengobatan ternak 12 kali (bulan), dengan menurunnya angka kematian ternak dengan demikian populasi ternak meningkat.

6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak, dengan jumlah anggaran Rp.260.220.000,- realisasi keuangan

Rp.257.604.000,- (98,99%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan populasi ternak dan produktivitas usaha, olehnya itu telah dilaksanakan pembangunan 1 unit prasarana pembibitan ternak ayam pada UPTD Mancani, dengan difungsikannya prasarana tersebut sebagai sumber bibit ayam unggul.

- b. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat, dengan jumlah anggaran Rp.2.351.676.000,- realisasi keuangan Rp.2.130.023.000,- (90,57%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan populasi ternak dan produktivitas usaha, olehnya itu telah dilaksanakan pengadaan bibit itik 2 paket, obat dan vaksin 1 paket, pakan ternak, sapi 1 paket, kambing 1 paket dan pembangunan 348 unit kandang ayam dan kelengkapan lainnya yang merupakan bantuan kepada masyarakat, melalui bantuan tersebut diatas telah diterima dan dikelola dengan baik oleh masyarakat.
 - c. Pengembangan Agribisnis Peternakan, dengan jumlah anggaran Rp.95.200.000,- realisasi keuangan Rp.95.200.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan populasi ternak Ruminansia, olehnya itu telah dilaksanakan inseminasi terhadap ternak Ruminansia selama 12 kali (bulan), dengan meningkatnya persentase kehamilan ternak yang diinseminasi.
- 7) Program Peningkatan Produksi Peternakan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna, dengan jumlah anggaran Rp.204.616.000,- realisasi keuangan Rp.204.323.000,- (99,86%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana Kesrawan, olehnya itu adalah telah tersedianya alat pemotongan hewan 1 paket, bak penampungan air 1 unit, pembuatan pagar pada RPH dan RPHU masing-masing 1 unit.
- 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pertanian, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan (DAK), dengan jumlah anggaran Rp.1.407.870.000,- realisasi keuangan Rp.1.404.745.000,- (99,78%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana penunjang ketahanan pangan, oleh itu telah diadakan/dibangun 2 unit RMU, 4 unit hand traktor, 4 unit pompa air, 1 unit kantor BPP dan sarana kelengkapan lainnya, pembangunan 1 unit lumbung pangan dan

lantai jamur, dengan difungsikannya sarana dan prasarana tersebut dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.

- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK), dengan jumlah anggaran Rp.1.430.111.800,- realisasi keuangan Rp.1.425.916.550,- (99,71%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan peternakan, olehnya itu telah dibangun/diadakan 1 unit UPTD pembibitan dan fasilitas penunjang lainnya, 1 unit RPH dan 1 unit RPHU, dengan difungsikannya sarana dan prasarana tersebut di atas.
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian, dengan jumlah anggaran Rp.1.232.909.016,- realisasi keuangan Rp.1.229.222.000,- (99,70%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana peningkatan produksi pertanian, olehnya itu telah diadakan/dibangun kendaraan roda tiga 1 unit, alat pengolahan hasil 1 paket, jalan usaha tani 1 paket, embung 2 unit serta Dam Parit 14 paket, dengan difungsikannya sarana dan prasarana tersebut dalam rangka peningkatan produksi dan perbaikan mutu produksi.

c. Permasalahan Dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat, dengan jumlah anggaran Rp.2.351.676.000,- realisasi keuangan Rp.2.130.023.000,- (90,57%) dan fisik 100%. Kegiatan ini anggarannya tidak terealisasi 100%, anggaran untuk pengadaan pakan ternak tidak dicairkan keseluruhan karena kebutuhan pakan ternak disesuaikan dengan produksi penetasan bibit ayam dan pakan tidak dapat dijadikan barang persediaan karena cepat rusak.

Solusi :

- 1. Anggaran tersebut dikembalikan ke negara
 - 2. Dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2015 untuk pengadaan pakan ternak.
- c. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan jumlah anggaran Rp.5.233.842.100,- realisasi keuangan Rp.5.209.036.200,-

(99,53%) dan realisasi 100%, anggaran untuk Biaya Umum tidak dicairkan karena adanya aturan pelarangan penggunaan Biaya Umum.

Solusi

1. Anggaran tersebut dikembalikan ke negara

2. Urusan Kehutanan

Urusan Pilihan Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo, dalam bentuk Program, kegiatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu.
 - b. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan.
 - c. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan.
 - b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian.
- 3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - c. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
 - d. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - e. Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan-kegiatan:
 - a. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah.
- 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan:
 - a. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
 - b. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan.
 - c. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan.
- 6) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan Kegiatan :
 - a. Pengembangan Hutan Masyarakat Adat.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu, dengan jumlah anggaran Rp.121.300.000,- realisasi keuangan Rp.121.300.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengembangan sentra

produksi komoditas wilayah, olehnya itu telah dilaksanakan pengadaan 80 buah koloni dalam rangka pengembangan hasil hutan non kayu berupa lebah madu, dengan dimanfaatkannya 80 buah koloni tersebut oleh petani untuk memproduksi lebah madu.

- b. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, dengan jumlah anggaran Rp.38.050.000,- realisasi keuangan Rp.38.050.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengembangan sentra produksi komoditas wilayah dan pemanfaatan kawasan hutan secara legal, produktif dan lestari, olehnya itu telah dilaksanakan penyusunan dokumen rencana usaha kelompok sasaran hutan kemasyarakatan oleh 4 kelompok dengan masing-masing 1 dokumen, dengan dimanfaatkannya dokumen rencana usaha kelompok tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan hutan kemasyarakatan.
 - c. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, dengan jumlah anggaran Rp.39.850.000,- realisasi keuangan Rp.39.850.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penertiban peredaran hasil hutan, olehnya itu telah dilakukan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan dengan melakukan stok opname kepada para pedagang/pengusaha kayu sebanyak 4 kali kegiatan, melalui peredaran hasil hutan di Kota Palopo menjadi tertib/terkendali.
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan, dengan jumlah anggaran Rp.53.100.000,- realisasi keuangan Rp.51.000.000,- (96,05%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah updating data kehutanan dan perkebunan Kota Palopo, olehnya itu telah dilaksanakan pendataan statistik sebanyak 12 kali, dengan dimanfaatkannya data tersebut untuk bahan perencanaan, penelitian dan berbagai kepentingan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian, dengan jumlah anggaran Rp.30.150.000,- realisasi keuangan Rp.30.150.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan mutu produksi perkebunan, olehnya itu telah dilaksanakan bimbingan teknis fermentasi kakao sebanyak 2 kali, dengan meningkatnya keterampilan petani dalam hal peningkatan mutu produksi.
- 3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan jumlah anggaran Rp.23.950.000,- realisasi keuangan Rp.23.950.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran

kegiatan adalah pemulihan kondisi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan, olehnya itu telah dilaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GRHL) sebanyak 12 kali, dengan adanya dokumentasi/data tentang perkembangan proses rehabilitasi hutan dan lahan.

- b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan jumlah anggaran Rp.23.942.800,- realisasi keuangan Rp.23.942.800,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemulihan kondisi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan, olehnya itu telah diselenggarakan pelatihan petani sekitar hutan sebanyak 75 orang dalam rangka rehabilitasi hutan secara swadaya, dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- 4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan jumlah anggaran Rp.289.900.000,- realisasi keuangan Rp.289.500.000,- (99,86%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah meningkatkan fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan kawasan penyangga, olehnya itu telah dilaksanakan patroli pengamanan dan pengendalian gangguan kawasan hutan sebanyak 180 kali, melalui kondisi hutan serta peredaran hasil hutan menjadi terkendali/tertib.
 - b. Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan jumlah anggaran Rp.23.130.000,- realisasi keuangan Rp.23.130.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah meningkatkan fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan kawasan penyangga, olehnya itu telah dilaksanakan sosialisasi tentang upaya pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan sebanyak 3 kali, dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan dan dampak kebakaran hutan dengan indikator rendahnya kasus kebakaran hutan.
- 5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah, dengan jumlah anggaran Rp.55.000.000,- realisasi keuangan Rp.55.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah promosi potensi dan hasil/produk daerah, peningkatan wawasan petugas dan KTNA dalam rangka membangun investasi dan kemitraan usaha, olehnya itu telah diikutsertakan 10 orang yang terdiri dari petugas dan KTNA sebagai peserta pada acara Pekan Nasional (PENAS) KTNA XIV di Kabupaten Malang Jawa Timur, melalui potensi dan produksi Kota Palopo baik produksi segar maupun olahan telah mulai dikenal oleh masyarakat diluar Kota Palopo.

- 6) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan jumlah anggaran Rp.21.908.000,- realisasi keuangan Rp.21.908.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan produksi kehutanan dan perkebunan, olehnya itu telah dilaksanakannya penyuluhan terhadap upaya peningkatan produksi sebanyak 1 kali, dengan meningkatnya pengetahuan petani dalam rangka peningkatan produksi kehutanan dan perkebunan.
 - b. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan jumlah anggaran Rp.61.550.000,- realisasi keuangan Rp.61.550.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan produksi, olehnya itu telah diadakan sarana produksi berupa alat dan bahan pengendalian hama penyakit tumbuhan, dengan menurunnya serangan hama penyakit, sehingga produksi dapat ditingkatkan.
 - c. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, dengan jumlah anggaran Rp.336.100.000,- realisasi keuangan Rp.336.045.000,- (99,98%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengembangan komoditas unggul daerah, olehnya itu telah dilaksanakan pengadaan bibit unggul perkebunan sebanyak 42.690 batang, yang terdiri dari bibit pala, lada dan cengkeh, serta bibit tersebut telah ditanam oleh masyarakat dengan prosentase pertumbuhan di lapangan mencapai 85 %.
- 7) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Hutan Masyarakat Adat, dengan jumlah anggaran Rp.21.670.000,- realisasi keuangan Rp.21.670.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengembangan kawasan agrowisata berbasis pemberdayaan masyarakat, olehnya itu telah disusun dokumen rencana usaha pengelolaan hutan adat, dengan digunakannya rencana usaha pengelolaan hutan adat tersebut dalam rangka pelaksanaan hutan adat.

3. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pilihan Energi sumber daya mineral yang diselenggarakan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kota Palopo, dalam bentuk program, kegiatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Regulasi Bidang pertambangan dan Energi.

- b. Koordinasi dan Pendataan Tentang hasil Produksi Bidang Pertambangan.
 - c. Pengelolaan izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD dan SIPA).
- 2) Program Pengawasan dan Penertiban dan Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan.
 - c. Pengembanaan Desa Mandiri Energi dan Elektrifikasi Daerah terpencil.
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kegiatan
- a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 4) Program Peningkatan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dengan kegiatan :
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Potensi pertambangan.
 - b. Pemantauan Geologi pada Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan ABT.
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Penerangan Jalan Umum dengan kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Penerangan Jalan Umum.
 - b. Pengadaan Listrik Penerangan Jalan Umum.
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala PJU.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Sosialisasi Regulasi bidang pertambangan dan energi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 27.507.500,- realisasi keuangan Rp.27.507.500,- (100 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah pembinaan dan sosialisasi tentang regulasi bidang tambang bagi pengusaha tambang galian.

- b. Koordinasi dan Pendataan Tentang hasil Produksi Bidang Pertambangan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.250.000,- realisasi keuangan Rp.25.250.000,- (100 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah terlaksananya pendataan tentang potensi dan hasil tambang galian sebagai objek PAD.
 - c. Pengelolaan izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD dan SIPA), dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 73.170.000,- realisasi keuangan Rp.72.870.000,- (99,5 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah pengendalian dan penertiban perijinan pertambangan daerah.
- 2) Program Pengawasan dan Penertiban dan Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 79.910.000,- realisasi keuangan Rp.79.910.000,- (100 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan pengawasan bagi pertambangan rakyat yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.27.900.000,- realisasi keuangan Rp.27.950.000,- (100 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dampak kerusakan lingkungan.
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pengembanagan Desa Mandiri Energi dan Elektrifikasi Daerah terpencil, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.21.493.000,- realisasi keuangan Rp.21.493.000,- (100 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah pendataan potensi pengembangan desa mandiri energi dan pelaksanaan elektrifikasi bagi daerah terpencil.

- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.71.875.000,- realisasi keuangan Rp.71.872.000,- (99,9%), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan inspeksi bagi penggunaan energi listrik bertegangan rendah.
- 4) Program Peningkatan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Potensi pertambangan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.156.615.000, realisasi keuangan Rp. 155.685.000,- (99,5 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah pembangunan 1 unit gedung pengolahan batuan.
 - b. Pemantauan Geologi pada Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan ABT, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.71.818.000,- realisasi keuangan Rp. 71.818.000,- (100 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah pelaksanaan pendataan dan pengendalian ijin penggunaan air bawah tanah.
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Penerangan Jalan Umum, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Penerangan Jalan Umum, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.830.448.000,- realisasi keuangan Rp.827.112.143, (99,60 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah penyediaan biaya operasional dan honorarium bagi 54 tenaga petugas PJU.
 - b. Pengadaan Listrik Penerangan Jalan Umum, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.250.000.000,- realisasi keuangan Rp.248.043.000,- (99,50 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah pengadaan alat dan bahan penerangan jalan umum, dan pemasangan lampu jalan kompleks terminal dangerakko.
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala PJU, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.541.060.000,- realisasi keuangan Rp.513.597.843,- (95 %), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah terlaksananya

kegiatan pemeliharaan dan operasional penerangan jalan se Kota Palopo.

4. Urusan Pilihan Pariwisata

Urusan Pilihan Pariwisata yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, dalam bentuk program, kegiatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri.
 - b. Pengembangan Statistik Wisata Terpadu.
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata.
 - b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri, dengan jumlah anggaran Rp.146.825.000,- realisasi Rp.146.781.000,- (99,97%), realisasi fisik (100 %), sasaran kegiatan adalah keikutsertaan dalam pameran baik dalam daerah maupun luar daerah, olehnya itu telah dilaksanakan pameran sebanyak 3 kali baik dalam dalam daerah (Palopo expo) maupun luar daerah (Bali dan Makassar).
 - b. Pengembangan Statistik Wisata Terpadu, dengan jumlah anggaran Rp.22.000.000,- realisasi Rp.22.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pendataan wisatawan, olehnya itu telah dilaksanakan pendataan wisatawan nusantara sebanyak 86.338 orang maupun wisatawan manca negara sebanyak 617 orang.
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, dengan jumlah anggaran Rp.199.900.000,- realisasi keuangan Rp.199.730.000,- (99,91%), realisasi fisik 100%.
 - b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata, dengan jumlah anggaran Rp.62.150.000,- realisasi keuangan Rp.61.900.000,- (99,60%), realisasi fisik 100%.

5. Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo, dalam bentuk Program, kegiatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan :

- 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan, dengan Kegiatan :
 - a. Gerakan pembersihan pesisir pantai.
 - b. Pengawasan illegal fishing.
- 3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan bibit ikan unggul.
 - b. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan.
 - c. Pembinaan dan pengembangan perikanan.
- 4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan:
 - a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap.
 - b. Pembangunan tempat pelelangan ikan.
 - c. Pemeliharaan rutin berkala tempat pelelangan Ikan.
 - d. Rehabilitasi sedang / berat tempat pelelangan ikan.
- 5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
 - b. Promosi atas hasil produksi perikanan / unggulan Daerah.
 - c. Pembinaan dan pengembangan produksi perikanan.
- 6) Program Pengembangan Data base dan Informasi, dengan kegiatan :
 - a. Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
 - b. Updating data statistik kelautan dan perikanan.
- 7) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air payau, Air Tawar dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan budidaya rumput laut.
- 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana kelautan.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran.
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana statistik.

b Realisasi Program dan Kegiatan :

- 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir, dengan jumlah anggaran Rp.112.830.000,- realisasi keuangan Rp.92.680.000,-

(82,14%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir, olehnya itu telah dilakukan pembinaan ekonomi terhadap 12 kelompok yang meliputi 120 KK masyarakat pesisir, dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat pesisir Kota Palopo.

- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan & Pengendalian Sumber daya Kelautan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Gerakan Pembersihan Pesisir Pantai, dengan jumlah anggaran Rp.23.400.000,- realisasi keuangan Rp.23.150.000,- (98,93%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah menumbuhkan motivasi masyarakat untuk menciptakan kebersihan dan keindahan pantai, olehnya itu telah dilakukan gerakan pembersihan pantai yang merupakan kerjasama Pemerintah Kota Palopo dan masyarakat yang dilaksanakan 4 kali dalam setahun, melalui lingkungan pesisir pantai menjadi bersih dan indah, dimana lokasinya di Kelurahan Ponjalae (TPI) dan Kelurahan Salekoe (Labombo).
 - b. Pengawasan Illegal Fishing, dengan jumlah anggaran Rp.200.300.000,- realisasi keuangan Rp.197.766.500,- (98,74%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penertiban wilayah pantai dari illegal fishing, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengawasan SDKP, olehnya itu telah dilaksanakan pengawasan illegal fishing di wilayah pantai Kota Palopo, dengan berkurangnya kasus illegal fishing.
- 3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul, dengan jumlah anggaran Rp.46.750.000,- realisasi keuangan Rp.45.327.500,- (96,96%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah tersedianya bibit ikan air tawar yang unggul, olehnya itu telah dilakukan pengadaan pakan ikan sebanyak ±380 Kg, pupuk 4 Zak dan obat-obatan 7 botol sebagai sarana pengembangan bibit ikan unggul, dengan dimanfaatkannya pakan ikan dan obat-obatan tersebut dalam rangka memacu pertumbuhan dan perkembangan bibit ikan, sehingga menghasilkan bibit ikan yang unggul dalam jumlah yang cukup. Lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kecamatan Telluwanua.
 - b. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan, dengan jumlah anggaran Rp.21.350.000,- realisasi keuangan Rp.21.350.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah optimalisasi sarana dan prasarana produksi perikanan, olehnya itu telah dilaksanakan pendampingan bagi 24 kelompok tani pembudidaya ikan, melalui optimalnya penggunaan sarana dan prasarana produksi budidaya perikanan sehingga dapat meningkatkan produksi.

- c. Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan, dengan jumlah anggaran Rp.41.400.000,- realisasi keuangan Rp.41.350.000,- (99,88%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemberdayaan petani budidaya perikanan, olehnya itu telah dilaksanakan penyuluhan/sosialisasi budidaya perikanan kepada 25 orang petani, dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi 25 orang petani dalam hal budidaya perikanan. Lokasinya Kecamatan Wara Timur.
- 4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap, dengan jumlah anggaran Rp.26.100.000,- realisasi keuangan Rp.25.037.000,- (95,93%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah optimalisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap, olehnya itu telah dilaksanakan pendampingan bagi 25 kelompok nelayan dalam rangka optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, dengan optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
 - b. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan, dengan jumlah anggaran Rp.156.800.000,- realisasi keuangan Rp.148.150.000,- (94,48%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penambahan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan agar dapat difungsikan secara optimal, olehnya itu telah dilaksanakan pembangunan/pengadaan ruang dapur, pagar dan 4 unit perahu bala-bala, dengan berfungsinya tempat pelangan ikan secara optimal. Lokasi kegiatan adalah Kecamatan Wara Timur.
 - c. Pemeliharaan Rutin Berkala Tempat Pelelangan Ikan, dengan jumlah anggaran Rp.86.750.000,- realisasi keuangan Rp.82.730.000,- (95,37%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemeliharaan tempat pelelangan ikan secara rutin, olehnya itu telah dilaksanakan pemeliharaan tempat pelelangan ikan secara rutin selama 1 tahun, melalui kebersihan lokasi TPI tetap terjaga sehingga dapat beroperasi secara optimal. Lokasi kegiatan adalah Kecamatan Wara Timur dan Wara Selatan.
 - d. Rehabilitasi Sedang / Berat Tempat Pelelangan Ikan, dengan jumlah anggaran Rp.43.315.000,- realisasi keuangan Rp. 43.015.000,- (99,31%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah optimalnya pemanfaatan TPI, olehnya itu telah dilaksanakan rehabilitasi docking 1 paket, dengan berfungsinya docking untuk pemeliharaan kapal penangkap ikan.
- 5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan jumlah anggaran Rp.18.950.000,-

realisasi keuangan Rp.18.950.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyediaan data/informasi mengenai harga pasar komoditi perikanan selama satu tahun, olehnya itu telah dilaksanakannya pendataan harga pasar komoditi perikanan selama satu tahun, dengan dimanfaatkannya data/informasi tersebut untuk berbagai kepentingan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan / Unggulan Daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 136.323.800,- Realisasi keuangan Rp. 136.323.800,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah promosi potensi kelautan dan budidaya perikanan serta peningkatan wawasan petugas, KTNA Kota Palopo melalui kegiatan Pekan Nasional (PENAS), olehnya itu telah diikuti 15 orang (petugas dan KTNA) sebagai peserta PENAS XIV di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dengan menyebarnya informasi tentang potensi kelautan dan perikanan serta meningkatnya wawasan petugas, KTNA Kota Palopo.
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Produksi Perikanan, dengan jumlah anggaran Rp. 16.198.100,- Realisasi keuangan Rp. 16.100.000,- (99,39%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemberdayaan kelompok dalam hal pengolahan dan pemasaran hasil, olehnya itu telah dilakukan kunjungan pembinaan secara berkala kepada kelompok sebanyak 5 kali dalam setahun, dengan meningkatnya SDM kelompok dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- 6) Program Pengembangan Data Base dan Informasi, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar, dengan jumlah anggaran Rp.391.325.000,- realisasi keuangan Rp.378.141.800,- (96,63%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengembangan pengelolaan wilayah pesisir Kota Palopo, olehnya itu, telah tersusunnya dokumen perencanaan Zonasi dan PERDA Zonasi wilayah pesisir Kota Palopo, dengan dimanfaatkannya dokumen rencana pengelolaan Zonasi wilayah pesisir dan PERDA zonasi Kota Palopo dalam pengelolaan wilayah pesisir Kota Palopo.
 - b. Updating Data Statistik Kelautan dan Perikanan, dengan jumlah anggaran Rp.37.930.000,- realisasi keuangan Rp.35.930.000,- (94,73%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah Updating data kelautan dan perikanan Kota Palopo selama satu tahun, olehnya itu telah dilaksanakan pendataan statistik kelautan dan perikanan yang terupdate dalam setahun, dengan dimanfaatkannya data tersebut untuk perencanaan, penelitian dan berbagai kepentingan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Air Tawar, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

- a. Pengembangan Budidaya Rumput Laut, dengan jumlah anggaran Rp.2.794.500.000,- realisasi keuangan Rp.2.782.365.950,- (99,57%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengembangan budidaya rumput laut sistem polikultur, olehnya itu telah dilaksanakan pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana produksi berupa jalan produksi tambak 8 Paket (10,899Km) dan irigasi tambak 12 paket (8,058km), obat-obatan 3 liter dan pupuk 29 sak, dengan dimanfaatkannya sarana dan prasarana tersebut secara optimal oleh petani budi daya rumput laut.
- 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri atas 4 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelautan, dengan jumlah anggaran Rp.1.500.518.550,- realisasi keuangan Rp.1.398.775.000,- (93,22%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana kelautan yang diserahkan kepada kelompok nelayan, olehnya itu telah dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kelautan berupa kapal 5 GT 1 Unit, pukat tarik (purse seine mini) 10 Paket, alat tangkap kepiting (rakkang) 950 unit, alat tangkap waring 300 unit, alat tangkap jaring no. 6 8 paket, alat tangkap udang 5 paket, alat tangkap pukat ikan kembung 10 paket, perahu pengawas untuk POKMASWAS 1 unit, kendaraan operasional pengawas SDKP 1 unit, alat komunikasi tetap VHF Marine Radio dengan DSC 1 unit, pembuatan kampung pesisir 4 paket, dan pembuatan sumur bor air bersih di wilayah pesisir 5 paket, dengan dimanfaatkannya seluruh bantuan sarana dan prasarana tersebut oleh kelompok nelayan penerima bantuan secara optimal.
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan, dengan jumlah anggaran Rp.1.994.407.500,- realisasi keuangan Rp.1.991.487.500,- (99,85%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan yang diserahkan kepada kelompok petani budidaya, olehnya itu telah dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan berupa waring (penjemuran rumput laut) 1 paket, perahu pengangkut rumput laut 10 unit, bibit ikan lele 1 paket, bibit ikan mas 1 paket, pembangunan jalan produksi tambak rakyat To'pattung Kel. Salubattang 1 paket, pembangunan jalan produksi tambak rakyat Salubattang 1 paket, pembangunan jalan produksi tambak rakyat Kelapatiga Kel. Salobulo 1 paket, pembangunan jalan produksi tambak rakyat To'bulung 1 paket, pembangunan jalan produksi tambak rakyat Kel. Temmalebba 1 paket, pembangunan jalan produksi tambak rakyat Kel. Benteng RW 02 1 paket, pembangunan jalan produksi tambak rakyat Kel. Benteng RW 03 1 paket, pembangunan jalan produksi tambak rakyat Bul Buli Kel. Salubattang 1 paket, pembangunan jembatan penghubung Kel. Rampoang Kec. Bara 1 paket, pembangunan jembatan penghubung

Kel. Salubattang Kec. Telluwanua 1 paket, rehab. Jaringan irigasi tambak rakyat Bantangan Kel. Batuwalenrang 1 paket, rehab. Jaringan irigasi tambak rakyat S. Rongkong Kel. Salobulo 1 paket, rehab. Jaringan irigasi tambak rakyat Sawang Kel. Rampoang, rehab. Jaringan irigasi tambak rakyat Banana Kel. Salubattang 1 paket, rehab. Jaringan irigasi tambak rakyat Rawamangun Kel. Salobulo 1 paket, perbaikan pintu air kolam BBI 1 paket, perbaikan pintu air tambak kolam KBRL Songka 1 paket dan pembangunan kolam penampungan air BBI Salupao 1 paket, dengan dimanfaatkannya seluruh batuan sarana dan prasarana tersebut oleh kelompok nelayan penerima bantuan secara optimal.

- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran, dengan jumlah anggaran Rp.564.094.500,- realisasi keuangan Rp.534.094.500,- (94,68%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana pemasaran yang diserahkan kepada kelompok nelayan, olehnya itu telah dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pemasaran berupa cool box fiber (kapasitas 200 liter) 40 unit, cool box fiber (kapasitas 72 liter) 200 unit, alat jemur ikan (para-para) 250 unit, dengan dimanfaatkannya bantuan sarana dan prasarana tersebut oleh kelompok nelayan penerima bantuan secara optimal.
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik, dengan jumlah anggaran Rp.56.052.450,- realisasi keuangan Rp. 56.052.450,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana statistik, olehnya itu telah dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan sepeda motor 1 paket, mesin hitung 1 paket, filling kabinet 2 unit dan komputer/pc 1 unit, dengan dimanfaatkannya sarana dan prasarana tersebut dalam rangka pendataan statistik dan penyuluhan.

6. Urusan Pilihan Perdagangan

Urusan Pilihan Perdagangan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperindag Kota Palopo, dalam bentuk Program, kegiatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.
 - b. Sosialisasi Pembinaan Lingkungan Sosial dan Perlindungan Konsumen.
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan :
 - a. Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional.
 - b. Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha.

- c. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk.
- d. Pengembangan Pasar Lelang Daerah.
- e. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.
- f. Pembangunan / Renovasi Pasar Tradisional di Daerah Tertinggal.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, terdiri atas 2 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, dengan jumlah anggaran Rp.37.410.000,- realisasi keuangan Rp.37.410.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengendalian dan penertiban peredaran barang ilegal, olehnya itu telah dilaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa pada toko, pasar, swalayan, SPBU, agen dan pangkalan gas elpiji, untuk penertiban barang ilegal (harga tidak sesuai, kadaluarsa, tidak berlabel, tidak berstandar SNI dan barang berbahaya), dengan dikendalikannya peredaran barang ilegal.
 - b. Sosialisasi Pembinaan Lingkungan Sosial dan Perlindungan Konsumen, dengan jumlah anggaran Rp.12.160.000,- realisasi keuangan Rp.12.160.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sosial dan hak-hak konsumen serta pengawasan alat UTTP yang belum ditera, olehnya itu telah dilaksanakan sosialisasi tentang lingkungan sosial, hak-hak konsumen serta sosialisasi UU No.2 Thn 1981 tentang Meterologi, dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen dan tera ulang.
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, terdiri atas 6 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional, dengan jumlah anggaran Rp.200.000.000,- realisasi keuangan Rp.0,- (0%), realisasi fisik (0%), kegiatan ini tidak terealisasi karena tidak ada konsultan yang memenuhi kualifikasi untuk kegiatan tersebut. Selain itu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan sudah tidak mencukupi.
 - b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha, dengan jumlah anggaran Rp.45.000.000,- realisasi keuangan Rp.45.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan pelayanan dan kemudahan perizinan, olehnya itu telah dilaksanakan monitoring perizinan dalam rangka fasilitasi kemudahan perizinan TDP, SIUP dan TGD, melalui penerbitan TDP, SIUP dan TGD berjalan lancar dan target perizinan terpenuhi sebanyak 517 unit usaha sesuai yang terdaftar dalam data base perdagangan Kota Palopo.
 - c. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk, dengan jumlah anggaran Rp.1.285.630.000,- realisasi keuangan Rp.1.269.121.546,- (98,72%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah

pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana pasar untuk operasionalisasi pasar, olehnya itu telah dilaksanakan pengadaan 10 unit gerobak sampah, pendataan harga kebutuhan pokok pada 2 pasar yaitu Pasar Niaga Palopo (PNP) dan pasar A. Tadda, dengan berfungsinya sarana dan prasarana tersebut untuk menunjang operasionalisasi pasar secara optimal.

- d. Pengembangan Pasar Lelang Daerah, dengan jumlah anggaran Rp.122.548.630,- realisasi keuangan Rp. 122.548.541,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengendalian harga bahan pokok, olehnya itu telah dilaksanakan pasar murah pada 9 Kecamatan, melalui harga bahan pokok dapat dikendalikan sehingga terjangkau oleh masyarakat.
- e. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, dengan jumlah anggaran Rp.121.870.000,- realisasi keuangan Rp. 121.865.600,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah penyebaran dan akses informasi perdagangan, olehnya itu telah mengikuti 2 ajang pameran produk/komoditi perdagangan di Jakarta dan Makassar, melalui informasi komoditi perdagangan Kota Palopo telah banyak dikenal masyarakat di luar wilayah Kota Palopo.
- f. Pembangunan / Renovasi Pasar Tradisional di Daerah Tertinggal, dengan jumlah anggaran Rp.3.205.800.000,- realisasi keuangan Rp.3.205.682.750,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana perdagangan untuk optimalisasi operasional pasar tradisional, olehnya itu telah dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana berupa mesin pengolahan produk 10 unit, pembangunan talud pasar Telluwanua 1 unit, pembangunan gedung pasar produksi home industri di KIPA 1 unit dan penambahan daya listrik gedung PLUT 1 unit, dengan berfungsinya sarana dan prasarana tersebut dengan baik.

c. Permasalahan Dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional, dengan jumlah anggaran Rp.200.000.000,- realisasi keuangan Rp.0,- (0%) dan fisik 0%. Kegiatan ini tidak terealisasi karena tidak ada konsultan yang memenuhi kualifikasi untuk kegiatan tersebut. Selain itu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan sudah tidak mencukupi.

Solusi :

Diperlukan analisa ketersediaan konsultan atau pihak ketiga yang berkompeten secara teknis dalam pelaksanaan pekerjaan agar optimal dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerjanya.

- b. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk, dengan jumlah anggaran Rp.1.285.630.000,- realisasi keuangan Rp.1.269.121.546,-

(98,72%) dan realisasi fisik 100%, anggaran untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PNS) tidak dicairkan.

Solusi :

Anggaran tersebut dikembalikan ke negara.

7. Urusan Pilihan Industri

Urusan pilhan Industri yang diselenggarakan oleh Dinas Koperindag Kota Palopo, dalam bentuk Program, kegiatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.
 - b. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri.
 - c. Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah.
- 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.
- 3) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, terdiri atas 3 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya, dengan jumlah anggaran Rp.922.343.000,- realisasi keuangan Rp.910.310.100,- (98,70%) , realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM), olehnya itu telah dilaksanakan fasilitasi berupa pelatihan dan pendampingan serta penyerahan bantuan alat industri kepada 52 IKM, dengan meningkatnya kemampuan IKM dalam memproduksi komoditas berkualitas.
 - b. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri, dengan jumlah anggaran Rp.281.892.500,- realisasi keuangan Rp.269.242.375,- (95,51%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan kualitas produk, olehnya itu telah dilakukan pembinaan dan penyerahan bantuan alat industri serta sertifikasi produk kepada 20 IKM dalam rangka peningkatan kualitas produk dan pengembangan usaha, dengan meningkatkan kemampuan 20 IKM dan mampu menghasilkan produksi yang berkualitas.
 - c. Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah, dengan jumlah anggaran Rp.45.000.000,- realisasi keuangan

Rp.45.000.000,- (100%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan pelayanan dan pendataan IKM, olehnya itu telah dilaksanakan pendataan terhadap IKM yang memiliki izin, melalui tertibnya administrasi perizinan dan tersedianya data base IKM.

- 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri, dengan jumlah anggaran Rp.66.080.000,- realisasi keuangan Rp.64.080.000,- (96,97%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah pemberdayaan IKM, olehnya itu telah dilaksanakan 2 kali pelatihan dan pemberian bantuan peralatan kemasan kepada 40 IKM, dengan meningkatnya kemampuan 40 IKM dalam meningkatkan inovasi produk.
- 3) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, terdiri atas 1 kegiatan dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat, dengan jumlah anggaran Rp.106.208.000,- realisasi keuangan Rp.106.005.000,- (99.81%), realisasi fisik (100%), sasaran kegiatan adalah peningkatan sarana dan informasi industri, olehnya itu telah diikuti 2 ajang pameran oleh 5 IKM, yaitu pameran produk kerajinan di Jogjakarta dan pameran TTG di Samarinda serta pembangunan 1 unit galeri sebagai sarana informasi industri, dengan meningkatnya penyebaran informasi industri di Kota Palopo.

c. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya, dengan jumlah anggaran Rp.922.343.000,- realisasi keuangan Rp.910.310.100,- (98,70%) dan realisasi fisik 100%. Anggaran kegiatan ini tidak terealisasi 100% karena Belanja Bahan Material lainnya (logistik) dan Belanja Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga (tenaga pengajar) tidak dicairkan keseluruhan.

Solusi : Anggaran ini dikembalikan ke negara.

2. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri, dengan jumlah anggaran Rp.281.892.500,- realisasi keuangan Rp.269.242.375,- (95,51%) dan realisasi fisik 100%. Anggaran kegiatan ini tidak terealisasi 100% karena biaya Belanja Honorarium untuk Non PNS tidak dicairkan keseluruhan.

Solusi : Anggaran tersebut dikembalikan ke negara.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA

A. Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

1. Dasar Hukum

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 23 menggariskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), namun karena PP yang dimaksudkan belum terbit sehingga PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih menjadi acuan.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah Provinsi kepada daerah Kab/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, khususnya pada pasal 1 poin 4 menyatakan bahwa “ Yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu”.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Pemerintah Pusat memberi Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama kepada daerah melalui Kementerian Negara, dan Lembaga terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan nasional di daerah. Adapun Kementerian yang memberi Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama kepada Pemerintah Kota Palopo pada tahun anggaran 2014 adalah :

- 1) Kementerian Pertanian
- 2) Kementerian Kesehatan
- 3) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 4) Kementerian Dalam Negeri
- 5) Kementerian Pekerjaan Umum.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.

Pemerintah Kota Palopo menerima dan melaksanakan tugas pembantuan dan urusan bersama yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2014, yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Palopo adalah sebagai berikut :

- 1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Palopo
- 2) Dinas Kesehatan Kota Palopo
- 3) RSUD. Sawerigading Kota Palopo
- 4) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo
- 5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo
- 6) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo.

4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang diterima

a. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang diterima dari Pemerintah Pusat

Adapun uraian jenis Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang diterima dari Pemerintah Pusat selama tahun anggaran 2014 terdiri dari :

- 1) Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Palopo dengan anggaran Rp. 530.500.000,- terdiri dari :
 - a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat :
 - Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Rp. 90.000.000,-
 - Kegiatan Pengembangan Panganeka Ragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Rp. 384.500.000,-
 - Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Rp. 56.000.000,-
- 2) Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo dengan anggaran Rp. 3.638.148.000,- terdiri dari :
 - a. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak :
 - Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp. 1.338.148.000,-
 - Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (TP-APBN-P/tambahan) Rp. 2.300.000.000,-
- 3) Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD. Sawerigading Kota Palopo dengan anggaran Rp. 20.000.000.000,- terdiri dari :
 - a. Program Pembinaan Upaya Kesehatan :
 - Kegiatan Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Rp. 20.000.000.000,-
- 4) Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo dengan anggaran Rp. 677.785.000,- terdiri dari :
 - a. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja :

- Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Rp. 677.785.000,-
- 5) Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo dengan anggaran Rp. 578.715.000,- terdiri dari :
- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan :
 - Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu Rp. 578.715.000,-
- 6) Urusan Bersama yang diterima dari Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo dengan anggaran Rp. 5.676.250.000,- Anggaran tersebut dimaksudkan sebagai anggaran penyelenggaraan Program PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2014 yang secara langsung dilaksanakan oleh Badan Kebudayaan masyarakat di 48 Kelurahan dan 9 Kecamatan terdiri dari :
- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman :
 - Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Rp. 5.676.250.000,- yang tersebar di 9 kecamatan yaitu :
 1. Kecamatan Wara sebesar Rp.546.250.000,-
 2. Kecamatan Wara Selatan sebesar Rp.522.500.000,-
 3. Kecamatan Sendana sebesar Rp.593.750.000,-
 4. Kecamatan Wara Timur sebesar Rp.617.500.000,-
 5. Kecamatan Mungkajang sebesar Rp.403.750.000,-
 6. Kecamatan Wara Utara sebesar Rp.546.250.000,-
 7. Kecamatan Bara sebesar Rp.712.500.000,-
 8. Kecamatan Telluwanua sebesar Rp.1.187.500.000,-
 9. Kecamatan Wara Barat sebesar Rp.546.250.000,-

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran pelaksanaan tugas pembantuan dan urusan bersama yang diterima dari Pemerintah Pusat berjumlah **Rp. 31.101.398.000,-** yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat yang anggaran pelaksanaannya dibelanjakan langsung dan tidak disalurkan melalui APBD Kota Palopo berjumlah Rp. 25.425.148.000,-
- 2) Urusan Bersama yang diterima dari Pemerintah Pusat yang anggaran pelaksanaannya dibelanjakan langsung dan tidak disalurkan melalui APBD Kota Palopo berjumlah Rp. 5.676.250.000,-

6. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan tugas pembantuan dan urusan bersama yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Palopo dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kota Palopo telah terlaksana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan, namun demikian pelaksanaan beberapa program dan kegiatan tugas pembantuan cenderung mengalami keterlambatan yang diakibatkan oleh :

- a) Petunjuk teknis pengelolaan anggaran tidak bersamaan dengan penerimaan DIPA.
- b) Kondisi diluar dugaan yang tidak diinginkan dalam proses pelaksanaan kegiatan, seperti lokasi dan waktu pelelangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2014 dalam rangka kerjasama antar daerah, diarahkan pada upaya memfasilitasi dan mendorong terlaksananya program-program kerjasama wilayah se Tana Luwu, kerjasama antara wilayah dalam penanganan perbatasan, penanganan kawasan hutan lindung dan konservasi di kabupaten Luwu, Toraja Utara dan Kota Palopo dan kerjasama antara wilayah dalam penanganan kawasan Teluk Bone. Adapun arah kebijakan kerjasama antar daerah tersebut antara lain :

- a) Bersama mendorong terlaksananya kerjasama daerah pada beberapa bidang strategis yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten / Kota se Tana Luwu dalam wadah kerjasama Badan Kerjasama Pembangunan Tana Luwu sebagai lembaga yang mewadahi pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama antara wilayah Tana Luwu dan telah dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan Kepala pemerintahan keempat wilayah di Tana Luwu yaitu Bupati Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Walikota Palopo,
- b) Menggagas kerjasama antara wilayah terhadap penanganan kawasan Teluk Bone terkait dengan illegal Fishing, penanganan terumbu karang, serta penanggulangan usaha pengrusakan kawasan perairan dengan difasilitasi oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Propinsi yang memiliki wilayah di Teluk Bone.
- c) Kerjasama dalam pengembangan kawasan andalan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan andalan berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 44 tahun 2001 yang menetapkan Kawasan andalan Palopo dan sekitarnya (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, dan Toraja Utara) sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, pariwisata, agroindustri, serta industri pengolahan kayu dan hasil hutan.

- d) Kerja sama antar daerah juga telah digagas secara bersama oleh Kementrian dalam Negeri dan Kementrian Percepatan Daerah Tertinggal dalam bentuk Regional Management. Regional Management atau Kerjasama antar daerah ini pertama kali difasilitasi oleh Biro Kerjasama Daerah Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 telah dituangkan dalam kesepakatan bersama oleh 5 (lima) Kabupaten/Kota yang meliputi Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Toraja Utara. 5 (Lima) Kabupaten/Kota yang tergabung kerjasama antar daerah ini menyepakati Nama "REGIONAL MANAGEMENT WANUA MAPPATUO" untuk kerjasama antar daerah dimaksud. Regional Management (RM) 'Wanua Mappatuo' hingga saat ini sedang dalam proses tindak lanjut dan perumusan pola kerjasama. Hal-hal yang masih dalam perumusan adalah : Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) di masing-masing Kabupaten/Kota, Perumusan Pola Kerjasama, Perumusan Objek kerjasama, pembentukan Pengelola Regional Management, dan hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan kerjasama.
- e) Kerjasama Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Konservasi Pemerintah Kota Palopo dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagaimana Nota Kesepahaman bersama antara Pemerintah Kabupaten Luwu, Toraja Utara dan Palopo Nomor 500/003/UM-Set/I/2014, Nomor

06/NBK/I/2014, Nomor 180/23/Duk/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Kerjasama Penanganan Kawasan Hutan Lindung dan konservasi di Wilayah Kabupaten Luwu, Kabupaten Toraja Utara dan Kota Palopo.

- f) Kerjasama Pemerintah Kota Palopo dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dalam bentuk e-government. MoU antara Pemerintah Kota Palopo dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan ruang lingkup Government Resources Management System (GRMS) yaitu sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktivitas birokrasi yang dikembangkan dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah yang berbasis IT. Sistem GRMS yang akan dikembangkan terdiri dari e-Budgeting, e-Planning, e-Musrebang, e-Procurement, e-Delivery, e-Controlling, e-Payment, e-Performance

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sampai dengan akhir tahun 2014, gagasan kerjasama wilayah se Tana Luwu belum sepenuhnya terwujud dan terlaksana dalam bentuk program kegiatan sesuai harapan, meskipun Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah se Tana Luwu telah ditandatangani, demikian pula dengan gagasan kerjasama penanganan Kawasan Teluk Bone belum sepenuhnya terwujud dan terlaksana sesuai harapan meskipun gagasan kerjasama tersebut telah dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Propinsi yang berada di kawasan Teluk Bone serta kerjasama tentang bataswilayah antara Pemerintah Kota Palopo, Kabupaten Luwu dengan Toraja Utara.

Pelaksanaan gagasan kerjasama dalam pengembangan kawasan andalan bagian utara Propinsi Sulawesi Selatan, telah mulai dirintis kerjasama dalam rangka regional management yang difasilitasi oleh

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan melibatkan Kawasan se Tana Luwu dan Toraja Utara.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MOU dengan Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Palopo telah mengutus Tim e-government untuk melaksanakan StudyBanding dalam rangka penerapan e-government di Pemerintah Kota Palopo.

3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rencana kerjasama antar daerah adalah :

- a. Belum adanya aturan pelaksanaannya serta masih adanya perbedaan kepentingan masing-masing daerah terhadap bentuk kerjasama antar daerah.
- b. Khusus pada pengembangan regional management, belum ada tindak lanjut dalam bentuk pertemuan antar daerah dalam kawasan Tana Luwu dan Toraja Utara untuk menggagas berbagai kemungkinan bentuk kerjasama yang dapat dijalin.
- c. Belum adanya satu sekretariat yang disepakati untuk menjadi sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Tana Luwu sebagai wadah untuk mengembangkan berbagai bentuk kerjasama antar daerah.
- d. Belum terbentuknya Tim Permanen yang fokus pada permasalahan kerjasama antar daerah.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan dan Kegiatan

Arah kebijakan kerjasama daerah dengan pihak ketiga diarahkan pada peningkatan upaya dalam menggalang partisipasi lembaga-lembaga pihak ke tiga untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Palopo. Sampai dengan tahun 2014 kerjasama tersebut terus berjalan melalui kegiatan-kegiatan lanjutan maupun bentuk-bentuk

kerjasama baru yang memungkinkan untuk dikembangkan. Adapun kerjasama daerah dengan pihak ketiga tersebut antara lain :

- a. Kerjasama pengelolaan Kawasan wisata pantai labombo dengan pihak CV. Vista.
- b. Kerjasama antara Pemerintah Kota Palopo dengan USDRP/ Bank Duniadalam bentuk pemberian pinjaman Pembangunan Pasar Modern / Pasar Besar.
- c. Kerjasama antara Pemerintah Kota Palopo dengan PT. Niviron dalam pengelolaan Pasar Modern / Pasar Besar.
- d. Kerjasama antara Pemerintah Kota Palopo dengan Bank Indonesia Wilayah Sulampua dalam pengembangan wirausaha di Kota Palopo.
- e. Kerjasama Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini PDAM Kota Palopo dengan AUSAID yaitu pemasangan sambungan baru program hibah air minum masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini telah dimulai pada tahun 2013 untuk tahap pertama sebanyak 2000 sambungan baru senilai lima milyar, untuk tahap II tahun 2014 sebanyak 3000 sambungan dengan nilai sembilan milyar dan tahap III pada tahun 2015 direncanakan sebanyak 3300 sambungan baru atau senilai sembilan milyar rupiah. (Pemerintah Australia melalui AUSAID memberikan dana hibah kepada Pemerintah Indonesia,(Dirjen Cipta Karya Kementrian PU) selanjutnya Pemerintah Indonesia memberikan danah hibah kepada Pemerintah Kota Palopo, Pemerintah Kota Palopo menjadikan dana hibah terwebut sebagai penyertaan modal di PDAM yang digunakan untuk penyambungan dan pemasangan pipa pada masyarakat miskin.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.

Beberapa kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan dan masih terus berlangsung antara lain adalah pengelolaan kawasan wisata pantai labombo yang sampai saat ini telah memberikan andil

dalam penerimaan PAD Kota Palopo, selain itu kegiatan pengelolaan pasar Modern (Pasar besar) yang mampu meningkatkan PDRB Kota Palopo dari sektor jasa dan perdagangan.

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama daerah dengan pihak ketiga telah berjalan dengan baik tanpa adanya kendala berarti.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan Pemerintah Kota Palopo terhadap koordinasi dengan Instansi vertikal di daerah dilakukan melalui fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi, rapat-rapat monitoring serta dukungan pemberian fasilitas terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas instansi vertikal

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan koordinasi pemerintahan adalah :

- a. Fasilitasi pemerintah Kota Palopo terhadap pelaksanaan tugas-tugas instansi vertikal yang ada di Kota Palopo
- b. Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi, rapat Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan instansi-instansi vertikal yang ada di Kota Palopo.
- c. Pelaksanaan Upacara Hari Kesadaran Nasional pada tanggal 17 setiap bulan yang dihadiri oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah se Kota Palopo, TNI, Polri, dan Instansi vertikal lainnya.
- d. Pelaksanaan "Coffee Morning " setelah pelaksanaan upacara gabungan yang diikuti oleh seluruh Kepala Dinas, Badan, Kantor dan unit kerja Pemerintah Kota Palopo.

- e. Pelibatan partisipasi personil instansi vertikal yang ada di Kota Palopo untuk turut serta dalam menyukseskan gerakan Bangun Praja, Pekan Penghijauan Daerah, Gerakan Jumat bersih.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal dalam tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. BPN Kota Palopo meliputi kegiatan;
- Pengelolaan Pertanahan (pengelolaan sertifikasi prona)
- b. POLRES Kota Palopo meliputi ;
- Kegiatan Pembinaan potensi keamanan,
 - Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan,
 - Pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban,
 - Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana kewilayahan.
- c. BPS Kota Palopo meliputi :
- Penyediaan dan pelayanan informasi Statistik .
- d. Kejaksaan Negeri Kota Palopo meliputi :
- Penerangan dan Penyuluhan Hukum,
 - Penyidikan, Penuntutan, Pemberantasan terhadap pelanggaran kejahatan dan penanganan perkara,
- e. Kantor Pelabuhan Kota Palopo meliputi :
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan dan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan.
- f. KPU Kota Palopo meliputi :
- Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.
 - Peningkatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi/ Publikasi Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan Pemilih.
- g. Pengadilan Negeri Kota palopo meliputi :

- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
- h. Pengadilan Agama Kota Palopo meliputi :
 - Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
- i. BNN Kota Palopo, meliputi :
 - Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah.
- j. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Palopo satuan kerja listrik Pedesaan Sulawesi Selatan , tahun 2014 yang meliputi pemasangan bantuan listrik gratis kepada masyarakat miskin sebanyak 209 sambungan RTS dengan total biaya Rp. 327.965.000.-

3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi vertikal di Kota Palopo telah berjalan dengan baik. Hal ini karena adanya jalinan komunikasi Pemerintah Kota Palopo yang telah terbangun dengan semua Instansi vertikal yang ada.

C. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan dalam pembinaan batas wilayah diarahkan kepada penataan batas-batas wilayah perbatasan Kota Palopo dengan Kabupaten lainnya yang difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, serta penyelesaian batas-batas pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Palopo.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan apa yang telah disepakati oleh wakil pemerintahan luwu raya termasuk Toraja Utara dalam pelaksanaan tindak lanjut penataan batas wilayah. Baik Pemerintah Kota Palopo maupun Pemerintah Kabupaten Luwu dan Toraja Utara telah mengalokasikan biaya pelaksanaan kegiatan penegasan batas wilayah dalam APBD masing-masing tahun anggaran 2014. Pada kegiatan tersebut direncanakan pelibatan pihak

Teritorial Kodam VII Wirabuana sebagai pelaksana Tapal batas yang sudah final adalah :

- Batas Palopo – Luwu, yang meliputi Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Telluwanua
- Batas Palopo – Luwu - Toraja Utara, yang meliputi Kecamatan Wara Barat

Sementara itu, sebagai tindak lanjut pemekaran wilayah Kecamatan dan Kelurahan, maka telah dilaksanakan penataan wilayah untuk penegasan tapal batas antar kecamatan dan antar kelurahan yang telah terbentuk.

Selain itu pada setiap kelurahan telah pula dilaksanakan pembentukan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang diharapkan menjadi lembaga kemasyarakatan yang dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Saat ini di Kota Palopo terdapat 244 RW dan 717 RT.

3. Permasalahan dan Solusi

Masalah penentuan titik tapal batas wilayah perbatasan Kota Palopo dengan Kabupaten Luwu, dan Toraja Utara tetap diharapkan dapat di fasilitasi oleh pihak Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk mempercepat penyelesaiannya dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Kesepakatan yang telah dicapai pada pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Toraja Utara sudah terwujud dengan dialokasikannya anggaran kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah dalam APBD tahun anggaran 2014.

Agenda revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sedang dan telah dilaksanakan oleh hampir sebagian besar Kabupaten/kota di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan dan kawasan se Tana Luwu, juga membawa dampak positif dalam mendorong pencapaian kesepakatan

mengenai penegasan batas wilayah antar Kabupaten/kota khususnya antara Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Toraja Utara. Dalam proses penyempurnaan Raperda RTRW Kota Palopo, telah dilampirkan surat persetujuan dari Bupati Luwu dan Bupati Toraja Utara selaku pimpinan pemerintahan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Palopo dalam hal perencanaan tata ruang wilayah di kawasan perbatasan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu titik pangkal penyelesaian tapal batas antar kabupaten kota yang sudah selesai.

D. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya

Dari sisi letak geografis, topografi, cuaca, dan kondisi sosial, Kota Palopo merupakan salah satu daerah rentan terhadap beragam bencana seperti banjir, tanah longsor, badai, angin puting beliung, kekeringan, dan lain-lain. Termasuk potensi bencana akibat kelalaian manusia seperti kebakaran, konflik sosial, dan sejenisnya.

Sepanjang tahun 2014, secara garis besar, bencana yang terjadi setidaknya terdiri dari : Banjir 6 kali, kebakaran 15 kali, tanah longsor 2 kali dan pohon tumbang 2 kali. Secara rinci disajikan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 9.
Rekapitulasi Kejadian Bencana Di Kota Palopo
Tahun 2014

NO	JENIS BENCANA	TGL/BLN	LOKASI	KERUSAKAN	KATEGORI	KERUGIAN (juta)	TINDAK LANJUT
1	Banjir	06/02/2014	Kel. Amassangan dan Dangerakko Kec. Wara		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
2	Banjir	06/02/2014	Kel. Salutellue dan Surutanga Kec. Wara Timur		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
3	Banjir	06/02/2014	Kel. Takkalala dan Songka Kec. Wara Selatan		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD

4	Kebakaran	06/02/2014	Kel. Latuppa Km. 8 Kec. Mungkajang		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
6	Banjir	05/04/2014	Kel. Amassangan Kec. Wara		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
7	Banjir	05/04/2014	Kel. Surutanga Kec. Wara Timur		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
8	Banjir	05/04/2014	Kel. MawaKec. Sendana		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
9	Tanah Longsor	05/04/2014	Kel. Latuppa Kec. Mungkajang		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
10	Pohon Tumbang	07/04/2014	Kel. Ponjalae dan Pontap Kec. Wara Timur		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
11	Pohon Tumbang	13/04/2014	Kel. Rampoang Kec. Bara		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
12	Kebakaran	06/07/2014	Kel. Pontap Kec. Wara Timur		Rusak Ringan	2.500.000	Ditangani oleh Damkar dan BPBD
13	Kebakaran Rumah	02/08/2014	Kel. Batupasi Kec. Wara Utara		Rusak Ringan	3.000.000	Ditangani oleh Damkar dan BPBD
14	Kebakaran Lahan	14/09/2014	Kel. To Bulung Kec. Bara		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
15	Kebakaran Bengkel	16/09/2014	Kel. Pattene Kec. Wara Utara		Rusak Berat	750.000.000	Ditangani oleh Damkar dan BPBD
16	Kebakaran Hutan	25/09/2014	Kel. Battang Barat Kec. Wara Barat		Rusak Berat		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
17	Kebakaran Rumah	26/09/2014	Kel. Tompotikka Kec. Wara		Rusak Ringan	2.000.000	Ditangani oleh Damkar dan BPBD
18	Kebakaran Hutan	30/09/2014	Kel. Battang Barat Kec. Wara Barat		Rusak Berat		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
19	Kebakaran Lahan	02/10/2014	Kel. Salekoe Kec. Wara Timur		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
20	Kebakaran Kios	05/10/2014	Kel. Pontap Barat Kec. Wara Timur		Rusak Berat	8.000.000	Ditangani oleh Damkar dan BPBD
21	Kebakaran Lahan	07/10/2014	Kel. Lagaligo Kec. Wara		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
22	Kebakaran Lahan	10/10/2014	Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
23	Kebakaran Lahan	02/11/2014	Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD
24	Longsor	14/11/2014	Kel. Purangi Kec. Sendana		Rusak Ringan		Ditangani oleh Damkar dan BPBD

25	Kebakaran Rumah	17/11/2014	Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur		Rusak Berat	5.020.000	Ditangani oleh Damkar dan BPBD
26	Kebakaran Rumah	09/12/2014	Kel. Tompotikka Kec. Wara		Rusak Ringan	5.000.000	Ditangani oleh Damkar dan BPBD

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo Tahun 2014

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)

Bencana yang terjadi sepanjang tahun 2014 masih berada dalam status bencana Lokal. Namun demikian Pemerintah Kota Palopo tetap mengharapkan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat terhadap masyarakat korban bencana tersebut.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Palopo telah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan upaya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang bersumber dari APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2014 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Koordinasi pencegahan dini bencana alam sebesar Rp. 77.360.000,-
- 2) Sosialisasi penanggulangan bencana alam sebesar Rp. 38.350.000,-
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebesar Rp. 36.040.000,-
- 4) Pelaksanaan pencegahan penanggulangan bencana alam sebesar Rp. 422.450.000,-
- 5) Pelatihan penanggulangan bencana alam sebesar Rp. 96.575.000,-
- 6) Pengelolaan Sarana dan prasarana Penanggulangan bencana sebesar Rp. 39.500.000,-
- 7) Rehabilitasi dan konstruksi kawasan bencana sebesar Rp. 53.405.000,-

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

a. Potensi Bencana

Karena umumnya bahaya bencana dapat terjadi dimana saja dengan sedikit atau tanpa peringatan, maka sangat penting bersiaga terhadap bahaya bencana untuk mengurangi resiko dampaknya. Melalui pendidikan

masyarakat, dapat dilakukan beberapa hal untuk mengurangi resiko bencana. Selain itu, agar masyarakat mengetahui langkah-langkah penanggulangan bencana sehingga dapat mengurangi ancaman, mengurangi dampak, menyiapkan diri secara tepat bila terjadi ancaman, menyelamatkan diri, memulihkan diri, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi agar menjadi masyarakat yang aman, mandiri dan berdaya tahan terhadap bencana. Salah satu bentuk siaga yang perlu diketahui adalah dengan memahami potensi bencana yang bisa terjadi di Kota Palopo.

Secara umum potensi bencana di Kota Palopo adalah bahaya alam, bahaya non alam, dan kerentanan. Bahaya Alam adalah bahaya yang disebabkan oleh aktivitas alam. Yang termasuk dalam bahaya ini adalah :

1. Banjir
2. Badai/Puting beliung
3. Gelombang pasang
4. Longsor
5. Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Abrasi Pantai

Bahaya bukan alam adalah bahaya yang terjadinya tidak secara alamiah, tetapi adanya keterlibatan faktor lain terutama manusia. Yang termasuk dalam bahaya ini adalah :

1. Kebakaran Bangunan
2. Epidemii Wabah Penyakit (termasuk HIV/AIDS)
3. Penggunaan Narkoba dan Obat Terlarang
4. Gagal Teknologi
5. Konflik Sosial
6. Pencemaran Lingkungan

Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurang mampuan masyarakat untuk penanggulangi dampak suatu bencana. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam penyusunan

Rencana penanggulangan Bencana Kota Palopo, kerentanan dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu kerentanan fisik dan kerentanan non fisik.

b. Upaya / Antisipasi Pengurangan Resiko Bencana

Upaya antisipasi dan mengurangi risiko bencana dilakukan dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur, selain itu APBD Kota Palopo telah merencanakan beberapa program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal, dengan menerapkan kebijakan.
2. Menerbitkan aturan penanggulangan bencana di Kota Palopo.
3. Mempercepat pembentukan aturan penanggulangan bencana di Kota Palopo.
4. Membangun sumber daya penanggulangan bencana yang memadai dan kompeten sesuai dengan standar.
5. Menerbitkan prosedur internal untuk mobilitas sumberdaya dalam penanggulangan bencana.
6. Membangun jaringan kerja penanggulangan bencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya.
7. Mengupayakan pembangunan sistem peringatan dini bencana yang handal dan responsive bagi masyarakat.
8. Membangun kesiapsiagaan Bencana secara partisipatif, dengan menerapkan kebijakan melalui kegiatan simulasi.
9. Membangun peningkatan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
10. Menyiapkan wilayah percontohan siaga bencana untuk mengembangkan kemampuan penduduk dalam memobilisasi sumberdaya.
11. Membangun kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana.
12. Memberdayakan ekonomi masyarakat dipesisir sebagai alternative pengurangan kerentanan bencana.
13. Mempersiapkan infrastruktur penanggulangan bencana yang tangguh, dengan menerapkan kebijakan.

14. Menyusun skenario umum pengelolaan dan pengembangan wilayah berbasis penanggulangan bencana di setiap Kecamatan.
15. Melaksanakan mitigasi struktural pada daerah rentan.
16. Menerapkan analisis resiko bencana pada rencana pembangunan.
17. Mempersiapkan daerah untuk memasuki masa pemulihan bencana bagi daerah yang terkena bencana.

5. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Sampai dengan tahun anggaran 2014, terdapat beberapa kawasan yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Palopo untuk dikembangkan menjadi kawasan khusus, antara lain Kawasan Industri Palopo (KIPA), Kawasan Wisata Latuppa dan Labombo, kawasan hutan Kota di Bukit Lewadang dan Kawasan SALEMO (Sampoddo-Lemo-lemo).

Untuk rencana pengembangan Kawasan SALEMO (Sampoddo-Lemo-lemo), tahun 2014 diupayakan untuk Penyusunan Master Plan Kawasan Cepat Tumbuh Salemo, Penyusunan Rencana Induk Reklamasi Pantai Salemo, Studi Kelayakan Reklamasi Pantai Salemo Kota Palopo, Penyusunan Zonasi serta Ranperda RDTR Pantai Salemo, Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Salemo, Penyusunan Amdal Salemo dan Amdal Jalan lingkar yang berada pada kawasan Salemo. Sementara itu untuk rencana pengembangan kawasan wisata Latuppa dan Labombo sebagai kawasan pengembangan pariwisata, difokuskan pada pengadaan sarana dan prasarana pendukung, antara lain rehab kolam renang latuppa yang berada pada kawasan wisata latuppa.

6. Sumber Anggaran

Anggaran pengembangan kawasan menjadi kawasan pengembangan khusus dibebankan pada APBD Kota Palopo tahun 2014 dan diharapkan adanya dukungan dana bantuan dari Provinsi dan Pusat maupun dari pihak Investor pada tahun 2015.

7. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pengembangan kawasan menjadi Kawasan khusus adalah keterbatasan dana untuk melakukan investasi pembangunan sarana dan prasarana. Solusinya adalah melakukan promosi potensi dan pemberian kemudahan bagi calon investor yang menanamkan investasinya di kawasan tersebut. Alternatif lain adalah pembebasan seluruh kebutuhan lahan oleh Pemerintah Kota, agar pemerintah leluasa untuk melakukan penataan, termasuk promosi investasi, namun hal ini membutuhkan biaya yang cukup besar.

8. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Gangguan keamanan sepanjang tahun 2014 yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Mancani sedikit terusik dengan adanya konflik antara sesama warga. Sebagai tindak lanjut dari kejadian tersebut dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Kota Palopo yang dimotori oleh aparat keamanan dalam hal ini POLRI dan Satpol PP diturunkan langsung ke lokasi kejadian.

9. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Tahun Anggaran 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penertiban minuman keras (beralkohol).
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.
- 3) Pengawasan Keputusan Walikota.
- 4) Pengamanan tempat-tempat keramaian.
- 5) Penertiban hotel, restoran,café dan THM.
- 6) Penertiban pedagang kaki lima.
- 7) Penertiban PSK yang berkeliaran.
- 8) Penertiban HO, IMB, SITU.

- 9) Penertiban hewan ternak yang berkeliaran.
- 10) Penertiban anak sekolah yang berkeliaran pada jam sekolah
- 11) Penertiban sempadan pantai dan sempadan jalan.
- 12) Penertiban KTP.
- 13) Penertiban PNS.
- 14) Penertiban hari besar keagamaan.
- 15) Pengamanan kegiatan pemerintah
- 16) Pengamanan tempat keramaian.
- 17) Pengamanan Kegiatan olah raga.
- 18) Pengamanan Perda dan SK Walikota.
- 19) Pengamanan hari besar nasional.
- 20) Pengawasan para Pejabat Pemerintah.
- 21) Patroli wilayah dalam wilayah Kota Palopo.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas maka dialokasikan anggaran pada tahun 2014 sebagai berikut :

- 1) Pengamanan dan penjagaan asset jumlah dana Rp. 560.600.000,-
- 2) Penindakan dan penyidikan penyelenggaraan perda Rp. 49.275.000,-
- 3) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Rp. 10.000.000,-
- 4) Pengendalian kantrantibmas dan tindak kriminal Rp. 859.700.000,-
- 5) Pengamanan, pengawasan dan patroli wilayah Rp. 659.800.000,-
- 6) Penyusunan kebijakan ketentraman dan ketertiban Rp. 98.634.000,-

10. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan konflik yang mengganggu Keamanan dan Ketenteraman di Kota Palopo terlaksana dengan baik berkat kerjasama yang baik antar Pemerintah Kota Palopo dengan instansi terkait, seperti Polres Palopo, Kodim, Forum Komunikasi antar Umat Beragama, dan komponen masyarakat

Dengan terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Forum Muspida yang terealisasi melalui Pembentukan Forum Komunikasi Masalah Aktualisasi yang melibatkan semua unsur Muspida dan Unit Kerja terkait, berdasarkan SK. Walikota Palopo Nomor : 163/III/2006 tanggal 18 Maret 2006 tentang Pembentukan Forum Pengkajian Masalah Strategis Daerah Kota Palopo maka pada tahun 2014 suasana yang aman dan kondusif, dan hubungan yang harmonis diantara elemen masyarakat masih terjaga dengan baik. Hal ini merupakan berfungsinya kegiatan lembaga-lembaga tersebut tetap berjalan dengan baik.

11. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Di dalam penanggulangan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2014, telah ditempuh melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Aparat Pemerintah Daerah dengan aparat Keamanan dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat. Adapun Bentuk-bentuk keikutsertaan aparat keamanan tersebut antara lain :

- 1) Koordinasi dalam sosialisasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Operasi penertiban patologi sosial dibentuk tim yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
- 3) Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang mengatur Ketentraman dan ketertiban umum, seperti pengawasan dan pengendalian terhadap prostitusi, minuman keras, penertiban rumah sewa/kost dan lain-lain.

Pelaksanaan Rapat koordinasi ketentraman dan ketertiban bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai potensi rawan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum, serta langkah-langkah preventif dan represif.

BAB VII

P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Palopo Tahun Anggaran 2014 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2014 Kota Palopo memasuki tahun ke dua dari penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2013.
- 2) Perkembangan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pokok dalam melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, IPM menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan pada tahun 2012 mencapai 77,28 % dan pada tahun 2013 telah mencapai 77,70 %.

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo mencapai 8,99%, pertumbuhan ini dipicu oleh kinerja positif semua sektor, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang berkontraksi (tumbuh negatif) sebesar 10,57%. Kinerja terbaik terjadi pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang tumbuh hingga 16,14% selain sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif, sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan terendah sebesar 3,04%.

- 3) Tiga sektor yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi Palopo yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor angkutan dan komunikasi. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 3,28% terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mempunyai pertumbuhan tinggi memberikan kontribusi

sebesar 2,46% sedang sektor angkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 1,01%.

- 4) Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tahun 2013 sebesar 8,99% mengalami percepatan pertumbuhan dibanding dengan tahun 2012 sebesar 8,68%, pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut dari sektor keuangan dan sektor perdagangan yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sedangkan pada subsektor penggalian mengalami pertumbuhan minus (-10,57)%.
- 5) Pada dasarnya capaian pertumbuhan ekonomi ini melampaui target yang menjadi salah satu sasaran strategik dalam pembangunan bidang ekonomi di daerah pada RPJMD Tahun 2008-2013 yaitu upaya untuk mempertahankan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 8 %. Sementara jika dilihat pada nilai PDRB Atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp.3.081.642,00 (juta rupiah) atau meningkat sekitar 444,10 (milyar rupiah) dari keadaan tahun sebelumnya 2012 yakni sebesar 2.637.545,42 (juta rupiah) nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan meningkat hampir 7 kali lipat dibanding keadaan pada tahun 2000, hal ini terlihat dari indeks perkembangan yang mencapai 688,75 persen pada tahun 2013.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Palopo tahun 2014 ini disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi salah satu kewajiban saya sebagai Walikota Palopo kepada DPRD Kota Palopo.

Sege nap tim penyusun telah berupaya maksimal untuk memaparkan data dan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas pokok pemerintahan ke dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini, namun disadari bahwa belum semua hal mengenai penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tersebut dapat dimuat secara rinci dalam laporan ini, sehingga

untuk hal-hal yang masih membutuhkan uraian informasi yang lebih rinci, sejojayanya dapat disandingkan dengan informasi yang terdapat pada dokumen-dokumen laporan lainnya, antara lain Laporan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan APBD Kota Palopo, Laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD Propinsi Sulawesi Selatan dan APBN, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Palopo Tahun 2014, dan Dokumen Penggunaan Anggaran APBD Kota Palopo Tahun 2014.

Melalui kesempatan ini kita mengharapkan agar kiranya hasil akhir penyampaian LKPJ ini melahirkan rekomendasi dari DPRD Kota Palopo, guna memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan ke depan yang menjadi tugas pokok kami sebagai pengemban amanat rakyat di daerah, untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi daerah, yang tentunya hanya dapat diwujudkan jika mendapat dukungan dari segenap unsur yang ada.

Demikian harapan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga LKPJ ini dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan dapat meningkatkan kinerja pembangunan Kota Palopo ke depan, atas kerjasamanya selama ini dihaturkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan nilai ibadah terhadap setiap yang kita lakukan untuk Kota Palopo, AminWassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palopo, 10 Maret 2015

Walikota,



Drs. H. JUDAS AMIR, MH